

LAPORAN KINERJA

BALAI PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL SUMATERA BARAT
TA. 2024



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja UPT Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Tahun 2024**" ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan bentuk pertanggungjawaban Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Padang, 10 Januari 2025

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Sumatera Barat,


Thabrani, S.T., M.T.
NIP. 19670811 199803 1 003

1. Tujuan dan Sasaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah konsekuensi logis dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang menjadi tugas dan wewenang Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat di tahun 2024 dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Pasal 103 menjelaskan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Isu Strategis

- a. Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi Bunga Tanjung – Teluk Tapang
Untuk mendukung lancarnya akses arus barang melalui Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 34 km.

- b. Mendukung Pembangunan Jembatan Gantung Bagi Pejalan Kaki di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.
- c. Mendukung pembangunan Jalan daerah,
- d. Mendukung pembangunan Jembatan daerah,
- e. Mendukung penanganan jalan daerah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023.

4. Pencapaian

Pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024 dengan rincian :

- Pelebaran Jalan Menambah Lajur ditargetkan 1,6 km dan terealisasi 100%,
- Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP) ditargetkan 19,10 km dan terealisasi 100 %,
- Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) ditargetkan 7,47 km dan terealisasi 100 %,
- Dukungan Penanganan Jembatan Daerah ditargetkan 156 m dan terealisasi 99,06 %, terdapat 1 paket Pembangunan Jembatan Gantung Siguntur yang dikerjakan dalam masa denda,
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan ditargetkan 1315,70 km dan terealisasi 100 %,
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya ditargetkan 0,00 km (12 paket/ kegiatan) dan terealisasi 100 %,
- Preservasi Rekonstruksi Rehabilitasi Jalan ditargetkan 46,25 km dan terealisasi 100 %,
- Penanganan Drainase Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan ditargetkan 0,00 km (6 paket/ kegiatan) dan terealisasi 100 %,
- Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya ditargetkan 15587,60 m dan terealisasi 100 %,
- Preservasi Jembatan ditargetkan 2756,10 m dan terealisasi 100 %,
- Penggantian Jembatan ditargetkan 63,60 m dan terealisasi 100 %,
- Penggantian Jembatan pada RO Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP ditargetkan 17 m dan terealisasi 96,05 %, terdapat 1 paket Penggantian Jembatan Sagitsi Cs yang dikerjakan dalam masa denda,

- Dukungan Penanganan Jalan Daerah ditargetkan 9,30 km dan terealisasi 84,09 %, terdapat 1 paket Preservasi Jalan Rimbo Data - Kapujan yang dikerjakan dalam masa denda,
- Jumlah Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan ditargetkan 10 dokumen dan terealisasi 100 %,
- Jumlah Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik ditargetkan 2 dokumen dan terealisasi 100 %,
- Jumlah Layanan BMN ditargetkan 1 layanan dan terealisasi 100 %,
- Jumlah Layanan Umum ditargetkan 5 layanan dan terealisasi 100 %,
- Jumlah Layanan Perkantoran ditargetkan 5 layanan dan terealisasi 100 %,
- Jumlah Layanan Sarana Internal ditargetkan 69 unit dan terealisasi 100 %,
- Jumlah Layanan Prasarana Internal ditargetkan 1 unit dan terealisasi 100%.

5. Permasalahan di Lapangan

- Cuaca ekstrim
- Bencana Alam
- Masalah SDM pada penyedia jasa.
- Masalah finansial pada penyedia jasa (*cash flow*).
- Pengadaan material yang sering terlambat di lapangan.

6. Kinerja Keuangan

Ditinjau dari aspek keuangan jumlah anggaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada awal tahun 2024 adalah sebesar Rp. 720.090.725.000,- dan pada bulan Desember 2024 anggaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat berubah sesuai dengan PK Revisi pada bulan Desember 2024 menjadi Rp. 1.303.974.518.000,- sedangkan dana yang terserap sampai tanggal 31 Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.303.167.796.000,- atau sebesar 99,94 %, dengan progres fisik 99,82 %.

7. Keterbatasan Pendanaan

Terbatasnya alokasi anggaran yang signifikan dibandingkan kebutuhan yang telah diusulkan sebelumnya tentunya akan mengakibatkan beberapa permasalahan yang harus dihadapi dan kendala pencapaian sasaran yang ditetapkan, diantaranya adalah:

- a. Banyaknya panjang jalan yang perlu mendapat penanganan efektif namun hanya mendapat alokasi anggaran pemeliharaan rutin.
- b. Penyelenggara jalan mengalami kesulitan untuk pemenuhan indikator kinerja utama (IKU) yang optimal di seluruh jaringan jalan nasional yang ada sehingga mengakibatkan turunnya kinerja aksesibilitas, mobilitas dan tingkat keselamatan.

8. Hambatan dalam Proses Pengadaan Lahan

Hambatan dalam pembebasan tanah untuk kebutuhan pelaksanaan fisik merupakan kendala utama yang mengakibatkan terganggunya kelancaran dari pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah direncanakan. Beberapa kendala yang mengakibatkan hambatan pelaksanaan pembebasan tanah, antara lain adalah :

- a. Terbatasnya alokasi dana untuk pengadaan tanah pada DIPA awal sehingga pemenuhannya harus mengandalkan dana sisa lelang.
- b. Permasalahan pada tahap pelaksanaan pembebasan tanah di lapangan yang diakibatkan kelemahan koordinasi, adanya perubahan peraturan, dan kehati-hatian yang tinggi dalam proses penetapan harga dan pembayaran ganti rugi.
- c. Kendala birokrasi dalam proses perijinan dan pemanfaatan tanah milik instansi Pemerintah.

DAFTAR ISI

1	KATA PENGANTAR	2
a.	RINGKASAN EKSEKUTIF	3
2	DAFTAR ISI	7
3	DAFTAR TABEL	9
4	DAFTAR GAMBAR	15
5	DAFTAR SINGKATAN	18
1	BAB I PENDAHULUAN	20
1.1	Latar Belakang	20
1.2	Tugas dan Fungsi	21
1.3	Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	30
1.4	Sarana dan Prasarana	54
1.5	Isu Strategis	68
1.5.1	Kondisi wilayah	68
1.5.2	Isu Strategis	79
1.6	Sistematika Laporan	79
2.	BAB II PERENCANAAN KINERJA	81
2.1	Uraian Singkat Renstra	81
2.1.1	Tujuan Renstra BPJN Sumatera Barat	Error! Bookmark not defined.
2.1.2	Visi, Misi, dan Arahkan Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024	81
2.1.3	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
2.1.4	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian PUPR 2020-2024	84
2.1.5	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024	87
2.1.6	Visi dan Misi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	88
2.1.7	Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga	Error! Bookmark not defined.
2.1.8	Sasaran Renstra BPJN Sumatera Barat 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
2.2	Perjanjian Kinerja	100
2.3	Metode Pengukuran	109
2.3.1	Pengukuran sasaran program	109
2.3.2	Pengukuran Sasaran Kegiatan	124
2.3.3	Penanggung Jawab Pengumpulan Data	124
2.4	Target Kinerja Tahun Ini Menurut Renstra	124
	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	129
3.1	Upaya Peningkatan Akuntabilitas	129
3.2	Capaian Kinerja Organisasi	136

3.3	Perbandingan Kinerja Organisasi	163
3.4	Realisasi Anggaran	180
3.4.1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	180
3.4.2	Komposisi Pendanaan (RPM, PNBP, SBSN, PLN)	186
3.4.3	Realisasi Anggaran TA 2024	188
3.4.4	Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya	189
	Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya	189
3.4.5	Isu-isu terkait Program dan Anggaran TA 2024	193
3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	195
3.6	Pemanfaatan Laporan Kinera	197
3.7	Paket Diresmikan dan Penghargaan	222
3.8	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Penggunaan Layanan Publik	223
3.9	Paket Strategis	224
3.9.1	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Sumatera Barat	224
3.9.2	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. Sumatera Barat	233
3.9.3	Penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023	234
4	BAB IV PENUTUP	238
4.1.	Simpulan Umum	238
4.2.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	238

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat ...	30
Tabel 1.2 Rekapitulasi Penempatan Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	31
Tabel 1.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	32
Tabel 1.4 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	32
Tabel 1.5 Rekapitulasi PPPK Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	33
Tabel 1.6 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	34
Tabel 1.7 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	34
Tabel 1.8 Rekapitulasi PPPK Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	35
Tabel 1.9 Rekapitulasi Pendidikan PNS di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	36
Tabel 1.10 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Pendidikan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	37
Tabel 1.11 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	39
Tabel 1.12 Rekapitulasi PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	41
Tabel 1.13 Rekapitulasi Non PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat	42
Tabel 1.14 Rekapitulasi PPPK berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	43
Tabel 1.15 Rekapitulasi PNS berdasarkan Jabatan Fungsional di Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	44

Tabel 1.16 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	45
Tabel 1.17 Rekapitulasi Aset di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	55
Tabel 1.18 Ruas PPK 1.1. Provinsi Sumatera Barat.....	74
Tabel 1.19 Ruas PPK 1.2. Provinsi Sumatera Barat.....	74
Tabel 1.20 Ruas PPK 1.3. Provinsi Sumatera Barat.....	75
Tabel 1.21 Ruas PPK 1.4. Provinsi Sumatera Barat.....	75
Tabel 1.22 Ruas PPK 1.5. Provinsi Sumatera Barat.....	75
Tabel 1.23 Ruas PPK 1.6. Provinsi Sumatera Barat.....	76
Tabel 1.24 Ruas PPK 2.1. Provinsi Sumatera Barat.....	76
Tabel 1.25 Ruas PPK 2.2. Provinsi Sumatera Barat.....	77
Tabel 1.26 Ruas PPK 2.3. Provinsi Sumatera Barat.....	77
Tabel 1.27 Ruas PPK 2.4. Provinsi Sumatera Barat.....	77
Tabel 1.28 Ruas PPK 2.5. Provinsi Sumatera Barat.....	78
Tabel 1.29 Ruas PPK SKPD. S01 Provinsi Sumatera Barat	78
Tabel 2.1 Lima (5) Arahan Utama Presiden sebagai Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024.....	83
Tabel 2.2 Target Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Jalan 2020-2024.....	98
Tabel 2.3 Target Keluaran (Output) Kegiatan 2020-2024.....	99
Tabel 2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (outcome)	104
Tabel 2.5 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output) .	106
Tabel 2.6 Skala Penilaian KPI Roughness	112
Tabel 2.7 Skala KPI PCI	112
Tabel 2.8 Skala Penilaian IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan	113
Tabel 2.9 Skala Penilaian KPI Efektifitas Drainase Permukaan.....	114
Tabel 2.10 Skala Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Sub Soil	114
Tabel 2.11 Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi.....	115
Tabel 2.12 Efektivitas Drainase Permukaan.....	115
Tabel 2.13 Efektivitas Drainase Subsoil.....	116

Tabel 2.14 Tabel Faktor Pembobot KPI Final	116
Tabel 2.15 Matriks Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	124
Tabel 2.16 Sandingan Outcome dan Target Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024.....	125
Tabel 2.17 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024	126
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Sasaran Program TA 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 Rincian Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional.....	137
Tabel 3.3 Rincian Rating Kondisi Jalan Nasional	138
Tabel 3.4 Sandingan Kemantapan Jalan Kondisi SMT 2 2022 dengan Kondisi SMT 2 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.5 Sandingan Kondisi Jembatan Nasional Akhir 2022 dengan Kondisi Akhir 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.6 Rincian Rating Keselamatan Jalan Nasional	139
Tabel 3.7Capaian Kemantapan Jalan, Sandingan Nilai Rating Kondisi Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 dan Tahun 2024	141
Tabel 3.8 Perbandingan Target (PK revisi dan DIPA Revisi Akhir) dan Realisasi Kinerja TA. 2023.....	142
Tabel 3.9 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output RBC	006
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.10 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRBC	005
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.11 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRBC	001
.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3.12 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCBF	001
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.13 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCDC	012
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.14 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRDC	009
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.15 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCDC	002
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.16 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCDC	004
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.17 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRDC	003
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.18 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRDC	005
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.19 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRBC	001
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.20 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCDF	010
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.21 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRDF	007
.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3.22 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCDF	002
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.23 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCDF	003
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.24 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRDF	003
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.25 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRDF	005
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.26 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputRDF	006
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.27 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCBR	001
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.28 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCBR	002
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.29 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputCDC	004
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.30 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputEBA	956
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.31 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputEBA	962
.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3.32 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputEBA	994
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.33 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian OutputEBB	951
.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.34Capaian Kinerja Outcome Tahun 2020 s/d 2023.....	163
Tabel 3.35Capaian Kinerja Outcome Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	
.....	164
Tabel 3.36Capaian Kinerja Outcome Rating Keselamatan Jalan Nasional	
.....	164
Tabel 3.37 Perbandingan Capaian Kinerja Output TA. 2020 s/d 2023 per output.....	167
Tabel 3.38Perbandingan Capaian Kinerja Output TA. 2020 s/d 2023 per output dengan Renstra	173
Tabel 3.39 Sandingan Capaian IKSP Instansi Sejenis	179
Tabel 3.40 Tabel Alokasi DIPA	180
Tabel 3.41 Kronologis Perubahan DIPA.....	181
Tabel 3.42Realisasi Anggaran BPJN Sumatera Barat.....	188
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	189
Tabel 3.44 Capaian Kinerja TA. 2020 - 2023	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	29
Gambar 1.2 Jabatan Fungsional Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1.3 Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	31
Gambar 1.4 Penempatan Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat	31
Gambar 1.5 PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	32
Gambar 1.6 Non PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	33
Gambar 1.7 PPPK Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	33
Gambar 1.8 PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	34
Gambar 1.9 Non PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	34
Gambar 1.10 PPPK Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	35
Gambar 1.11 Pendidikan PNS di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.....	37
Gambar 1.12 Non PNS Berdasarkan Pendidikan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	38
Gambar 1.13 PNS Berdasarkan Golongan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	40
Gambar 1.14 PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat	41
Gambar 1.15 Non PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat	42

Gambar 1.16 Non PPPK berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat.....	43
Gambar 1.17 Peta PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional Lingkungan BPJN Sumatera Barat	44
Gambar 1.18 Peta Non PNS Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan BPJN Sumatera Barat	45
Gambar 1.19 Peta Prov. Sumatera Barat	68
Gambar 1.20 Pesona kawasan wisata Lembah Harau Payakumbuh	69
Gambar 1.21 Pesona Keindahan Kelok 9.....	70
Gambar 1.22 Pesona Keindahan Pulau Mandeh	71
Gambar 1.23 Kelok 44 , Kab. Agam yang merupakan rute wajib Tour de Singkarak.....	72
Gambar 1.24 Pesona Wisata dan Sejarah Tambang Batu Bara Ombilin , Kota Sawahlunto	72
Gambar 1.25 Kawasan Seribu Rumah Gadang , Kab Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat	73
Gambar 1.26 Peta Lokasi Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat.....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 2.1 Peta Strategi Ditjen Bina Marga 2020-2024	94
Gambar 2.2 Gambar Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024.....	95
Gambar 2.3 Penggunaan KPI Jalan	112
Gambar 2.4 Bisnis Proses Analisis Strategi Jaringan Jalan	118
Gambar 2.5 IKP Rating Kondisi Jalan dan Kurva Penurunan Kondisi Aset Jalan	119
Gambar 3.1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional TA 2023.....	137
Gambar 3.2 Rating Kondisi Jalan Nasional TA 2023.....	138
Gambar 0.3 Perbandingan Kemantapan Jalan Tahun 2022:2023.....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 3.4 Perbandingan Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2022 vs Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.

Gambar 3.5 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang di Satker PJN II Sumatera Barat.	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.6 Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Padang – Solok - Sawahlunto (Pemeliharaan Rutin Jalan)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.7 Kegiatan Padat Karya Ruitn Jalan dan Reivtalisasi Drainase.	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.8 Kegiatan Paket Preservasi Jalan Lubuk Selasih – Surian – Padang Aro – Bts. Jambi.	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.9 Kegiatan Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Surian - Bts.Jambi (SBSN) MYC (Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan). Error!	Bookmark not defined.
Gambar 3.10 Kegiatan Pekerjaan Berkala Jembatan Ruas Kambang – Bts. Bengkulu, Tapan – Bts. Jambi Satker PJN II Sumatera Barat.....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 3.11 Bagan Pohon Anggaran DIPA Awal (dalam Rp. Ribuan)	185
Gambar 3.12 Bagan Pohon Anggaran DIPA Revisi (dalam Rp. Ribuan)	185
.....	
Gambar 3.13 Pelabuhan Teluk Tapang	225
Gambar 3.14 Kondisi Jalan Paket Pembangunan Akses Pelabuhan Teluk Tapang –	225
Gambar 0.15 Paket Pembangunan Jembatan Gantung Cubadak Air	233
Gambar 3.16 Paket Pembangunan Jembatan Gantung Jorong Ranah	234

DAFTAR SINGKATAN

BMN	:	Barang Milik Negara
BPJN	:	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
e-Monitoring	:	Integrated Electronic Monitoring
e-SAKIP	:	e- Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
e-SAKTI	:	Elektronik Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DTPK	:	Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan
IBENA	:	Informasi Bencana Alam
Invi J	:	Inspeksi Visual Jembatan
IRMS-V3	:	Indonesian Road Management System-Version 3
IKU	:	indikator kinerja utama
IKSS	:	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP	:	Indikator Kinerja Program
JAKI	:	Jalan Kita
KI-BIMA	:	Kepatuhan Intern Bina Marga
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
KI	:	Kawasan Industri
KP	:	Kegiatan Prioritas
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KSPN	:	kawasan strategis nasional
KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
LKIP	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PK	:	Perjanjian Kinerja
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PKS	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PP	:	Program Prioritas
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PJN	:	Pelaksanaan Jalan Nasional

POK	:	Petunjuk Operasional Kegiatan
Renstra	:	Rencana Strategis
RKJ	:	Rating Kondisi Jalan
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPM	:	Rupiah Murni
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIPP	:	Sistem Informasi Pemantauan Proyek
SIKOMPAK	:	Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak
SMD	:	Sistem Masukan Data
SIMAN	:	Sistem Manajemen Aset Negara
SIPBJ	:	Sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa
SIPAKAR	:	Sistem Informasi Padat Karya
SIPASTI	:	Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terinteg rasi
SIPDJD	:	Sistem Informasi Pelaksanaan Jalan Daerah
SIPP	:	Sistem Informasi Pemantauan Proyek
SITIA	:	Sinergitas Transparasi Integrasi Akuntabel
SKPD-TP	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah – Tugas Pembantuan
SKM	:	Survei Kepuasan Masyarakat
SMKK	:	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
SPM	:	Standar pelayanan minimal
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SATKER	:	Satuan Kerja
SS	:	Sasaran Strategis
TA	:	Tahun Anggaran
TNDE	:	Tata Naskah Dinas Elektronik
Unker	:	Unit Kerja
Unor	:	Unit Organisasi
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah mulai dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bukan sekadar tentang bentuk pertanggung jawaban, tetapi juga sebagai tolak ukur dalam menilai ketepatan dalam menysasar target-target kerja yang ditetapkan. Karena itu diperlukan perencanaan kinerja yang matang serta tolak ukur penilaian yang transparan dan profesional guna meningkatkan optimalisasi hasil kinerja yang kemudian dilaporkan dalam LKIP, untuk itu Kementerian PANRB menerbitkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang membahas tata cara penulisan laporan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Sebagai pedoman umum evaluasi atas implementasi SAKIP, maka Kementerian PANRB menerbitkan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Pada tanggal 16 April 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

- a) Penyelenggaraan SAKIP
- b) Rencana strategis
- c) Perjanjian kinerja
- d) Pengukuran kinerja
- e) Pengelolaan data kinerja
- f) Pelaporan kinerja
- g) Reviu dan evaluasi kinerja

Tujuan dibuatnya laporan LKIP ini adalah :

- 1) Peningkatan akuntabilitas instansi Pemerintah,
- 2) Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi Pemerintah,
- 3) Peningkatan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program dan kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi Pemerintah,
- 4) Meningkatkan kredibilitas instansi Pemerintah di hadapan masyarakat,
- 5) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada instansi Pemerintah,
- 6) Mendorong instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 7) Mendorong terwujudnya instansi Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Untuk itu sebagai koordinator satuan kerja di wilayah kerjanya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat wajib menyusun Laporan Kinerja Balai dengan berdasarkan pada kinerja satker – satker di bawahnya.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dalam Pasal 103 menjelaskan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang mempunyai tugas tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (Pasal 104). Dalam melaksanakan tugas, BPJN Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi (pasal 105) :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;

- b. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan serta verifikasi data jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;
- c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan;
- d. penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol;
- e. penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya;
- f. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan termasuk penyusunan dan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;
- g. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya;
- h. sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*);
- i. pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan jembatan termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;
- j. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- k. pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang jalan dan jembatan;
- l. pelaksanaan pengujian, pemantauan dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
- m. pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas;
- n. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
- o. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
- p. koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya;

- q. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi;
- r. pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya;
- s. evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;
- t. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- u. pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan;
- v. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- w. penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- x. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai;
- y. penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan
- z. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.

3.1. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPJN Sumatera Barat berdasarkan kepada beberapa peraturan , yakni:

1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan
3. Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 16

tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Struktur Organisasi BPJN Sumatera Barat terdiri atas :

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha

mempunyai tugas pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana; pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak serta pemberian advokasi hukum, pelaksanaan komunikasi publik di Balai, pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, fasilitasi usulan serta pemantauan dan evaluasi atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional, penyusunan laporan berkala balai, pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga balai, dan penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

b. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan

mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan, melakukan pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan, penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan program pengadaan lahan jalan nasional, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan

perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, dukungan verifikasi data jaringan dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah, penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan, evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, penyusunan rencana, program dan anggaran perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, dan penyusunan usulan perubahan program, anggaran dan keluaran serta rencana kegiatan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.

c. **Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan**

mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, melakukan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, melakukan pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, melakukan pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi, melakukan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan pembangunan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol, melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pemantauan dan pengujian bahan dan hasil

pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian, melaksanakan penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya, melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang pembangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait pembangunan jalan dan jembatan, evaluasi kinerja penyedia jasa pembangunan jalan dan jembatan dan melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang pembangunan jalan dan jembatan.

d. Seksi Preservasi

mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pengawasan penerapan analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, koordinasi dan monitoring kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan serta evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan

evaluasi kinerja penyedia jasa preservasi jalan dan jembatan, penerapan standar pelayanan minimal bidang preservasi jalan dan jembatan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan, dan sertifikasi laik produksi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*).

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

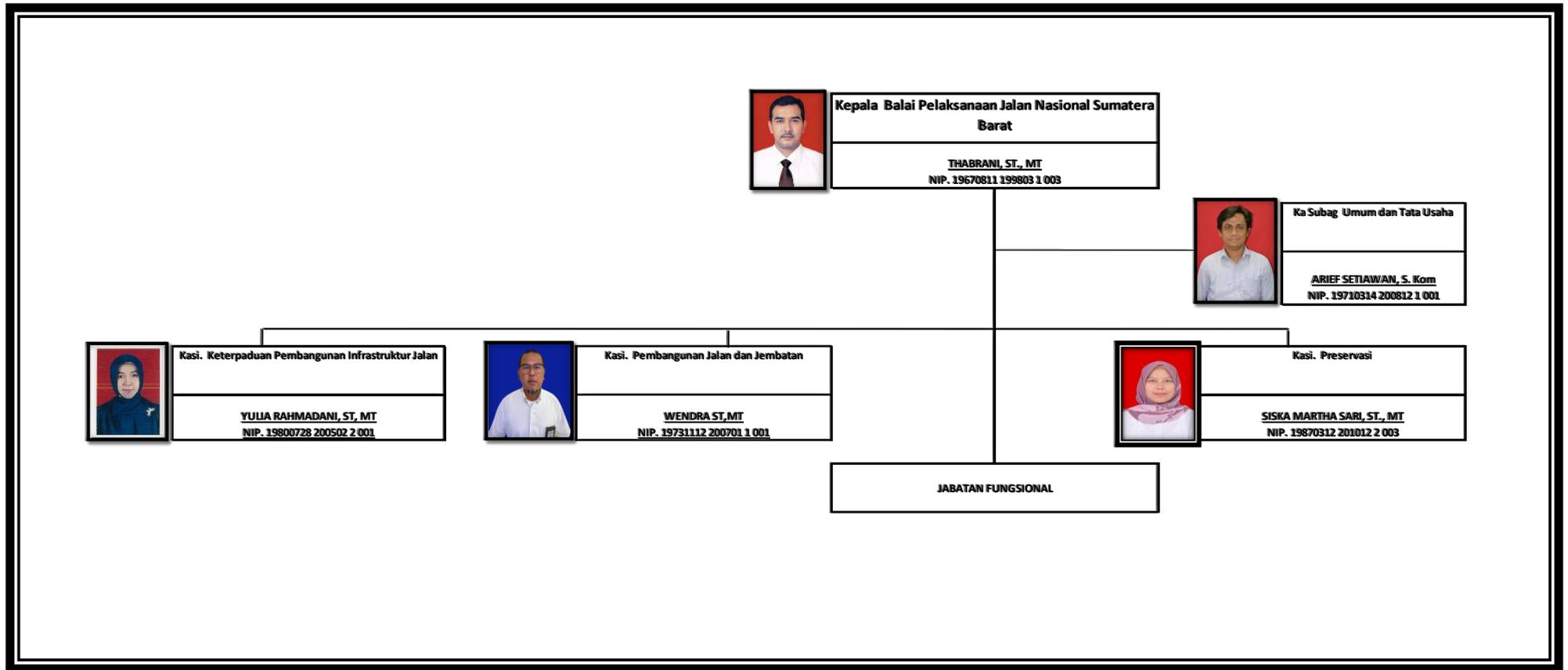
Masing-masing Seksi secara hierarki bertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban dalam organisasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 944/KPTS/M/2024 tanggal 03 Mei 2024 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan pembagian PPK per masing-masing Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut :

Satuan Kerja dan PPK yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
 - a. PPK Umum dan Tata Usaha
 - b. PPK Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan
 - c. PPK Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - d. PPK Preservasi
 - e. PPK KPBU Flyover Sitingau Lauik
2. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat :
 - a. PPK 1.1 Prov. Sumatera Barat
 - b. PPK 1.2 Prov. Sumatera Barat
 - c. PPK 1.3 Prov. Sumatera Barat
 - d. PPK 1.4 Prov. Sumatera Barat
 - e. PPK 1.5 Prov. Sumatera Barat
 - f. PPK 1.6 Prov. Sumatera Barat
3. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat :
 - a. PPK 2.1 Prov. Sumatera Barat

- b. PPK 2.2 Prov. Sumatera Barat
 - c. PPK 2.3 Prov. Sumatera Barat
 - d. PPK 2.4 Prov. Sumatera Barat
 - e. PPK 2.5 Prov. Sumatera Barat
4. Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat:
- a. PPK Perencanaan
 - b. PPK Pengawasan
5. Satker Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat :
- a. PPK S 01



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

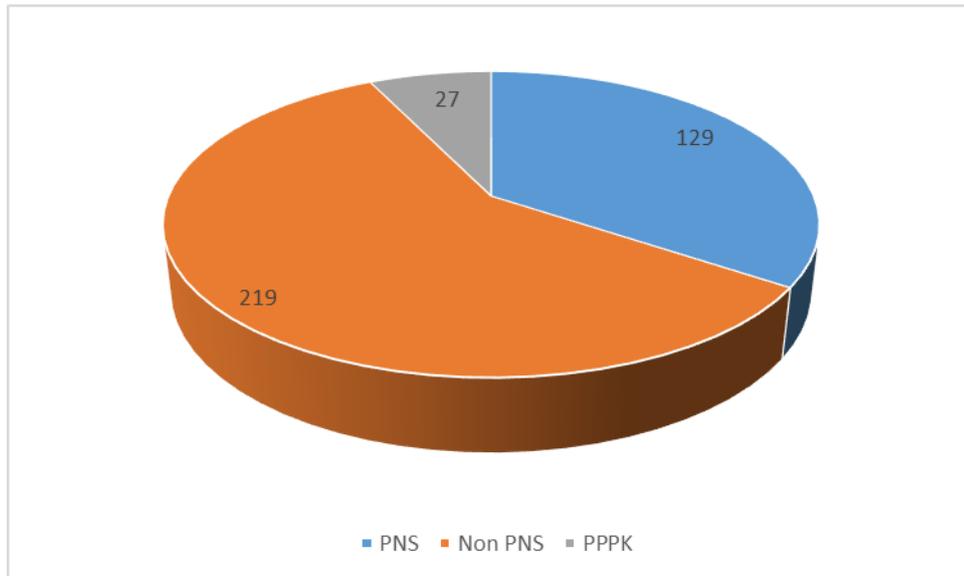
1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

1.3.2.1 Komposisi SDM Di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Sumber daya manusia yang mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat didukung oleh Pegawai Pusat maupun Honorer dengan total keseluruhan 379 orang dengan jumlah PNS sebanyak 129 orang, pegawai honorer sebanyak 219 orang dan Pegawai PPPK sebanyak 27 orang. Semua pegawai tersebar 4 (lima) satker di Provinsi Sumatera Barat yaitu Satker BPJN Sumatera Barat, Satker P2JN Sumatera Barat, Satker PJN Wil. I Sumatera Barat, dan Satker PJN Wil. II Sumatera Barat,. Semua pegawai dapat digolongkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

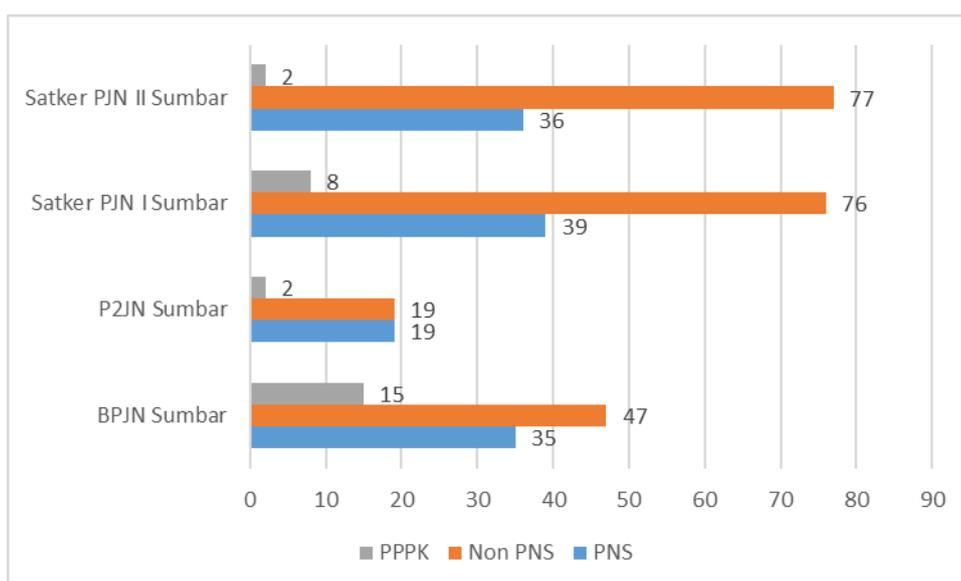
No	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH			Total
		PNS	Non PNS	PPPK	
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	1	0	0	1
2	SUB BAGIAN TATA USAHA	1	0	0	1
2,1	<i>KEPEGAWAIAN</i>	2	6	1	9
2,2	<i>UMUM DAN KEUANGAN</i>	2	15	1	18
2,3	<i>PENGELOLAAN BMN</i>	2	3	0	5
3	SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	6	5	5	16
4	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	8	11	4	23
5	SEKSI PRESERVASI	13	7	4	24
6	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	10	14	2	26
6,1	<i>PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	4	3	0	7
6,2	<i>PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	5	2	0	7
10	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	9	15	0	24
11	<i>PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	5	13	0	18
12	<i>PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	5	13	0	18
13	<i>PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	5	8	2	15
14	<i>PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	4	13	3	20
15	<i>PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	5	7	2	14
16	<i>PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	6	7	1	14
20	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	9	20	0	29
21	<i>PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	6	12	1	19
22	<i>PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	5	14	1	20
23	<i>PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	4	11	0	15
24	<i>PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	5	11	0	16
25	<i>PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	7	9	0	16
	Total	129	219	27	375



Gambar 1.2 Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penempatan Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

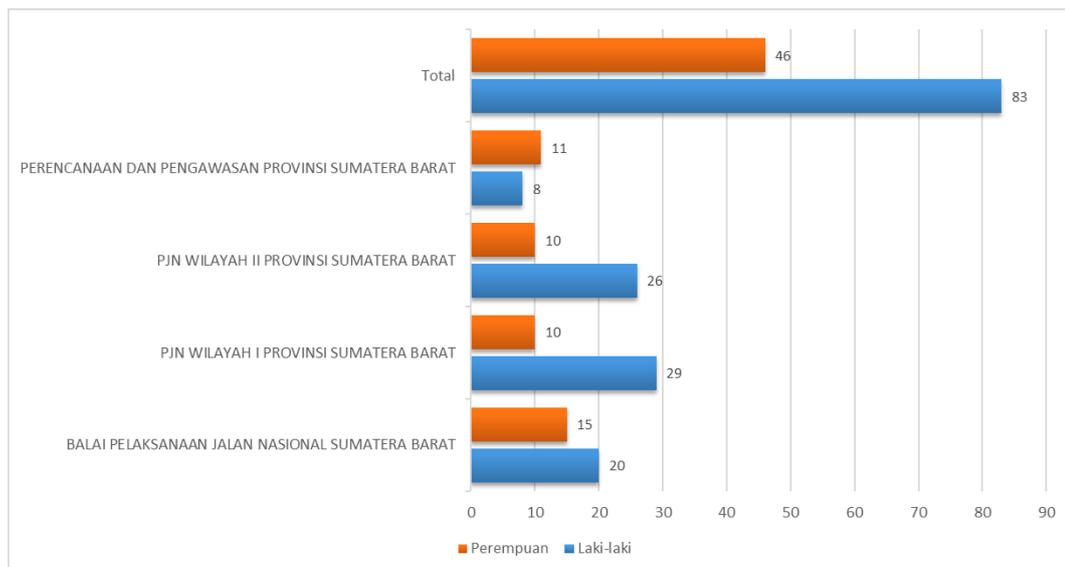
No	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH		
		PNS	Non PNS	PPPK
1	BPJN Sumbar	35	47	15
2	P2JN Sumbar	19	19	2
3	Satker PJJ I Sumbar	39	76	8
4	Satker PJJ II Sumbar	36	77	2
Total		129	219	27



Gambar 1.3 Penempatan Pegawai di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

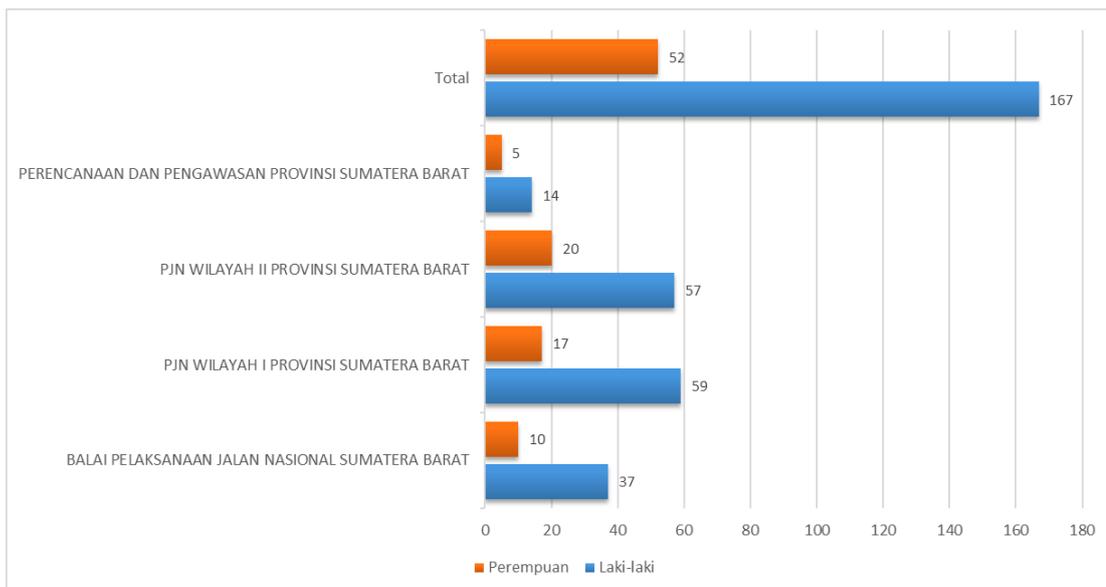
No	NAMA UNIT KERJA	Laki-laki	Perempuan	Total	Keterangan
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	20	15	35	
2	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	29	10	39	
3	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	26	10	36	
4	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	8	11	19	
	Total	83	46	129	



Gambar 1.4 PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1.4 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

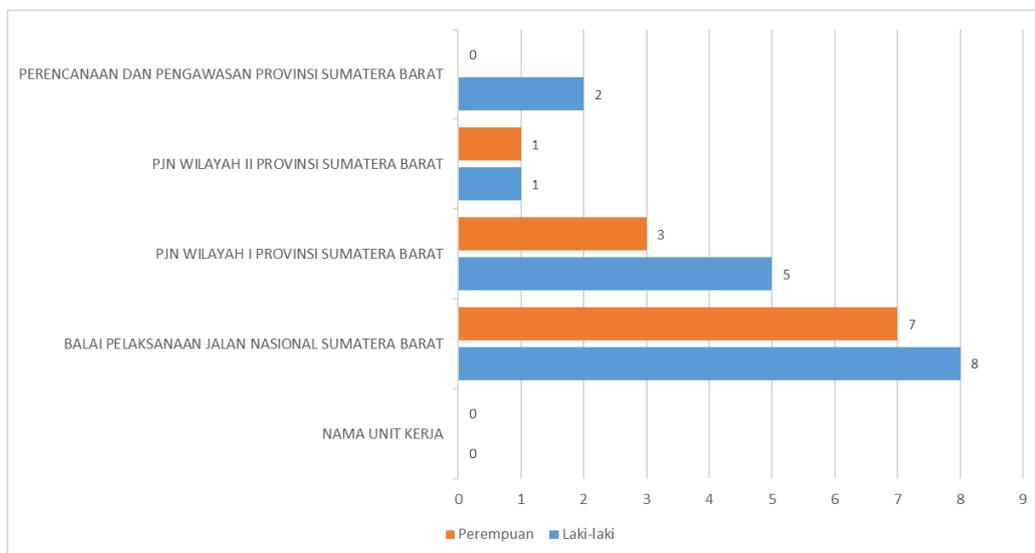
No	NAMA UNIT KERJA	Laki-laki	Perempuan	Total	Keterangan
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	37	10	47	
2	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	59	17	76	
3	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	57	20	77	
4	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	14	5	19	
	Total	167	52	219	



Gambar 1.5 Non PNS Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1.5 Rekapitulasi PPPK Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

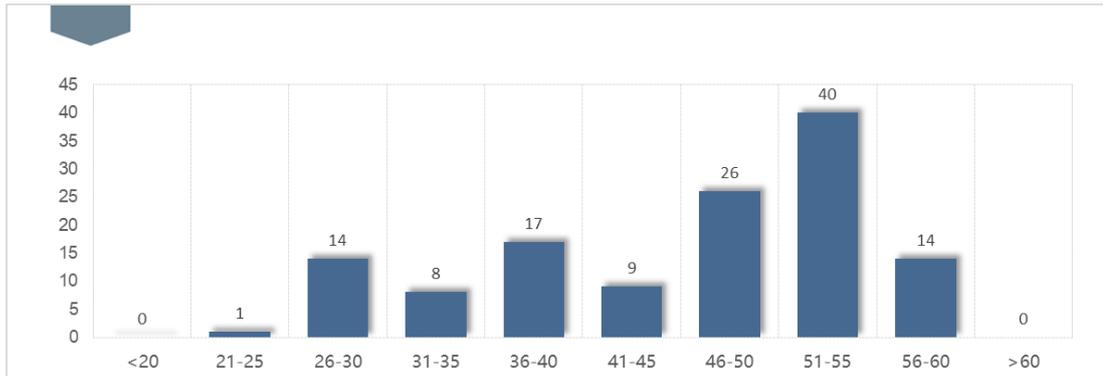
No	NAMA UNIT KERJA	Laki-laki	Perempuan	Total	Keterangan
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	8	7	15	
2	PJJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	5	3	8	
3	PJJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	1	1	2	
4	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2	0	2	
Total		16	11	27	



Gambar 1.6 PPPK Berdasarkan Gender di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1.6 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

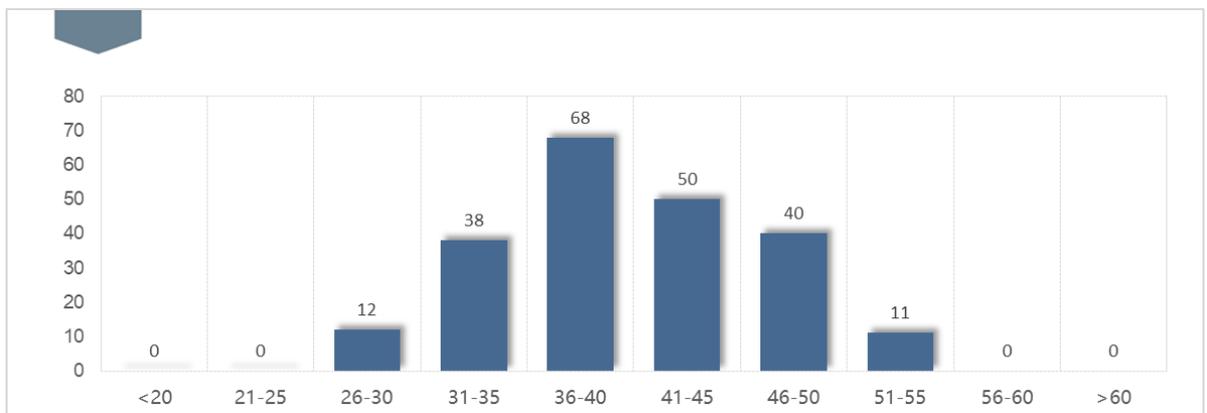
Unit Kerja	<20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	>60	SUB TOTAL
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	0	1	14	8	17	9	26	40	14	0	129



Gambar 1.7 PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1.7 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

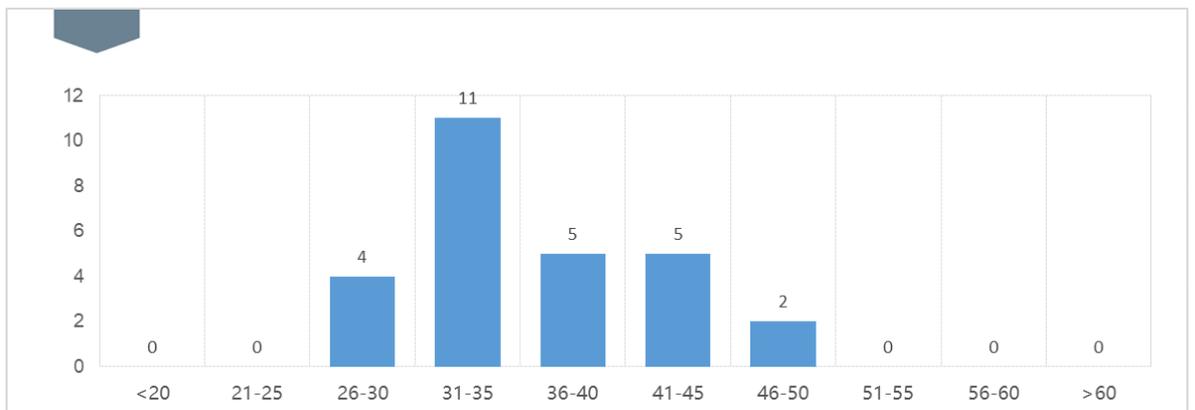
Unit Kerja	<20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	>60	SUB TOTAL
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	0	0	12	38	68	50	40	11	0	0	219



Gambar 1.8 Non PNS Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1.8 Rekapitulasi PPPK Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

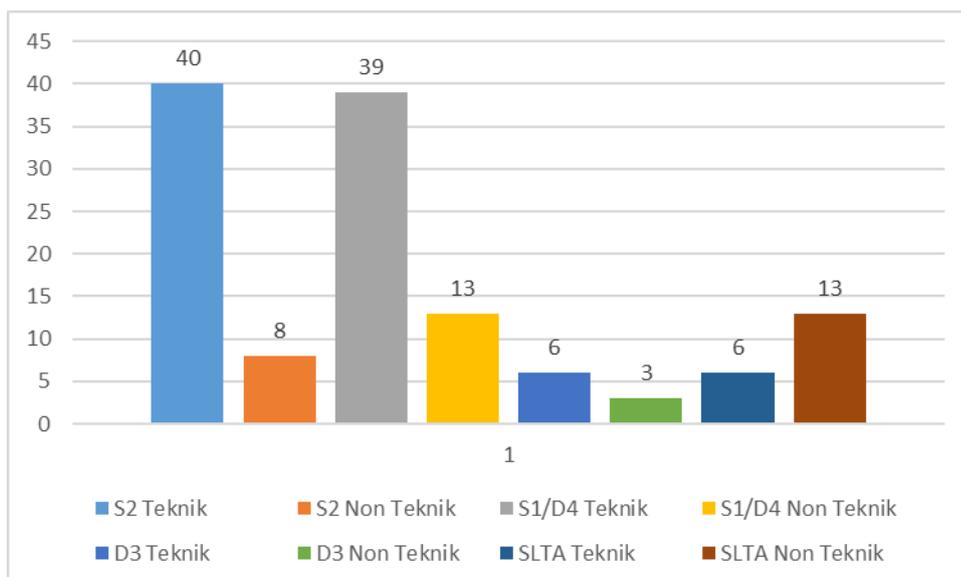
Unit Kerja	<20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	>60	SUB TOTAL
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	0	0	4	11	5	5	2	0	0	0	27



Gambar 1.9 PPPK Berdasarkan Usia di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1.9 Rekapitulasi Pendidikan PNS di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

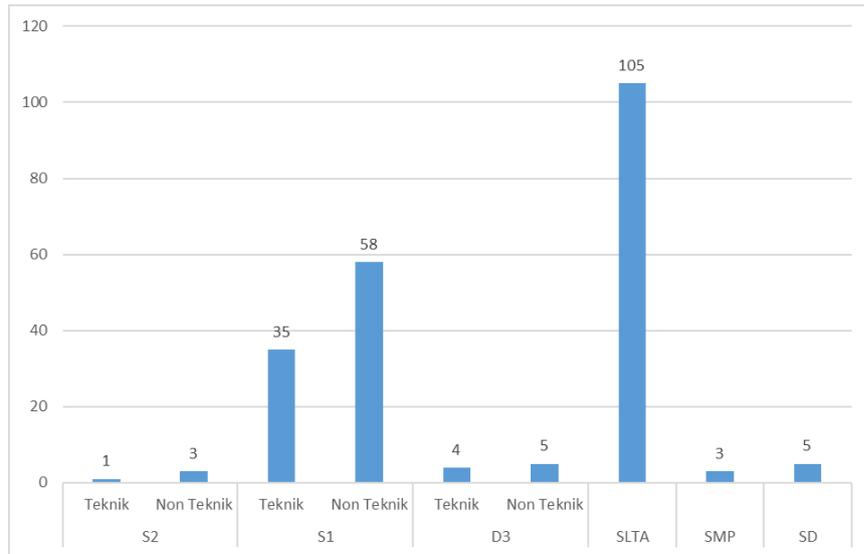
NO	UNIT ORGANISASI	S2		S1/D4		D3		JUMLAH		SLTA		TOTAL
		Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
2	SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
3	<i>KEPEGAWAIAN</i>	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
4	<i>UMUM DAN KEUANGAN</i>	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	
5	<i>PENGLOLAAN BMN</i>	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
6	SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	5	0	0	0	1	0	6	0	0	0	
9	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1	0	6	0	0	0	7	0	0	1	
12	SEKSI PRESERVASI	6	0	3	2	0	0	9	2	0	2	
15	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1	1	5	1	1	1	7	3	0	0	
16	<i>PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	2	1	1	0	0	0	3	1	0	0	
17	<i>PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	1	0	2	1	0	0	3	1	0	1	
18	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	4	1	1	1	1	0	6	2	0	1	
19	<i>PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	0	1	0	0	0	3	0	1	1	
20	<i>PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	3	1	0	0	3	1	1	0	
21	<i>PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	0	1	0	0	0	3	0	0	2	
22	<i>PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	3	1	0	0	3	1	0	0	
23	<i>PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	0	2	0	0	0	3	0	1	1	
24	<i>PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	1	2	0	1	0	5	1	0	0	
25	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	3	1	3	1	1	0	7	2	0	0	
26	<i>PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	0	0	0	0	1	2	1	2	0	
27	<i>PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	0	1	1	1	1	3	2	0	0	
28	<i>PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	0	1	1	0	0	3	1	0	0	
29	<i>PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	1	0	0	0	0	2	1	0	2	
30	<i>PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	0	4	0	0	0	5	0	1	1	
Total		40	8	39	13	6	3	85	24	6	13	129



Gambar 1.10 Pendidikan PNS di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1.10 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Pendidikan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

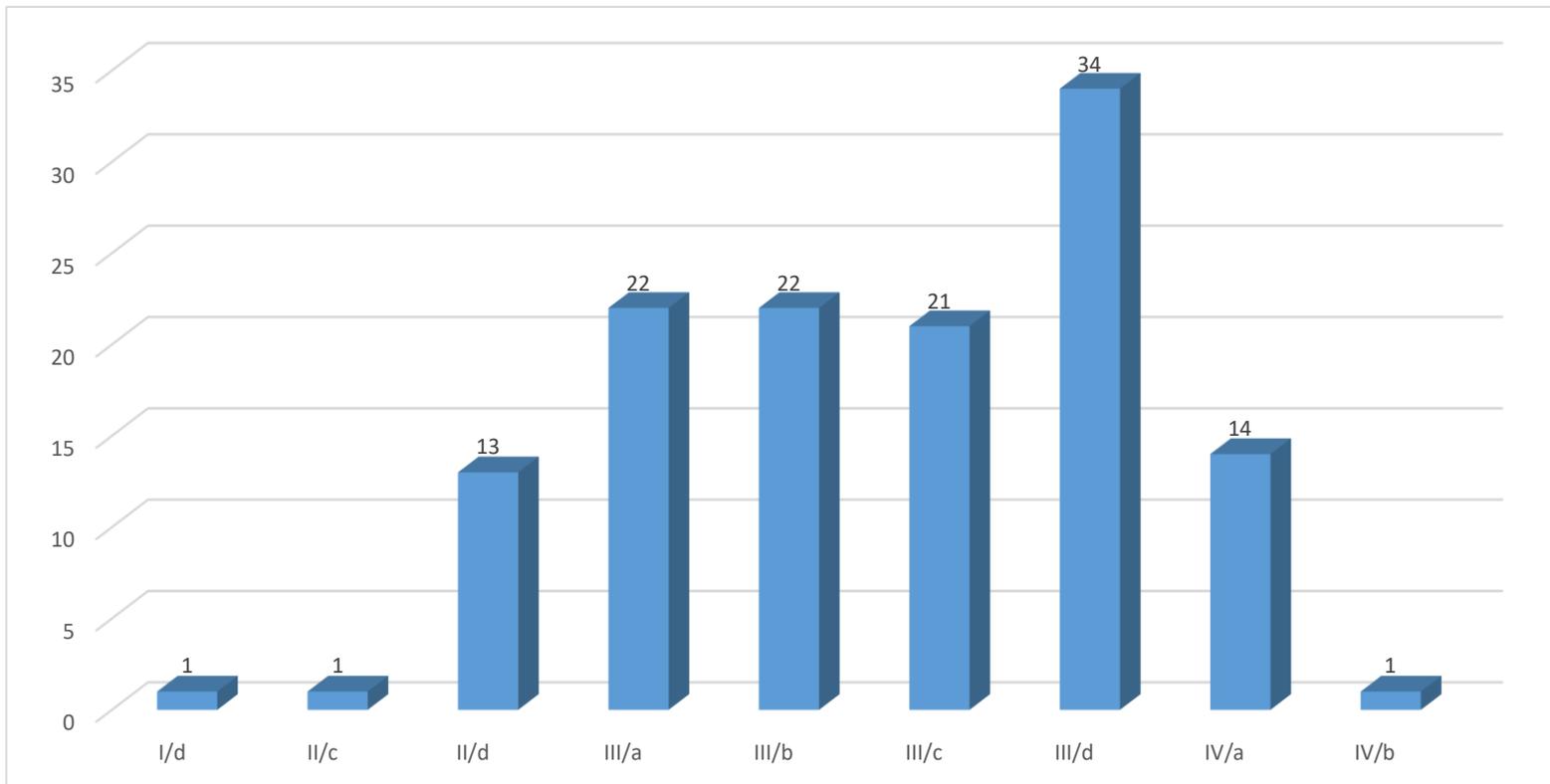
NO	UNIT ORGANISASI	DE KEATAS						SLTA	SMP	SD	TOTAL		
		S2		S1		D3						JUMLAH	
		Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik					Teknik	Non Teknik
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	KEPEGAWAIAN	0	0	0	2	0	2	0	4	2	0	6	
4	UMUM DAN KEUANGAN	0	1	0	3	0	0	0	4	8	0	3	15
5	PENGLOLAAN BMN	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	3
6	SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	0	5
9	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1	0	2	4	0	0	3	4	4	0	0	11
12	SEKSI PRESERVASI	0	0	0	1	1	1	1	2	4	0	0	7
15	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	1	4	0	1	1	5	8	0	0	14
16	PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3
17	PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2
18	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	3	8	0	0	3	9	2	1	0	15
19	PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	2	2	0	0	2	2	9	0	0	13
20	PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	3	3	0	0	3	3	7	0	0	13
21	PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	2	0	0	0	2	6	0	0	8
22	PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	4	0	0	1	4	8	0	0	13
23	PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	2	2	0	0	2	2	3	0	0	7
24	PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	0	1	1	5	0	0	7
25	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	2	5	1	0	3	6	10	0	1	20
26	PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	4	3	0	0	4	3	3	2	0	12
27	PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	4	3	0	0	4	3	7	0	0	14
28	PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	2	5	0	0	2	5	4	0	0	11
29	PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	3	0	1	1	4	6	0	0	11
30	PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	4	0	1	0	5	0	4	0	0	9
Total		1	3	35	58	4	5	40	66	105	3	5	219



Gambar 1.11 Non PNS Berdasarkan Pendidikan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1.11 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

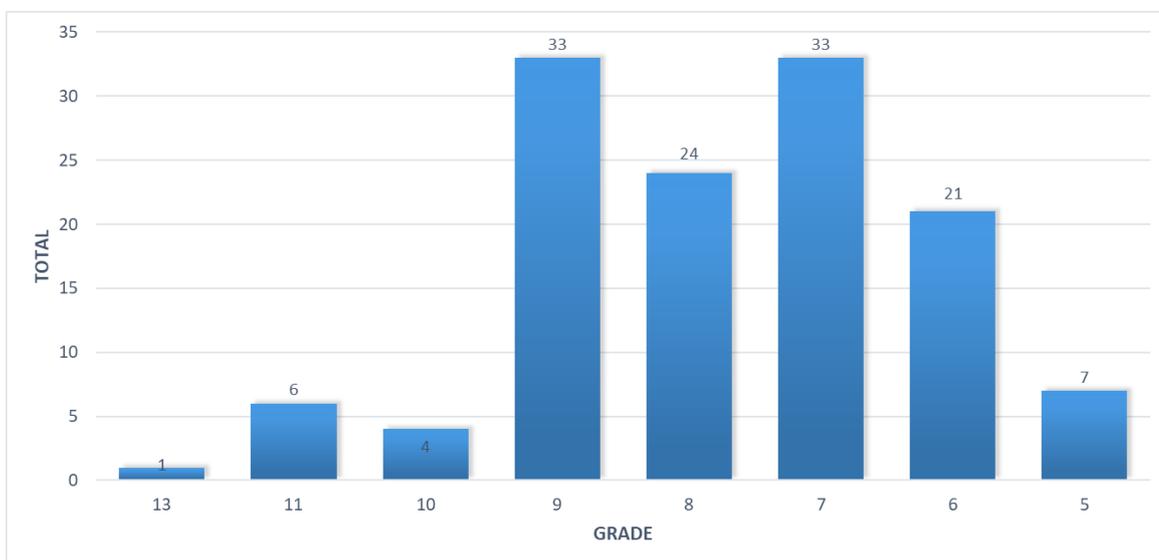
UNIT KERJA	GOLONGAN									TOTAL	
	I/d	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b		
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	TOTAL	
SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
<i>KEPEGAWAIAN</i>	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
<i>UMUM DAN KEUANGAN</i>	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
<i>PENGLOLAAN BMN</i>	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	0	0	1	0	1	1	2	1	0		
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	2	2	0	4	0	0		
SEKSI PRESERVASI	0	0	1	3	0	2	5	2	0		
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0	0	4	2	3	1	0		
<i>PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	0	0	0	1	0	0	2	1	0		
<i>PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	0	0	0	2	2	1	0	0	0		
PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0	2	0	2	3	2	0		
<i>PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	1	0	2	1	0	0		
<i>PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	1	1	2	0	0	0		
<i>PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	1	2	0	0	1	0		
<i>PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0	0	1	1	2	0	0		
<i>PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	2	0	1	1	0	0		
<i>PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1	2	0	1	1	1	0		
PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0	1	3	2	2	1	0		
<i>PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	0	2	0	1	1	0	1	0		
<i>PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	2	0	2	0	1	0	0		
<i>PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0	1	0	0	3	0	0		
<i>PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	1	1	0	0	1	1	1	0		
<i>PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0	3	2	0	2	0	0		
TOTAL	1	1	13	22	22	21	34	14	1		129



Gambar 1.12 PNS Berdasarkan Golongan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tabel 1.12 Rekapitulasi PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

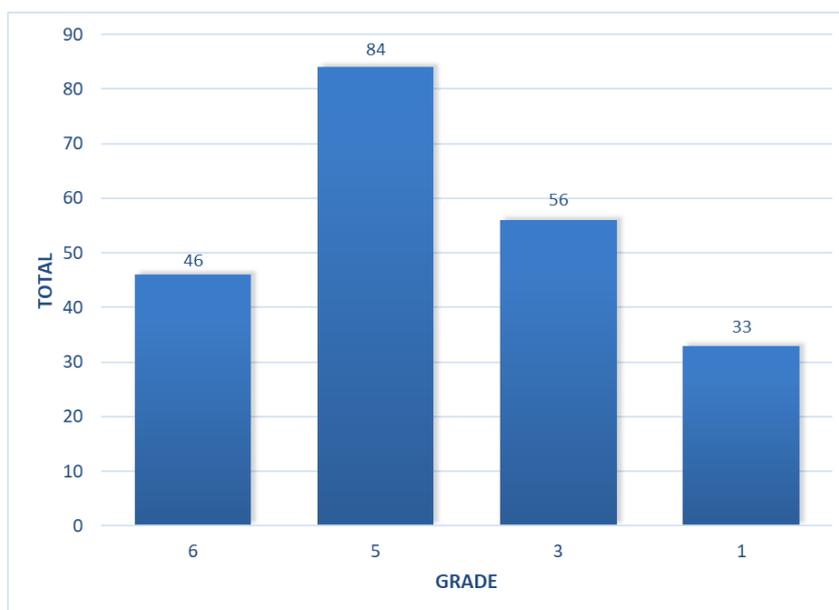
UNIT KERJA	GRADE								TOTAL	
	13	11	10	9	8	7	6	5		
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL
SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
KEPEGAWAIAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
UMUM DAN KEUANGAN	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
PENGELOLAAN BMN	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	0	0	1	2	1	1	1	0	0	
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	0	0	1	2	3	1	1	0	0	
SEKSI PRESERVASI	0	0	0	6	2	2	1	2	0	
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	0	3	2	2	2	0	0	
PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	0	0	1	1	1	0	0	
PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0	1	2	1	1	0	0	
PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	0	2	0	3	0	4	0	0	0	
PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	3	0	0	1	1	0	
PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	1	0	0	1	2	1	0	0	
PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	1	2	0	0	
PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	3	1	0	0	
PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0	3	4	2	0	0	0	
PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	0	2	2	1	0	
PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	1	2	1	0	0	
PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	0	2	1	0	0	
PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	1	0	1	2	1	0	
PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	2	3	1	1	0	0	
TOTAL	1	6	4	33	24	33	21	7	129	



Gambar 1.13 PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1.13 Rekapitulasi Non PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

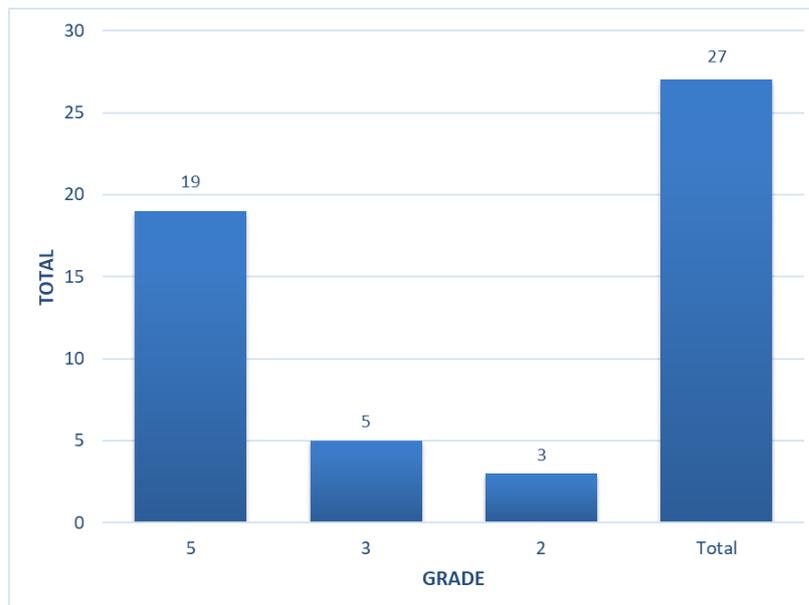
UNIT KERJA	GRADE				TOTAL	
	6	5	3	1		
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	0	0	0	0	TOTAL	
SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	0	0		
<i>KEPEGAWAIAN</i>	4	1	1	0		
<i>UMUM DAN KEUANGAN</i>	3	1	8	3		
<i>PENGLOLAAN BMN</i>	2	0	1	0		
SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	1	1	1	2		
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	4	1	3	3		
SEKSI PRESERVASI	1	2	1	3		
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2	5	6	1		
<i>PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	1	1	1	0		
<i>PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	0	1	1	0		
PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	10	2	2	1		
<i>PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	8	2	1		
<i>PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	8	3	1		
<i>PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	6	0	0		
<i>PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	9	3	0		
<i>PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	4	2	1		
<i>PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	3	1	1		
PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	2	8	4	6		
<i>PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	8	2	1		
<i>PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	3	5	5	1		
<i>PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	3	4	4	0		
<i>PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	2	2	7		
<i>PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	4	3	1		
TOTAL	46	84	56	33		219



Gambar 1.14 Non PNS berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1.14 Rekapitulasi PPPK berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

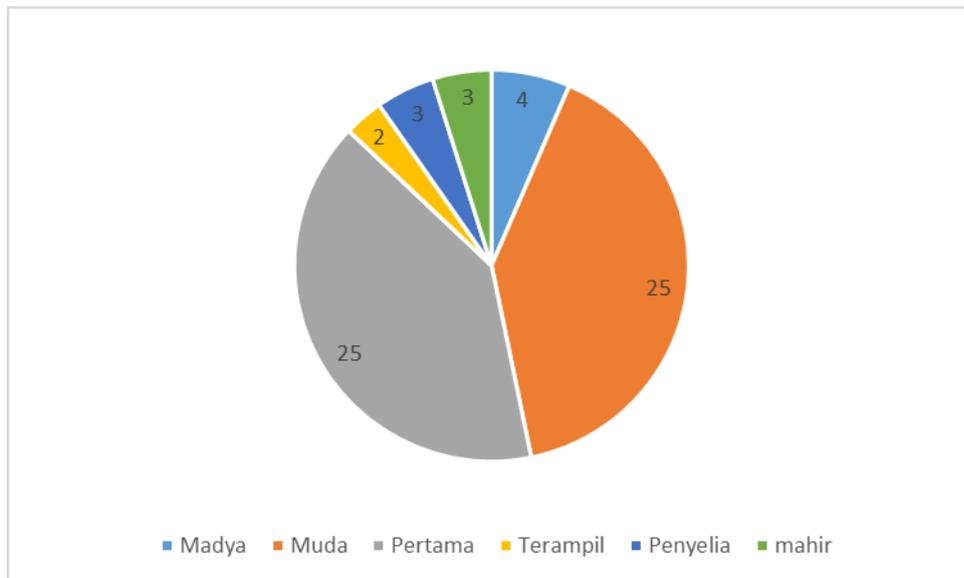
UNIT KERJA	KELAS JABATAN			TOTAL	
	8	6	5		
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	0	0	0		
SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	0		
<i>KEPEGAWAIAN</i>	1	0	0		
<i>UMUM DAN KEUANGAN</i>	0	1	0		
<i>PENGLOLAAN BMN</i>	0	0	0		
SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	3	2	0		
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	4	0	0		
SEKSI PRESERVASI	4	0	0		
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2	0	0		
<i>PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	0	0	0		
<i>PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT</i>	0	0	0		
PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0		
<i>PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
<i>PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
<i>PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	0	1		
<i>PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	1	1		
<i>PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	2	0	0		
<i>PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	1	0		
PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	0	0	0		
<i>PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	1		
<i>PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	1	0	0		
<i>PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
<i>PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
<i>PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)</i>	0	0	0		
TOTAL	19	5	3		27



Gambar 1.15 Non PPPK berdasarkan Grade di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1.15 Rekapitulasi PNS berdasarkan Jabatan Fungsional di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

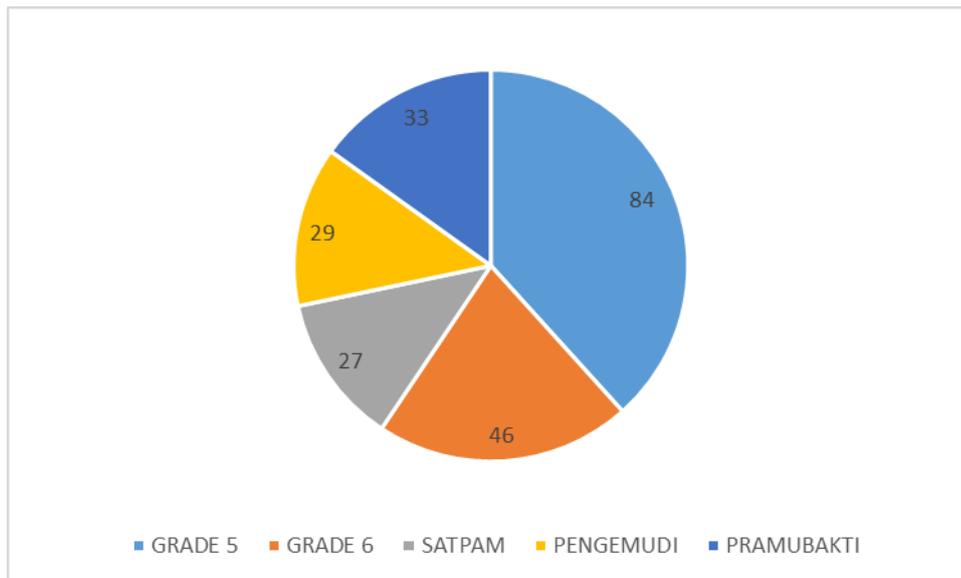
NO	UNIT ORGANISASI	JAFUNG						TOTAL JAFUNG
		Madya	Muda	Pertama	Terampil	Penyelia	mahir	
1	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	0	0	0	0	0	0	0
2	SUB BAGIAN TATA USAHA	0	0	0	0	0	0	0
3	KEPEGAWAIAN	1	0	0	0	0	0	1
4	UMUM DAN KEUANGAN	0	1	0	0	0	0	1
5	PENGLOLAAN BMN	0	0	0	0	0	0	0
6	SEKSI KETERPADUAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	0	2	1	1	0	0	4
9	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	0	2	3	0	0	0	5
12	SEKSI PRESERVASI	0	5	2	0	0	0	7
15	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1	1	3	0	1	0	6
16	PPK PERENCANAAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	1	0	0	0	2
17	PPK PENGAWASAN P2JN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	1	2	0	0	0	3
18	PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	1	2	0	0	1	0	4
19	PPK 1.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	3	0	0	0	0	3
20	PPK 1.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	1	1	0	0	0	2
21	PPK 1.3 (Provinsi Sumatera Barat)	1	0	1	0	0	0	2
22	PPK 1.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	0	0	0	1
23	PPK 1.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	0	0	0	1
24	PPK 1.6 (Provinsi Sumatera Barat)	0	1	1	0	0	1	3
25	PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	0	2	3	0	1	2	8
26	PPK 2.1 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	0	0	0	0	0
27	PPK 2.2 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	1	0	0	2
28	PPK 2.3 (Provinsi Sumatera Barat)	0	0	1	0	0	0	1
29	PPK 2.4 (Provinsi Sumatera Barat)	0	1	0	0	0	0	1
30	PPK 2.5 (Provinsi Sumatera Barat)	0	2	3	0	0	0	5
Total		4	25	25	2	3	3	62



Gambar 1.16 Peta PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Tabel 1.16 Rekapitulasi Non PNS Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

PETA NON PNS DI BPJN SUMATERA BARAT							
SATKER	SUBTANTIF		SATPAM	PENGEMUDI	PRAMUBAKTI	TOTAL	
	GRADE 5	GRADE 6					
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	6	15	8	7	11		219
PJN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT	40	18	6	7	5		
PJN WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT	31	10	9	11	16		
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROVINSI SUMATERA BARAT	7	3	4	4	1		
TOTAL	84	46	27	29	33		



Gambar 1.17 Peta Non PNS Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

1.3.2.2 Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan BPJN Sumatera Barat

Penilaian Kompetensi merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengukur kesenjangan (gap) Kompetensi Pegawai ASN dengan Kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jabatan sesuai standar Kompetensi jabatan. Pelaksanaan penilaian Kompetensi dilakukan untuk memposisikan sumber daya manusia sebagai modal strategis bagi pengembangan organisasi dalam membangun kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kompetensi terdiri atas:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial; dan
- c. Kompetensi Sosial Kultural

Tabel 1.17 Rekapitulasi Identifikasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
1	PEJABAT STRUKTURAL	THABRANI, ST., MT				
		ARIEF SETIAWAN, S.Kom		√		
		YULIA RAHMADANI, ST., MT			√	Diklat PKP, webinar
		WENDRA, ST., MT			√	Diklat PKP, webinar
		SISKA MARTHA SARI, S.T., M.T				
		Ir. RICKY SHUHENDRY, M.Si	√			
		RITA HASNAH, S.Sos., MM			√	
		INDAH PUTRI CAHYANI, ST			√	
		HASDEDI PUTRA, SE			√	
		NURUL SAFIRA DESMAN, A.Md		√		
		RANDI SADE PRIHATNO,S.KOM			√	
		TINTAN KOMALA SARI, ST., MT			√	
		AHMAD AFIFI, ST., MT			√	
		ALDIO WAHYU PRATAMA, ST				
		RAFIKA ALMIRA SAMANTHA AG, ST., M.T			√	
		ARIEF RACHMAN, A.Md			√	
		MUSTAFA KAMAL, ST			√	
		RIAN KAMAL JAYA, ST			√	

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		ENDA LATERISIA BR PINEM, ST., MT	√			Webinar
		YUDHI ANTARIKSA, ST			√	Pelatihan Pemeriksaan AMP
		ARDI ARDILA. A, ST				
		SYUKRI MAI PUTRA, ST			√	- Pengawasan Pekerjaan Konstruksi - Perencanaan Geometrik Jalan
		MIRA ZULENI, ST				
		FARID HARTA, ST				
		DEWI HERAWITA BOER, ST., MT				
		FADILLA MAHZURA, ST., MT			√	Diklat,webinar
		HUSNA FAUZIA , ST., MT		√		Diklat, webinar
		IMELIA YUNITA, ST	√			Webinar
		HAMDANI, ST., MT				
		YOSSI RIZA HIDAYATI, ST			√	- Pemeriksaan Jembatan - Pengadaan Barang dan Jasa
		RIDHO DICOSTA, ST			√	Preservasi Jalan
		SHINDY MEUTHIA, ST			√	
		ARRY SHALLAMON, S.KOM			√	Diklat
		GATRA PURWATMAJA SETYADI, ST			√	
		INGRID HARYANA B, ST			√	
		REFNI R, A.Md				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		TRI INDAH SARI, ST	√			Webinar
		RIDO, ST				
		RAMANDA SYAFITRI, ST			√	Diklat Jafung
		ANNE DEWITA, SE., MM				
		YUDHA PRAWIRA, ST				
		ROLES SINSA PUTRA, ST				
		RONI MARTADINATA, SH				
		YASRUL RAHIM, ST., MT				
		FIRDAUS, ST			√	Diklat dan Webinar
		DEVITHRI HIDAYATI, ST., M.Si				
		SYAHRURAMADHAN PUTRA S, ST				
		RAMA SENJAKA, SE			√	Diklat
		RIKA YULIA CANDRA, A.md			√	Diklat
		YESSI SEPTIANI WARYU, ST			√	Diklat
		ADITIA WARMAN, A.Md.T				
		TEN MAILISA, ST				
		MARA SATU, ST., MT				
		SEPRIADI, AMd.T				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		HARRY MALZ HARPENDI, ST			√	- Pelatihan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan - Pelatihan Pemeriksaan Jembatan - Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1
		YUFRIZAL, ST				
		ZULKARNAINI, S. ST				
		EFRIZON, ST., MT				
		VIVI EDRIANI, S.SI			√	Diklat
		AFRINALDI			√	Diklat
		SEPTI ANITA, ST				
		WIDA PURINDIVA SETIADI, ST				
		GAMMA HADDYOGA DARWIN, ST			√	Diklat
		WALJUPRIANTO			√	Diklat
		ANDIKO PUTRA, ST			√	Diklat
		HERIMANSYAH, ST		√		Diklat dan Webinar
		DAYU AUDIA FUJRI, ST			√	Diklat
		ALVAN QADAR, ST	√			Diklat
		NOFRIALDI, ST		√		

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		AMELIA MELDI R, A.Md			√	- Pelatihan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan
		ESTHIA RATIFOLIA ASRI, SE., M.Si		√		
		HASNAH, S.Sos		√		
		RAMZIL HUDA, A.Md		√		
		VIRGY NOEGRAHA AZHARY, ST		√		
		CICI LESTARI, ST., MT		√		
		PUTRI MERIYEN BUDI, ST			√	Diklat
		AA SELFIA, ST			√	Diklat dan Webinar
		LASTARI			√	Diklat
		ANANG ADI PUJA, A.Md	√			
		INDRA, ST	√			
		SYAFRIZAL, ST				
		KURNIA PUTRI, ST			√	Diklat dan Webinar
		AGA RICKY SYARIEF, SE			√	
		DELVIANTA, ST		√		
		ALWINDRI NURZAF, ST		√		
		MUHAMMAD FAZLI YUSER, S.KOM			√	
3	KASATKER	RENI MARLISA, ST., M.Si				
		MASUDI, ST., M.T.				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		ANDI MULYA RUSLI, ST; MT		√		
4	PPK	GUSMAN, ST				
		ROMI PASLA, ST., MT				
		DERI HARYADI, ST	√			
		M. NASIR NURDIN, ST., M.Si				
		RIO ANDIKA, ST			√	
		NOOR ARIAS SYAMSU, ST; M.Si				
		YAN PURWANDI, ST				
		EFRIWANDI, ST., MT			√	Diklat dan Webinar
		YAMESRI, ST., MENG.SC				
		NAFDI, ST., MT	√			
		ROLLI EKianto, SE., ST., MT				
		NOVA HERIANTO, ST., MT				
		GUSTAF FITRIYADI, ST., MT				
		RAI FRAJA NOFVANDRO, ST.,M.Si		√		
5	PELAKSANA	PNS				
		SUYADI, SE., M.Si		√		
		JOKO MULYADI	√			
		BARCE AWITSON, SE	√			
		SYAFRIAL, ST., MT			√	
		DONNY OSMON, S.AP		√		

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		HANAFI, ST				
		RATNA RAHMA DEWI, S.Kom		√		
		BOFFI ASRIL, S.ST., MT	√			
		ZULWANDI			√	
		RAMLI	√			
		WIDYA SARI, S.Sos., MM				
		FEBY SANDRA, ST., MT				
		ROSNIATI RUSLI, A.Md				
		YENNY LIZA, S.Kom				
		ANNISA RIZQILANA, ST				TB
		ERI SANTOSO				
		DIASTI GUSTINA, SE				
		YESSI GUSMAN, S.Sos., MM				
		DEFRINALDI	√			
		YASSER, ST., MT				
		YUTTIVINAINI INSYAVTHIA, ST				
		MAWARDI, A.Md				
		MITRA RUSTIKA				
		DARMAWAN				
		ALARIANTI, S.Sos				
		ELMADI, ST				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		AFRIEDI			√	
		MASRUL, ST				
		SURITO, A.Md				
		DERMAWAN				
		FERNANDA, S.Sos				
		RICHARD JOEL PARMONANGAN, ST				
		NURHANI HANUM			√	Diklat
		ADRIZAL		√		Diklat
		ROMI SYAHRUDDIN, ST., MT		√		
		YENNI SUSIYANTI, S.Sos, M.Pd., MM			√	Diklat
		IMANUDDIN, A.Md			√	Diklat Brevet
		WHERI KURNIAWAN, ST., MT			√	Diklat
		NURMAN				
		YOVI DEFITA DEWI, A.Md				Diklat
		YUSRI DASMEDRA				
		ASRION				
		FERAWATI, S.Sos		√		
		ERIDERITA, A.Md	√			
		RIKI FITRIADI, S.IP, ST	√			
		ALGIFFAR ANTOS, ST., MT				
		KASMABOTI, SE				

NO	KELOMPOK JABATAN	NAMA	PEMENUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			KETERANGAN
			< 10 JP	10 - 20 JP	> 20 JP	
		SUBRIMEN, ST., MT				
		YUSRIAL, ST, MT				
		ELLYA GUSWANITA, S.Kom., MM		√		
		AFRIZAL	√			
		AGUSMAN	√			
		NOFA FITRIANI		√		
		ADRIZAL		√		

1.3 Sarana dan Prasarana

1.3.1 Sarana dan Prasarana

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat memiliki banyak asset yang dikelola oleh masing–masing satker dengan menggunakan aplikasi **SIMAN (Sistem Manajemen Aset Negara)** dan melakukan proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMN tiap Semester. SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem online maka proses permohonan, persetujuan dan penolakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan BMN dapat dilakukan secara cepat, pengguna barang tinggal mengajukan permohonan atas BMN secara online dan dapat langsung diterima oleh DJKN baik Kantor Pusat, Kantor Wilayah

ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan pelimpahan wewenang yang berlaku. BPJN Sumatera Barat memiliki berbagai asset berupa :

Tabel 1.18 Rekapitulasi Aset di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

No.	Uraian Akun	Nilai (Rp)
1	Tanah	10.408.242.563.718
2	Gedung dan Bangunan	33.327.524.700
3	Jalan dan Jembatan	14.804.712.546.946
4	Peralatan dan Mesin	144.245.684.917
5	Aset Tetap dalam Renovasi	799.777.689.212
6	Aset Tetap Lainnya	5.664.485.500
7	Konstruksi dalam Pengerjaan	665.511.211.413
8	Aset Kemitraan Berupa Tanah Jalan Tol	-
9	Aset Tak berwujud	23.130.532.022
10	Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	540.066.060.495
11	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan Kemasyarakatan	438.488.958.422
12	Persediaan lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	303.905.716.310
11	Aset Lancar Berupa Persediaan	23.814.873.617
TOTAL		28.190.887.847.272

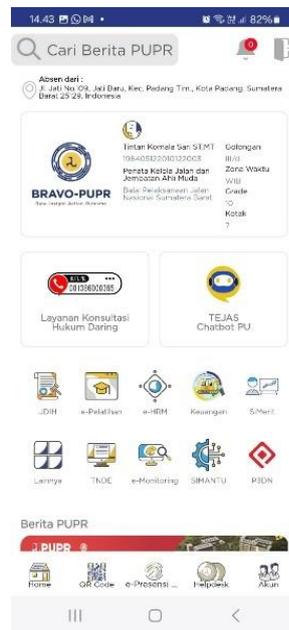
Aset berupa peralatan dan mesin termasuk kendaraan operasional dan peralatan konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang dikuasai BPJN Sumatera Barat relatif kecil jika dibandingkan dengan aset jalan/jembatan yang ada.

1.3.2 Teknologi Informasi

Untuk menunjang kinerja di lingkungan UPT BPJN Sumatera Barat, BPJN Sumatera Barat menggunakan berbagai sistem/teknologi informasi sebagai berikut :

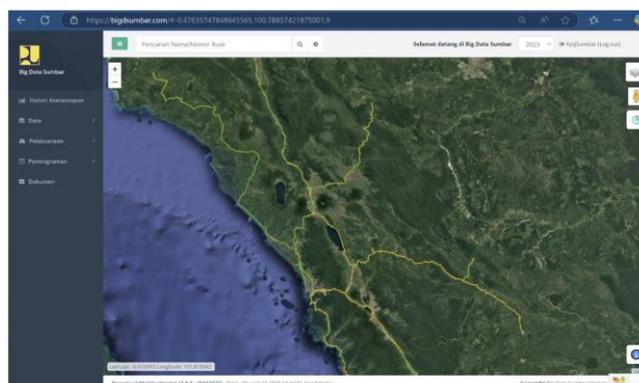
1. Bravo

Sistem yang saling terintegrasi bertujuan memberikan data, informasi dan solusi bagi pegawai di lingkungan PUPR. Aplikasi ini memiliki beberapa layanan seperti Presensi, Kepegawaian, Koperasi, Poliklinik, dan Layanan lainnya



2. Big Data Sumbar

Web bigdsumbar merupakan suatu web yang dapat mempermudah pengguna dalam melihat peta dan data informasi keseluruhan jalan nasional Sumatera Barat termasuk jembatan, lereng, dokumen, gambar, dan lain-lain



3. e- Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(e-SAKIP)

e-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada umumnya.

ID	NAMA KEGIATAN	STATUS	TANGGAL AKHIR
1	04010001	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	28 Februari 2024 15:40:21
2	04010002	DIREKTORAT BINA PROJEKSI JALAN TOL	28 Februari 2024 15:40:24
3	04020001	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PERENCANAAN ALIRAN DAN JERAMBA	19 Maret 2024 15:23:58
4	04030001	DIREKTORAT PROGRAM JALAN	15 Maret 2024 19:25:32
5	04040001	DIREKTORAT PROGRAM JALAN	31 Mei 2024 16:05:26
6	04050001	DIREKTORAT PERENCANAAN ALIRAN DAN JERAMBA VOLUNTA I	29 Februari 2024 16:08:03
7	04060001	DIREKTORAT PERENCANAAN ALIRAN DAN JERAMBA VOLUNTA II	28 Februari 2024 17:41:12
8	04070001	DIREKTORAT JALAN BESAR HANDEAN	18 Mei 2024 11:48:20
9	04080001	DIREKTORAT BINA TERANG JALAN DAN JERAMBA	07 Maret 2024 11:46:35
10	04090001	DIREKTORAT KONTROL LINTAS	28 Februari 2024 16:10:11
SPESIALISASI			
11	04047001	SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT	21 April 2024 12:04:28
12	04052001	SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU	28 Mei 2024 10:08:08
13	04052002	SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU	22 Oktober 2024 11:16:46

4. Elektronik Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (e-SAKTI)

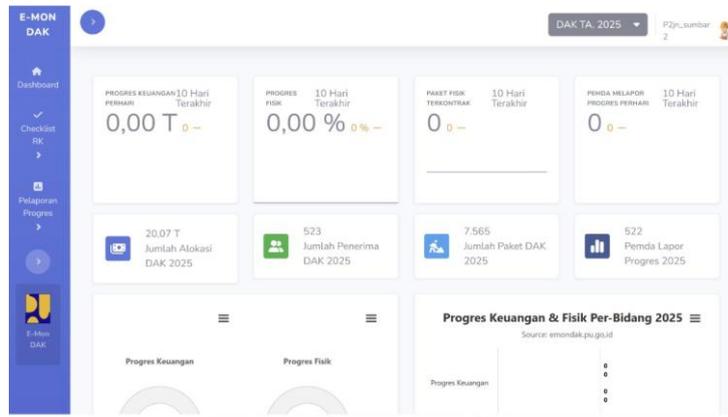
Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran

UNIT	URAIAN	VOL	SAT	HARGA	Jumlah
35010001	Biaya Operasional	33.845.488,000			33.845.488,000
35010002	Biaya Operasional	27.563.493,000			27.563.493,000
35010003	Biaya Operasional	17.941.493,000			17.941.493,000
35010004	Biaya Operasional	11.842.493,000			11.842.493,000
35010005	Biaya Operasional	17.941.493,000			17.941.493,000
35010006	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010007	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010008	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010009	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010010	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010011	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010012	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010013	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010014	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010015	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010016	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010017	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010018	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010019	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000
35010020	Biaya Operasional	4.000.000,000			4.000.000,000

5. e-Monitoring –DAK

Electronic Monitoring Dana Alokasi Khusus adalah aplikasi yang dimiliki kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan DAK Fisik



6. e-Kinerja

Aplikasi e-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aplikasi ini mencakup pengelolaan kehadiran, kinerja, prestasi, dan tunjangan pegawai. E-Kinerja memungkinkan pendataan secara elektronik, mengurangi kebutuhan memasukkan data secara manual. Selain itu, E-Kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau capaian realisasi pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan. Tujuan E-Kinerja adalah tersedianya data kinerja pegawai ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi



7. Informasi Bencana Alam (IBENA)

Aplikasi pelaporan bencana alam secara *real-time* di lingkup Direktorat Jenderal Bina Marga. Dengan adanya aplikasi ini, maka pelaporan dan *update* kondisi di lapangan dapat dilakukan lebih

cepat dan diketahui secara berjenjang. Adapun pelaporan dilakukan oleh masing-masing PPK dan akan dimonitor secara berjenjang oleh Satker, Balai, dan Direktorat Preservasi.

Verifikasi	Nama	Jenis Bencana	Propinsi	Kab/Kota	Balai	Satker
<input checked="" type="checkbox"/>	Banjir Tanah Longor...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	PKK 1.6 - Longor g...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	PKK 2.1 Tanah Long...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	PKK 2.1 Tanah Long...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	PKK 2.1 - Tanah Lon...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	Banjir Longor dan j...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	Pengantian mende...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	PKK 2.5 - Longoran...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	PKK 2.4 - Banjir dan...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	Banjir	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	Banjir Bandang di n...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	PKK 2.3 - Longoran...	---	---	---	---	---
<input checked="" type="checkbox"/>	PKK 2.2 - Batu jatan...	---	---	---	---	---

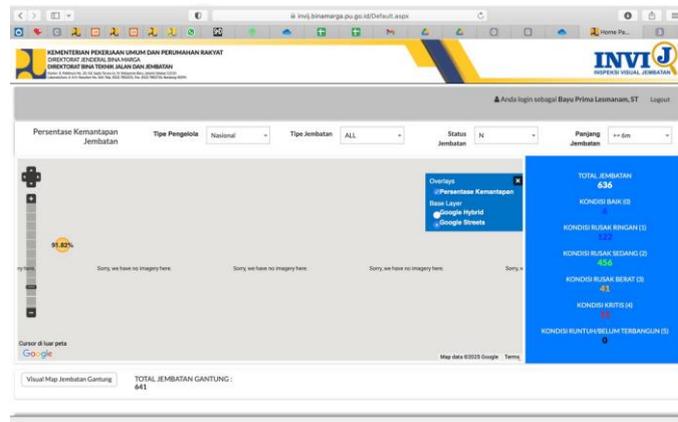
8. Integrated Electronic Monitoring (e-Monitoring)

Merupakan Suatu Sistem Informasi Terintegrasi, baik secara teknologi informasi maupun organisasi yang mempresentasikan bisnis proses anggaran mulai dari pemograman, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi secara elektronik untuk berbagai sumber dana (APBN, SBSN, dan PHLN). Sistem Informasi Terintegrasi dilakukan dengan menghubungkan system perencanaan KRISNA Bappenas, Sistem penganggaran dalam RKA-K/L Sakti Kementerian Keuangan, Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dan SPOSE-LKPP, Sistem Penyerapan anggaran dalam SAKTI Kementerian Keuangan serta Sistem Monitoring Anggaran e- MOnev Bappenas dan SMART DJA Kementerian Keuangan.

The screenshot shows the user interface of the e-Monitoring system. At the top, it displays the user's name and role: "Selamat Siang, Petugas I-eMonitoring Satker BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT". The main content area is divided into two columns. The left column, titled "Pengumuman" (Announcements), contains several news items with dates and brief descriptions, such as "Update i-eMonitoring" and "Buku Rencana Anggaran dan Pelaksanaan 2023". The right column, titled "Berita" (News), features video thumbnails and links related to financial progress reports and administrative updates. A sidebar on the left provides navigation options like "Dashboard", "Progres Komunikasi", and "Progres Satker".

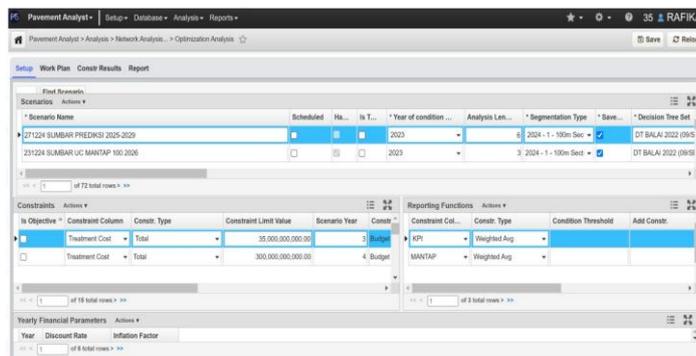
9. Inspeksi Visual Jembatan (Invi J)

Aplikasi yang menjadi bagian sistem manajemen jembatan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR sebagai alat bantu surveyor dalam melakukan inventarisasi data jembatan dan inspeksi jembatan di sepanjang jalan nasional



10. Indonesian Road Management System-Version 3 (IRMS-V3)

Indonesian Road Management System-Version 3 (IRMS-V3) dikembangkan sebagai perangkat pendukung pengambilan keputusan dalam melakukan analisis strategis dan analisis pemrograman dalam penyelenggaraan jalan, khususnya untuk pekerjaan preservasi jaringan jalan nasional



11. INSLOPE

Aplikasi yang menjadi bagian sistem manajemen lereng yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR sebagai alat bantu surveyor dalam melakukan inventarisasi data lereng dan inspeksi lereng di sepanjang jalan nasional



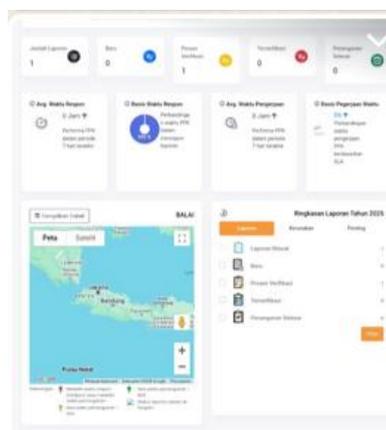
12. INDRAIN

Aplikasi yang menjadi bagian sistem manajemen drainase jalan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR sebagai alat bantu surveyor dalam melakukan inventarisasi data drainase dan inspeksi drainase di sepanjang jalan nasional

#	No. Inspeksi	Tanggal In...	Ruas Jalan	Perugas	Indeks Kem...	STA.	Status
AAH	INS.CC.302408037778	12 Sep 2024	BTS KAB. TANAH DATAR ...	Rian		500 - 200	OK
AAH	INS.CC.302408037963	12 Sep 2024	BTS KOTA PADANG PANJ...	Rian		500-800	OK
AAH	INS.CC.302408037860	12 Sep 2024	BTS KOTA PADANG PANJ...	Rian		500 - 800	OK
AAH	INS.CC.302408037706	22 Jul 2024	BTS KAB. TANAH DATAR ...	Phoen syamir		0+000 s.d.	OK
AAH	INS.CC.302408037702	22 Jul 2024	BTS KAB. TANAH DATAR ...	Phoen syamir		0+000 s.d.	OK
AAH	INS.CC.302408038698	22 Jul 2024	BTS KAB. TANAH DATAR ...	Phoen syamir		0+000 s.d.	OK
AAH	INS.CC.302408038687	21 Jul 2024	BTS KAB. TANAH DATAR ...	Phoen syamir		0+000 s.d.	OK
AAH	INS.CC.302408038683	21 Jul 2024	BTS KAB. TANAH DATAR ...	Phoen syamir		0+000 s.d.	OK

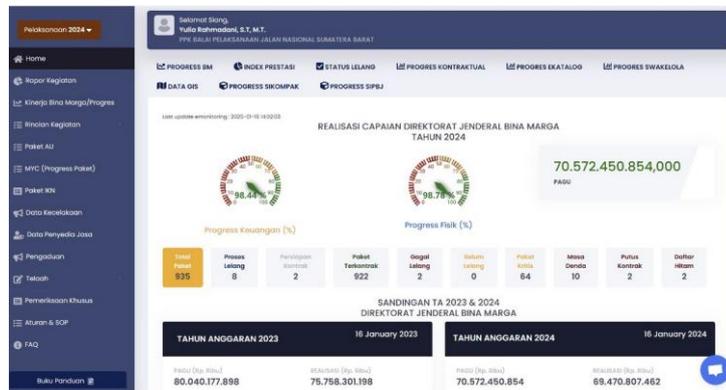
13. Jalan Kita (JAKI)

Aplikasi Jaki (Jalan Kita) adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat melaporkan kerusakan yang terjadi di jalan-jalan nasional Laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh team PUPR



14. Kepatuhan Intern Bina Marga (KI-BIMA)

Aplikasi ini digunakan untuk memantau kinerja pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.



16. Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP)

SIPP adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.



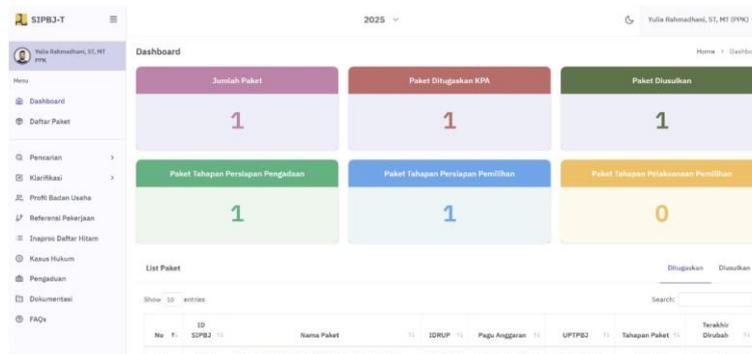
17. Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK)

SIKOMPAK merupakan sistem informasi yang dapat digunakan dalam penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kontrak yang dilakukan secara realtime dan berbasis elektronik.

No	ID/REP	Nama Paket	TA	Penyedia	Status	Aksi
1	3030229	BAHTEK BPJN SUNBAR	2022	PT Sarewa Nuri Deyi	0% (0/0)	Aktif
2	3030608	(SURVEI) INSPEKSI KONDISI JALAN JARANGAN JALAN BPJN SUNBAR	2022	PT. GITA CIPTA BAGARASA	0% (0/0)	Aktif
3	3027037	INSPEKSI (SURVEI) DATA KONDISI JALAN JARANGAN JALAN BPJN SUNBAR	2023	PT. GITA CIPTA BAGARASA	0% (0/0)	Aktif
4	4028023	BAHTEK BPJN SUNBAR	2024	PT. SECOND KSD PT. ANA JISA RESKATAMA & PT. KARMA LITAMA GTRAMANDIRI	0% (0/0)	Aktif
5	4014801	BAHTEK BPJN SUNBAR	2023	PT. DAKSINAWATI KANSA KONSULTINDO	0% (0/0)	Aktif
6	4028071	INSPEKSI (SURVEI) DATA KONDISI JALAN JARANGAN JALAN BPJN SUNBAR	2024	PT. GITA CIPTA BAGARASA	0% (0/0)	Aktif

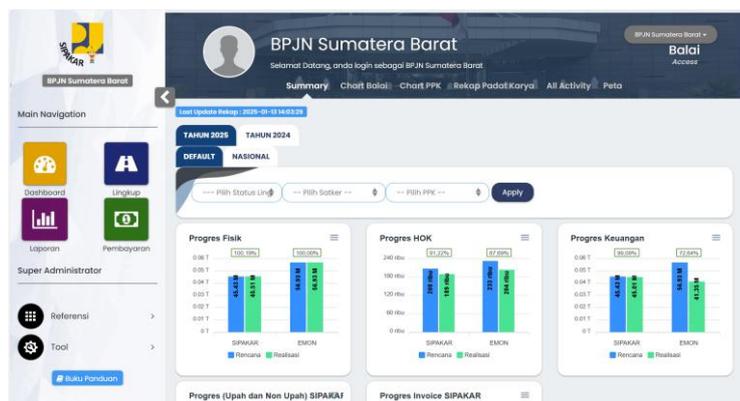
18. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ)

SIPBJ adalah sistem yang dirancang untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mengelola seluruh siklus pengadaan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.



19. Sistem Informasi Padat Karya (SIPAKAR)

Aplikasi Sistem Informasi Padat Karya (Sipakar) merupakan alat pengolahan data informasi padat karya di Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga data dan informasi pelaksanaan padat karya lebih akurat, aktual, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah kesulitan pada pelaksanaan pemantauan dalam pemenuhan layanan indikator kinerja, kesulitan di dalam memperoleh data dan informasi pelaksanaan program padat karya secara akurat, aktual, transparan, dan akuntabel, kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal, penyedia jasa tidak dapat mencapai target jumlah pekerja per hari (HOK), penyedia jasa belum memiliki sistem pelaporan yang seragam sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan pimpinan, pelaporan kemajuan fisik serta keuangan yang dilakukan setiap hari



20. Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasikan (SIPASTI)

Aplikasi SIPASTI memberikan informasi *database* sebagai salah satu referensi (Harga Satuan Dasar (HSD), Harga Satuan

Pekerjaan (HSP), dan harga satuan wilayah), menyediakan sistem perhitungan penyusunan HPS, sistem pembahasan, penetapan, dan reuiu HPS.

Screenshot of the SIPASTI web application dashboard. The main content area displays a table titled "Proses Penyusunan HPS PPK" (HPS Package Preparation Process) with columns for "No", "Unor", "Jumlah Paket PUPR di SIPASTI", "Proses Penyusunan HPS oleh PPK", "Proses Pembahasan Unor", "Penetapan HPS oleh PPK", "Reuiu HPS di BPZJK", and "HPS Selesai". The table lists data for five regions: PUPR, SDA, BM, CK, and PERUMAHAN.

No	Unor	Jumlah Paket PUPR di SIPASTI	Proses Penyusunan HPS oleh PPK	Proses Pembahasan Unor	Penetapan HPS oleh PPK	Reuiu HPS di BPZJK	HPS Selesai						
1	PUPR	973	100%	660	67.8%	64	6.6%	36	3.7%	75	7.7%	138	14.2%
2	SDA	262	26.9%	174	66.4%	20	7.6%	6	2.3%	25	9.5%	37	14.1%
3	BM	448	46%	322	71.9%	34	7.6%	22	4.9%	1	0.2%	69	15.4%
4	CK	183	18.0%	138	75.4%	7	3.8%	8	4.4%	10	5.5%	20	10.9%
5	PERUMAHAN	80	8.2%	26	32.5%	3	3.8%	0	0%	39	48.8%	12	15%

21. Sistem Masukan Data

Aplikasi yang menghimpun data -data survey tahunan terdiri dari IRI, PCI, FWD, RNI dan Data Lalu lintas.



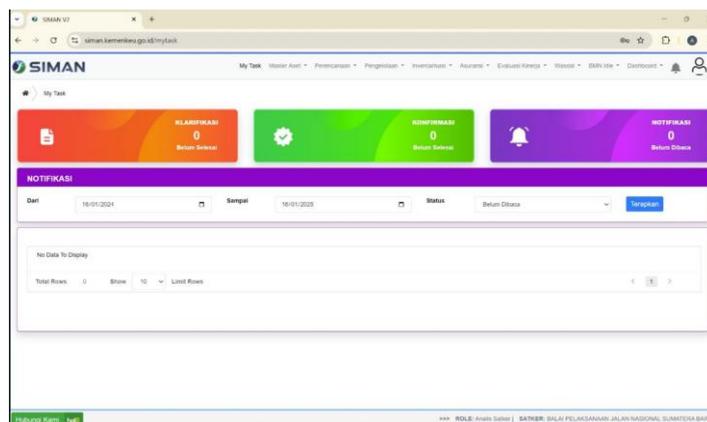
22. Sistem Informasi Pelaksanaan Jalan Daerah (SIPDJD)

Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan jalan dan jembatan daerah. Aplikasi ini dapat diakses secara online oleh pengguna terdaftar untuk mengunggah dan melihat data jalan propinsi, kabupaten, dan kota



23. Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN)

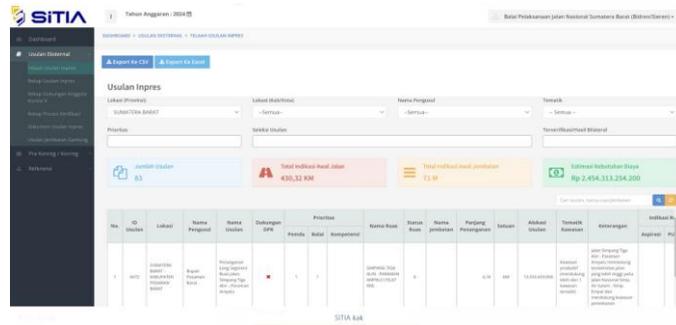
aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem online maka proses permohonan, persetujuan dan penolakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan BMN dapat dilakukan secara cepat, pengguna barang tinggal mengajukan permohonan atas BMN secara online dan dapat langsung diterima oleh DJKN baik Kantor Pusat, Kantor Wilayah ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan pelimpahan wewenang yang berlaku



24. Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SITIA)

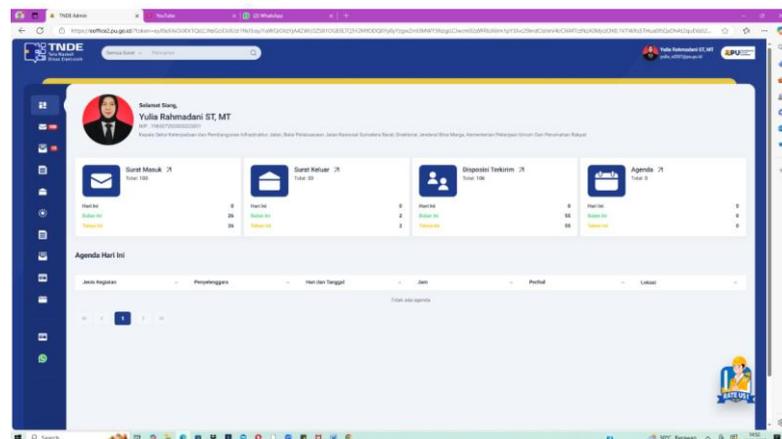
Aplikasi SiTIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel) dirancang untuk mengintegrasikan sistem penyusunan program, mencatat usulan anggota dewan secara terpusat, dan mencatat

histori penyusunan program untuk memudahkan monitoring progres proyek dan meningkatkan akuntabilitas.



25. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

TNDE adalah aplikasi berbasis web dan android yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan pencarian arsip surat. Persuratan melalui aplikasi TNDE memiliki kelebihan dibandingkan persuratan secara manual atau fisik.



1.4 Isu Strategis

1.5.1 Kondisi Umum Wilayah



Gambar 1.18 Peta Prov. Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' LU dan 3°30' LS serta 98°36' BT dan 101°53' BT dan dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat/ garis ekuator). Luas daratan Provinsi diperkirakan ±186.580 km². Luas perairan teritorial adalah 57.880 km² dan 12.870 km² perairan ZEE serta panjang garis pantai 2.420.388 km. Adapun batas wilayah Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten atau Kota (12 Kabupaten, 7 Kota, 147 Kecamatan, 877 Kelurahan atau Desa). Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayahnya mencapai 601.135 Ha, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan wilayah terkecil yaitu dengan luas wilayah 2.300 Ha.



Gambar 1.19 Pesona kawasan wisata Lembah Harau Payakumbuh

Iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C. Provinsi ini juga dilalui oleh Garis Khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatera seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri, (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau dan Batang Tarusan.

Selain itu, terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan Gunung Kerinci di kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m. Tidak hanya Gunung Kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Merapi, Gunung Tandikat dan Gunung Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar dengan luas mencapai 130,1 km². disusul Maninjau di kabupaten Agam. Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan dari Danau Diatas dan Danau Dibawah).



Gambar 1.20 Pesona Keindahan Kelok 9

Walaupun Sumatera Barat merupakan provinsi yang penuh dengan alam dan panorama yang indah, namun provinsi ini termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan daerah rawan gempa. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia, sehingga wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat yaitu gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010. Walaupun Sumatera Barat merupakan provinsi yang

penuh dengan alam dan panorama yang indah, namun provinsi ini termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan daerah rawan gempa. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo- Australia, sehingga wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat yaitu gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010. (Sumber: www.wikipedia.com dan www.sumbarprov.go.id)



Gambar 1.21 Pesona Keindahan Pulau Mandeh



Gambar 1.22 Kelok 44 , Kab. Agam yang merupakan rute wajib Tour de Singkarak



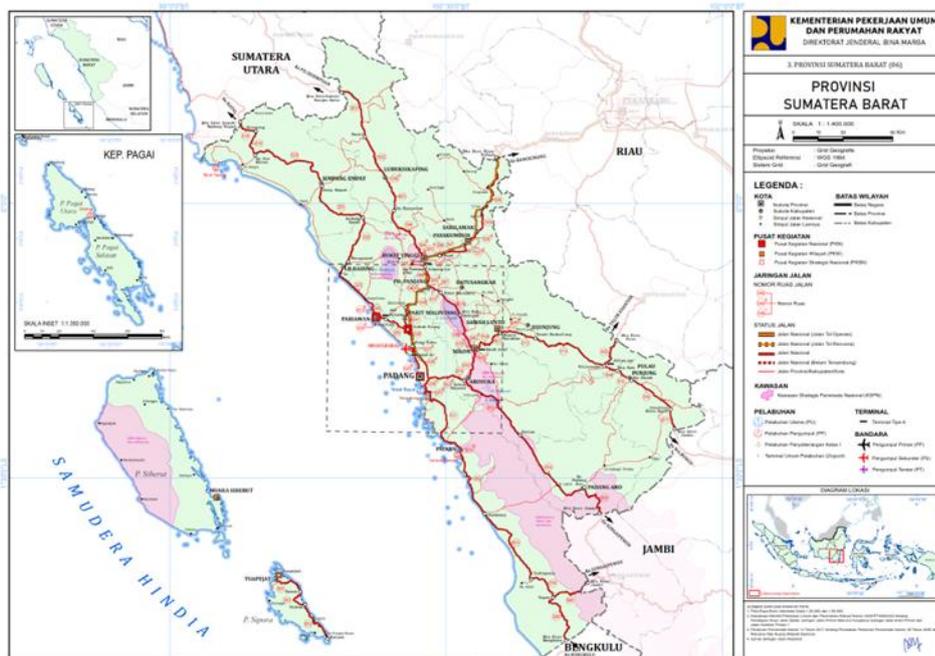
Gambar 1.23 Pesona Wisata dan Sejarah Tambang Batu Bara Ombilin, Kota Sawahlunto



Gambar 1.24 Kawasan Seribu Rumah Gadang , Kab Solok Selatan, Provinsi Sumbar

1.5.2 Kondisi Infrastruktur BPJN Sumatera Barat

Kemantapan Jalan yang dilakukan pada kegiatan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan pada Semester II menunjukkan 91,55 % dan tidak mantap 8,45 % dari total 86 ruas jalan nasional dengan total panjang jalan 1.423,42 Km. Kemantapan jembatan berdasarkan kategori kondisi jembatan semester II menunjukkan kondisi mantap 90,96 (593 jembatan) dari total 636 jembatan yang berada pada jalan nasional di provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1.25 Peta Lokasi Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat

Ruas PPK 1.1. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.19 Ruas PPK 1.1. Provinsi Sumatera Barat

06006	SP. PADANG LUAR - SP. TIGA KOMARULLAH
0600611	JLN. PROF. HAMKA (PADANG PANJANG)
0600612	JLN. M. DAUD RASIDI (PADANG PANJANG)
0600613	JLN. KOMARULLAH (PADANG PANJANG)
06007	BTS. KOTA PADANG PANJANG - KUBU KERAMBIL
0600711	JLN. HAMKA - BUKIT KANDUNG
0600713	JLN. PASAR TERNAK GANTING
0600714	JLN. BKIA - SOLOK BATUNG
0600715	JLN. SOLOK BATUNG - KACANG KAYU
06008	KUBU KERAMBIL - BTS. KAB. TANAH DATAR
06009	BTS. KAB. TANAH DATAR - BTS. KOTA SOLOK
06026	LUBUK ALUNG - SP. DUKU
06040	BTS. KOTA PADANG PANJANG - SICINCIN
0604011	JLN. ST. SYAHRIR (PADANG PANJANG)
06041	SICINCIN - LUBUK ALUNG

Ruas PPK 1.2. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.20 Ruas PPK 1.2. Provinsi Sumatera Barat

06036	BTS. PROV. RIAU - BTS. KOTA PAYAKUMBUH
0603611	JLN. SUDIRMAN (PAYAKUMBUH)
06037	BTS. KOTA PAYAKUMBUH - BASO
0603711	JLN. SOEKARNO HATTA (PAYAKUMBUH)
0603712	JLN. DIPONEGORO (PAYAKUMBUH)
0603713	JLN. K.H. AHMAD DAHLAN (PAYAKUMBUH)
06056	KELOK 9 (trase lama)

Ruas PPK 1.3. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.21 Ruas PPK 1.3. Provinsi Sumatera Barat

06001	RANJAU BATU (BTS. PROV. SUMUT) - PANTI
06002	PANTI - BTS. KOTA LUBUK SIKAPING
0600211	LUBUK SIKAPING BYPASS
06003	BTS. KOTA LUBUK SIKAPING - SP. KUMPULAN
06004	SP. KUMPULAN - SP. TAMAN

Ruas PPK 1.4. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.22 Ruas PPK 1.4. Provinsi Sumatera Barat

06018	BEDENG RAPAT (BTS. PROV. SUMUT) - SILAPING
06019	SILAPING - SP. AIR BALAM
06020	SP. AIR BALAM - SP. EMPAT
06021	SP. EMPAT - PADANG SAWAH

Ruas PPK 1.5. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.23 Ruas PPK 1.5. Provinsi Sumatera Barat

06022	PADANG SAWAH - MANGGOPOH
06023	MANGGOPOH - BTS. KOTA PARIAMAN
0602314	JLN. SITI MANGGOPOH (PARIAMAN)
0602414	JLN. ZAINI (PARIAMAN)
0602415	JLN. AHMAD DAHLAN (PARIAMAN)
0602416	JLN. SOEKARNO - HATTA (PARIAMAN)
06025	KURAITAJI - LUBUK ALUNG
06048	BYPASS PARIAMAN (KOTA PARIAMAN)

Ruas PPK 1.6. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.24 Ruas PPK 1.6. Provinsi Sumatera Barat

06050	TUAPEJAT - ROKOT
06051	ROKOT - SIOBAN
06052	SIOBAN - KATIET

Ruas PPK 2.1. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.25 Ruas PPK 2.1. Provinsi Sumatera Barat

0600911	JLN. IMAM BONJOL (SOLOK)
0600912	JLN. KH. DEWANTORO (SOLOK)
0600913	JLN. A. YANI (SOLOK)
0600914	JLN. DIPONEGORO (SOLOK)
06010	BTS. KOTA SOLOK - BTS. KOTA SAWAHLUNTO
06011	BTS. KOTA SAWAHLUNTO - MUARA KALABAN
0602811	PADANG BYPASS II (BARU)
0602911	PADANG BYPASS I
06042	BTS. KOTA SOLOK - LUBUK SELASIH
0604211	JLN. LUBUK SIKARAH (SOLOK)
0604212	JLN. HAMKA (SOLOK)
06043	LUBUK SELASIH - BTS. KOTA PADANG
0604311	BTS. KOTA PADANG - SP. LUBUK BEGALUNG
0604412	JLN. SAWAHLUNTO - MUARA KALABAN (SAWAHLUNTO)
0604711	SOLOK BYPASS (JL. NASIR PAMUNCAK)

Ruas PPK 2.2. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.26 Ruas PPK 2.2. Provinsi Sumatera Barat

06012	MUARA KALABAN - TANAH BADANTUNG
06013	TANAH BADANTUNG - KILIRANJAO
06014	KILIRANJAO - BTS. KAB. DHARMASRAYA
06015	BTS. KAB. DHARMASRAYA - SEI DAREH
06016	SEI DAREH - JUNCTION (KOTO BARU)
06017	JUNCTION (KOTO BARU) - BTS. PROV. JAMBI
06045	KILIRANJAO - BTS. PROV. RIAU

Ruas PPK 2.3. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.27 Ruas PPK 2.3. Provinsi Sumatera Barat

06031	BTS. KOTA PADANG - BTS. KOTA PAINAN
0603111	JLN. BUKIT PUTUS - BTS. KOTA PADANG (PADANG)
0603112	JLN. ILYAS YAKUB (PAINAN)
0603113	JLN. SUTAN SYAHRIR (PAINAN)
06032	BTS. KOTA PAINAN - KAMBANG

Ruas PPK 2.4. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.28 Ruas PPK 2.4. Provinsi Sumatera Barat

06033	KAMBANG - INDRAPURA
06034	INDRAPURA - TAPAN
06035	TAPAN - BTS. PROV. BENGKULU
06049	TAPAN - BTS. JAMBI

Ruas PPK 2.5. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.29 Ruas PPK 2.5. Provinsi Sumatera Barat

06053	LUBUK SELASIH - SURIAN
06054	SURIAN - SP. PADANG ARO
06055	SP. PADANG ARO - BTS. JAMBI

Ruas PPK SKPD. S01 Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.30 Ruas PPK SKPD. S01 Provinsi Sumatera Barat

0600411	BUKITTINGGI BYPASS I (SP. TAMAN - SP. BYPASS ANAK AIR)
06005	SP. JAMBU AIR - SP. PADANG LUAR
0600511	BUKITTINGGI BYPASS II (SP. TALUK - SP. BYPASS ANAK AIR)
0600513	SP. AUR KUNING - SP. TALUK
0600514	SP. TALUK - SP. JAMBU AIR
0602611	JLN. ADINEGORO (PADANG)
0602612	JLN. PROF. DR. HAMKA (PADANG)
0602711	BANDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU (BIM) - SP. DUKU
06038	BASO - BTS. KOTA BUKITTINGGI
0603811	JLN. SOEKARNO HATTA (BUKITTINGGI)

1.5.3 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh UPT BPJN Sumatera Barat

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada UPT BPJN Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- Bencana Alam
- Cuaca ekstrim
- Kekurangan Sumber Daya Manusia terutama Tenaga Teknis sehingga beban kerja pegawai melebihi kapasitas (beberapa pekerjaan dirangkap oleh petugas yang sama)

- Beberapa proses penarikan/realisasi anggaran harus menunggu revisi DIPA karena adanya pagu minus di detail akun sehingga penginputan pada esakti sedikit terkendala
- Masalah SDM pada penyedia jasa
- Masalah finansial pada penyedia jasa (*cash flow*).
- Pengadaan material yang sering terlambat di lapangan

1.4.1 Isu Strategis

1. Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi Bunga Tanjung–Teluk Tapang
Untuk mendukung lancarnya akses arus barang melalui Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 34 km.
2. Pembangunan Jalan Alih Trase Akibat Abrasi di Pulau Sipora (Kep. Mentawai)
3. Pembangunan Fly Over Panorama I Sitinjau Lauik di Kota Padang
4. Pembangunan Fly Over Duku BIM di Kabupaten Padang Pariaman
5. Pembangunan Fly Over Tabing dan Lubuk Buaya di Kota Padang
6. Mendukung Pembangunan Jembatan Gantung Bagi Pejalan Kaki di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
7. Mendukung pembangunan jalan daerah

3.2. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada Bab I "Pendahuluan" yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi BPJN Sumatera Barat sebagai berikut...

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra BPJN Sumatera Barat 2020-2024, PK BPJN Sumatera Barat 2024, dan target 2024 menurut renstra.

Bab III Kapasitas Organisasi

Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis serta realisasi anggaran BPJN Sumatera Barat 2024, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja penghargaan dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Rencana Aksi Kinerja Per Program 2024, Perjanjian Kinerja 2024, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Daftar Pertanyaan Kuesioner Pemanfaatan LAKIP, Daftar Penghargaan yang diperoleh, Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur BPJN Sumatera Barat, dan Sertifikat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024.

2.1 Uraian Singkat Renstra

Tujuan RENSTRA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat adalah sebagai pendukung tujuan RENSTRA Bina Marga yang merupakan juga merupakan pendukung dari tujuan RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Semua ini untuk mendukung tujuan RPJMN dan dapat dijabarkan visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020).

2.1.1. Visi, Misi,

Visi pembangunan nasional yang termuat di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) sesuai dengan visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indonesia Mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
- 2) Indonesia Maju adalah bangsa yang memiliki kualitas sumberdaya manusia tinggi, dan tingkat perekonomian baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk kemantapan hukum;
- 3) Indonesian Adil dan Makmur adalah bangsa yang memberikan kesempatan secara merata kepada seluruh rakyatnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

- 4) Persatuan Indonesia dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional 2020-2024 tersebut, akan ditempuh melalui 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden (yang sering disebut sebagai Nawacita, yang diadopsi menjadi misi pembangunan nasional 2020-2024 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)) sebagai berikut:

- 1 ***Peningkatan kualitas manusia Indonesia***
- 2 ***Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.***
- 3 ***Pembangunan yang merata dan berkeadilan.***
- 4 ***Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.***
- 5 ***Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.***
- 6 ***Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.***
- 7 ***Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.***
- 8 ***Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.***
- 9 ***Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.***

Selanjutnya, Presiden memberikan menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, dimana:



“ Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. ”

Adapun kelima arahan utama Presiden untuk pembangunan nasional 2020-2024 tersebut didetailkan pada **Tabel 2.1** berikut ini:

Tabel 2.1 Lima (5) Arahan Utama Presiden sebagai Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024

No	Bidang	Arahan Presiden
1	Pembangunan SDM	Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2	Pembangunan Infrastruktur	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3	Penyederhanaan Regulasi	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4	Penyederhanaan Birokrasi	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5	Transformasi Ekonomi	Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: Lampiran I Narasi RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)

Pelaksanaan visi, misi, serta arahan Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 tersebut pada Bagian 2.1.1 diatas, dilakukan melalui 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 (atau sering disebut sebagai Prioritas Nasional (PN)), sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayan Publik.

Secara lebih spesifik sektor transportasi (jalan) masuk ke dalam agenda pembangunan nasional ke-5, yakni PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Kerangka nasional pembangunan infrastruktur nasional 2020-2024 disampaikan pada Gambar 2.1. Secara umum, pembangunan infrastruktur nasional di Tahun 2020-2024 diarahkan pada 3 fokus, yakni: (1) pemenuhan kebutuhan infrastruktur sebagai pelayanan dasar, (2) penyediaan infrastruktur sebagai pendukung ekonomi (baik dalam penyediaan konektivitas bagi daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (3TP); maupun untuk mendukung sektor ekonomi utama (khususnya: industri, jasa dan pariwisata, serta pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan), dan (3) penyediaan infrastruktur bagi wilayah perkotaan.

Lebih detail, PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, memiliki 5 Program Prioritas (PP), yakni: PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP2. Infrastruktur Ekonomi, PP3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan, PP4. Energi dan Ketenagalistrikan, dan PP5. Transformasi Digital. Untuk setiap PP tersebut terdapat sejumlah Kegiatan Prioritas (KP) sebagai implementasinya.

2.1.1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian PUPR 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan juga visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Kementerian PUPR berdasarkan Dokumen Renstra Kementerian PUPR.

Visi Kementerian PUPR

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Misi Kementerian PUPR

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian PUPR

Adapun tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian PUPR selama periode perencanaan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang parstisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
6. Peningkatan infratraktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Sasaran Kementerian PUPR

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers,

perspektif internal process dan perspektif learning and growth. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (strategy map) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.3.

2.1.1.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.

Visi penyelenggaraan jalan nasional 2020-2024 adalah sebagai berikut:

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA VISI DAN MISI PRESIDEN YAKNI: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Berikut penjelasan mengenai Visi tersebut:

1. Andal adalah mengupayakan kemampuan organisasi untuk dapat menjadi tumpuan bagi pelaksanaan pembangunan pada bidang yang menjadi tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Profesional adalah mengutamakan pelaksanaan tugas berdasarkan kepada keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Inovatif adalah mengupayakan untuk selalu memperbarui kemampuan organisasi untuk dapat menjawab tantangan tugas dan fungsi sesuai dengan perkembangan jaman;
4. Berintegritas adalah mengutamakan pelaksanaan budaya kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,

kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya, dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka dirumuskan 2 misi utama yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga pada periode 2020-2024, yakni:

M.1 Meningkatkan KONEKTIVITAS dan PELAYANAN Jalan Nasional;

M.2 Meningkatkan EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN Jalan Nasional;

Misi 1 (M.1) merupakan misi eksternal (yang menjadi *public concern*) berkaitan dengan komitmen Ditjen Bina Marga dalam menyediakan konektivitas dan pelayanan jalan nasional. Konektivitas merupakan mandat dari Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 yang melalui RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional melalui indikator waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau menjadi minimal 1,9 jam per 100 km. Sedangkan pelayanan jalan merupakan pelaksanaan dari mandat pasal 37 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi: aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan.

Adapun M.2 merupakan misi internal (yang menjadi *institution concern*) berkaitan dengan upaya dari Ditjen Bina Marga untuk meningkatkan kemampuannya (secara andal, profesional, inovatif, dan berintegritas) dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan nasional secara efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan Permen PUPR 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, bidang penyelenggaraan jalan merupakan tugas dari Ditjen Bina Marga. Lebih lanjut, sesuai dengan pasal 1 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan cakupan kegiatan penyelenggaraan jalan meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

2.1.1.3. Visi dan Misi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

VISI Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

Tersedianya Jaringan Jalan Nasional yang handal, terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social

MISI Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

- Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi penanganan Jalan Nasional.
- Mengembangkan SDM yang profesional dan tanggap untuk mendukung penanganan Jalan Nasional.
- Mendorong partisipasi pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam penanganan Jalan Nasional, maupun dalam pemanfaatannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang No. 02 tahun 2022 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan dan sasaran Ditjen Bina Marga periode 2020-2024 secara terstruktur dirumuskan dalam peta strategi (*strategy map*) mengikuti konsep *Balanced Scorecard* (BSC), dan dikelompokkan ke dalam 4 perspektif, yakni:

1. *Stakeholder perspectives* (SP), mewakili perspektif kepentingan rakyat Indonesia, yang memandatkan pelaksanaan pemerintahan (termasuk penyelenggaraan jalan) untuk periode 2020-2024 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih (berikut dengan jajaran Kabinetnya).
2. *Customer perspectives* (SP), mewakili perspektif kepentingan pengguna (*customer*) jalan yang dilindungi haknya untuk mendapatkan layanan jalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. *Internal Business Perspectives* (SP), mewakili perspektif internal Ditjen Bina Marga untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jalan (pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan) dengan sebaik-baiknya, secara efektif dan efisien sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Learning and growth perspectives* (SP), mewakili perspektif Ditjen Bina Marga dalam menyediakan sumber daya (SDM, keuangan, kelembagaan, sarana prasarana serta informasi pendukung) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembankan.

Oleh karena itu, tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020-2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut:

T.1 Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;

T.2 Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;

T.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional;

T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

Masing-masing tujuan Ditjen Bina Marga tersebut di atas, mewakili setiap perspektif dalam *Balanced Scorecard* (BSC), yakni:

1. Tujuan pertama (T.1) mewakili tujuan dari *stakeholders perspectives* (pemberi mandat) yang dalam periode RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional (tertuang sebagai KP.1 Konektivitas Jalan dalam Agenda Pembangunan Nasional PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar);
2. Tujuan kedua (T.2) mewakili tujuan dari *customer perspectives*, yakni pengguna jalan nasional, yang secara regulasi (sesuai UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan) memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan minimal sesuai SPM (standar pelayanan minimal), yang mencakup aspek: aksesibilitas, mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata;
3. Tujuan ketiga (T.3) mewakili tujuan pada level *Internal Business Perspectives*, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Bina Marga (sesuai UU No 38 Tahun 2004 maupun Permen

PUPR 03/PRT/M/2019) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan, yang implementasinya dilaksanakan oleh setiap Unit Eselon II Pusat maupun UPT/Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

4. Tujuan keempat (T.4) mewakili tujuan pada level *Learning and Growth Perspectives*, sebagai upaya dari Ditjen Bina Marga untuk memenuhi modal dasar organisasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam konteks manajemen kinerja, modal dasar organisasi ini mencakup aspek SDM, pendanaan, sarana dan prasarana pendukung, sistem informasi, regulasi (NSPK), dan tata kelola/kelembagaan.

Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri dari 3 jenis sasaran yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) yakni sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat Gambar 2.2, yakni SS.2). Dalam *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Stakeholders Perspectives* yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden terpilih c.q Menteri PUPR c.q Dirjen Bina Marga);
2. Sasaran Program (SP) yakni sasaran dari program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil (*outcome*) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Customer Perspectives* yang mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Marga (melalui program penyelenggaraan jalan) yakni sesuai ketentuan pasal 37 (1.c) UU 38/2004 tentang Jalan bahwa hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan yang mencakup: aspek aksesibilitas, kondisi jalan, keselamatan jalan;

3. Sasaran Kegiatan (SK) yakni sasaran sebagai keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja Pusat maupun Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Marga sesuai Peraturan Menteri PUPR 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yang pada dasarnya terkelompok menjadi 2, yakni:
 - Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional (sesuai pasal 4 (a.) UU 38/2004 tentang Jalan) atau dalam pasal 184 butir a. s.d h. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Karena kegiatan ini terkait proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Internal Business Process Perspectives*;
 - Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai pasal 184 butir g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum dan hubungan masyarakat. Karena sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata organisasi Ditjen Bina Marga, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Learning and Growth Perspectives*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sasaran serta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya disampaikan pada Gambar 2.4, di mana:

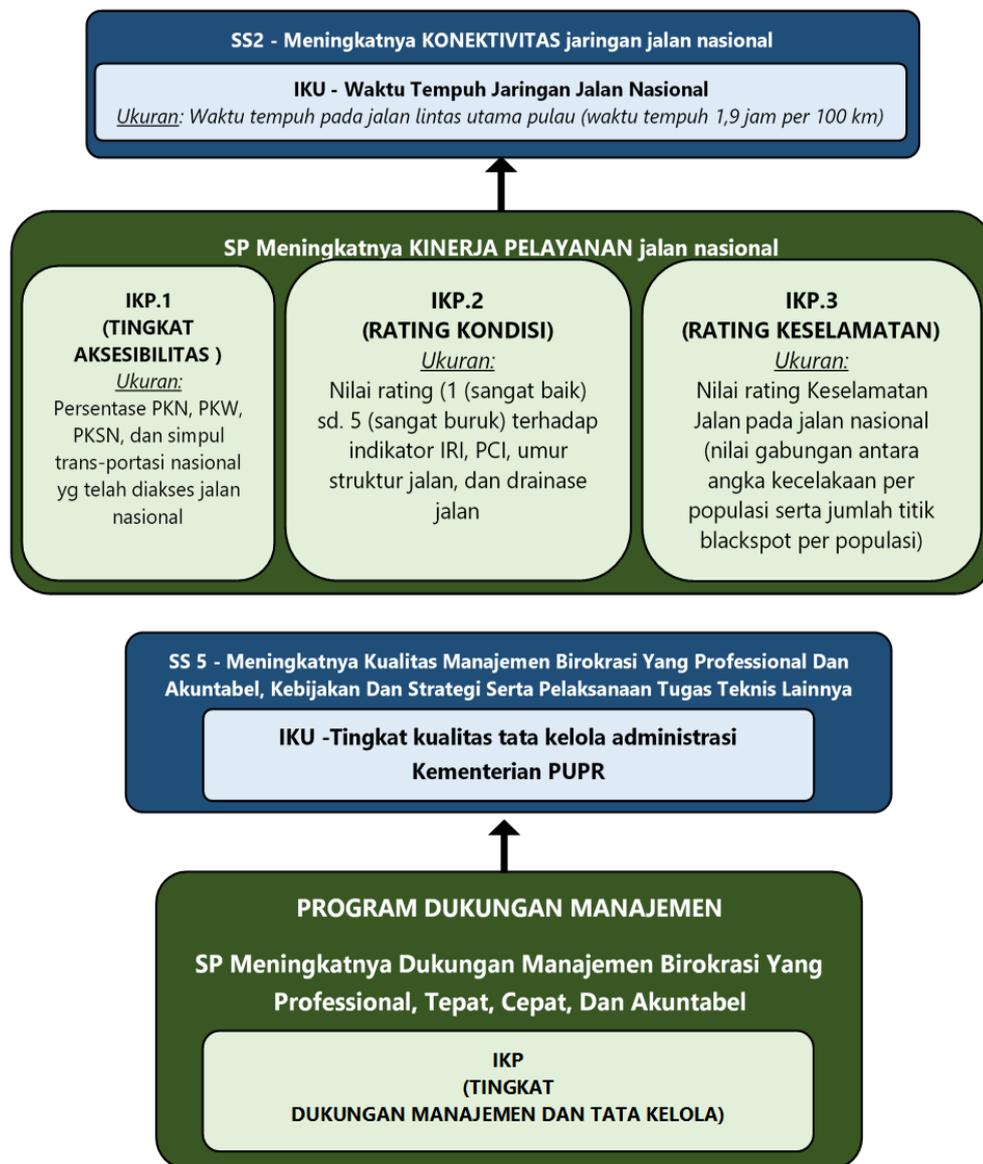
1. Untuk Sasaran Strategis (SS) dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau sering disebut juga sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif/ kualitatif tercapainya target Sasaran

Strategis (SS). SS dan IKSS/IKU ini merupakan cerminan sasaran utama yang hendak dicapai dari penyelenggaraan jalan dalam mendukung agenda pembangunan nasional periode 2020-2024 (yakni konektivitas jalan). Oleh karenanya SS dan IKU tersebut tercantum pada *perspective* tertinggi (*stakeholders perspective*) dalam peta strategi Ditjen Bina Marga, dan akan termuat sebagai SS dan IKU juga dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024;

2. Untuk Sasaran Program (SP) dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang mencerminkan tercapainya sasaran dari program penyelenggaraan jalan dalam rangka mendukung perwujudan Sasaran Strategis Nasional. Oleh karenanya SP dan IKP tercantum pada *perspective* kedua tertinggi (*customers perspective*) dalam peta strategi Ditjen Bina Marga, dan akan menjadi sasaran dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020-2024 karena menjadi tanggung jawab Dirjen Bina Marga untuk mencapainya;
3. Untuk Sasaran Kegiatan (SK) dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mencerminkan terlaksananya sasaran/target setiap kegiatan dalam program penyelenggaraan jalan dalam mendukung terwujudnya SP dan SS. Oleh karenanya SK dan IKK tercantum pada *perspectif* ketiga dan keempat (*internal business perspective* dan *learning and growth perspective*) dalam peta strategi Ditjen Bina Marga, dan akan menjadi sasaran dan target kinerja dalam Renstra masing-masing Eselon II/UPT (Direktorat Teknis/Balai) dan menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja untuk mencapainya.



Gambar 2.1 Peta Strategi Ditjen Bina Marga 2020-2024



Gambar 2.2 Gambar Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024

Adapun SK dan IKK dalam peta strategi Ditjen Bina Marga akan menjadi SK dan IKK pada level Unit Eselon II dan Balai Terkait. Selanjutnya, pembahasan mengenai Sasaran Kegiatan (SK) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (berikut dengan targetnya) dari setiap Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 disampaikan pada **Lampiran**.

Penjelasan tentang pemilihan IKU dan IKP tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Harapan publik utamanya terhadap kinerja penyelenggaraan jalan (yang sebaiknya dijadikan sebagai SS yang diukur melalui IKSS/IKU) adalah terwujudnya konektivitas nasional, sebagaimana tertuang pula dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dalam hal ini konektivitas jaringan jalan tidak hanya diukur dari terhubungnya simpul-simpul penting dan prioritas nasional oleh jaringan jalan nasional (sesuai definisi jalan nasional dalam pasal 26 PP 34/2006 tentang Jalan dan Permen PUPR 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan), tetapi lebih dari itu diukur melalui efektivitas hubungan antar pusat kegiatan/simpul tersebut yang diukur melalui waktu tempuh pada koridor utama jaringan jalan nasional. Adapun target maksimalnya adalah seluruh koridor jaringan jalan nasional dapat ditempuh dalam waktu 1,9 jam untuk 100 km.
2. Sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan hasil (*outcome*) utama dari program penyelenggaraan jalan untuk mendukung pencapaian SS dan IKSS/IKU pada butir (1) diatas. Oleh karenanya, SP dan IKP yang dipilih untuk program penyelenggaraan jalan adalah kinerja pokok yang menjadi prasyarat (*pre-requisite*) terwujudnya konektivitas jaringan jalan nasional yang efisien, yakni:
 - a. Tingkat aksesibilitas jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam menyediakan aksesibilitas terhadap seluruh pusat kegiatan skala nasional (PKN, PKW, PKSN), simpul transportasi nasional (pelabuhan, bandara, terminal) dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang harus diakses oleh jaringan jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ukuran yang digunakan adalah PKN, PKW, PKSN, simpul transportasi nasional, dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan nasional. Pencapaian tingkat aksesibilitas jalan nasional didukung oleh kegiatan pembangunan baru jalan dan jembatan nasional (termasuk jalan tol);
 - b. Rating kondisi jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi jalan yang diukur melalui tingkat kondisi seluruh bagian jalan (perkerasan, bahu,

drainase, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan) sesuai dengan umur rencana yang diharapkan. Penyediaan kondisi jalan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam PP 34/2006 tentang Jalan dinyatakan melalui nilai kerataan permukaan jalan (IRI/*International Roughness Index*). Selanjutnya secara teknis indikator IRI (berserta indikator lainnya: PCI dan umur struktur jalan, kondisi drainase, dll) digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan dengan metoda Rating Kondisi Jalan (RKJ): dimana Skor 1 (sangat baik) dan Skor 5 (sangat buruk). Target dari Rating Kondisi Jalan (RKJ) ini adalah ruas jalan dalam kondisi mantap (skor RKJ antara 2 s.d 3), yakni ruas jalan yang secara minimal dapat digunakan (tidak rusak) atau dijaga kondisinya dalam *range* baik (*good*) dan sedang (*fair*).

- c. Tingkat keselamatan jalan nasional, mewakili hasil kerja dari Ditjen Bina Marga dalam mengupayakan pemenuhan pilar jalan berkeselamatan sesuai dalam RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) jalan, khususnya melalui penanganan titik-titik rawan kecelakaan (*Blackspot*) di jalan nasional. Tingkat keselamatan jalan nasional diukur dengan suatu indeks/skor (berskala 5: nilai 0 (sempurna) dan nilai 5 (sangat buruk)) yang menggabungkan antara (1) skor tingkat kejadian kecelakaan (kecelakaan/populasi) dengan (2) skor tingkat keberadaan *blackspot* jalan nasional (*blackspot*/populasi).
- d. Selanjutnya penjelasan rinci mengenai perhitungan tiga poin di atas, dijabarkan dalam buku pedoman perhitungan IKP/IKU Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024.

2.1.3. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini disampaikan sasaran dari BPJN Sumatera Barat untuk periode Rencana Strategis 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.

Tabel 2.2 Target Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Jalan 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan		Tahun Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKP 1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (% PKN, PKW, PKSN, simpul transportasi nasional, dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI Prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan nasional)	%	Target Awal	76,0	76,0	76,0	76,0	84,0
			Target Revisi	76,0	76,0	76,0	76,0*	76,0*
	IKP 2 Rating Kondisi Jalan Nasional (rata-rata rating nilai IRI, PCI, Umur Struktur Jalan dan drainase Jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	Target Awal	2.75	2.57	2.41	2.28	2.20
			Target Revisi	2.75	2.57	2.41	2.28	2.20
	IKP 3 Tingkat Keselamatan Jalan Nasional (indeks keselamatan jalan)	Nilai	Target Awal	5.0	5.03	4.50	4.10	3.77
			Target Revisi	5.0	5.0	4.50	4.10	3.77

Mengacu kepada review renstra Ditjen Bina Marga, terdapat 8 (delapan) terdapat sasaran kegiatan “Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional” yang diturunkan pada unit Balai Pelaksanaan Jalan dengan indikator kinerja antara lain:

- a. Panjang jalan yang terpelihara sepanjang
- b. Panjang jembatan yang terpelihara.
- c. Panjang jalan yang ditingkatkan.
- d. Panjang jembatan yang ditingkatkan.
- e. Panjang jalan yang dibangun.
- f. Panjang jembatan yang dibangun.
- g. Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun.
- h. Dukungan jalan daerah.

Tabel 2.3 Target Keluaran (Output) Kegiatan 2020-2024

	Target Output Utama Renstra 2020-2024	Satuan	Rencana Target					Total
			Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	
1	Panjang jalan yang terpelihara	km	1,448.81	1,448.81	1,448.81	1,448.81	1,448.81	1,448.81
2	Panjang jalan yang ditingkatkan	km	0.00	49.23	78.33	98.24	188.11	413.91
3	Panjang jembatan yang terpelihara	m	17,952.54	17,952.54	17,952.54	17,952.54	17,952.54	17,952.54
4	Panjang jembatan yang ditingkatkan	m	158.80	907.50	900.00	1,843.00	2,184.00	5,993.30
5	Panjang jalan akses simpul transportasi yang dibangun (Pelabuhan, bandara)	km	2.00	8.00	8.00	9.50	8.00	35.50
6	Panjang jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan dukungan pemerintah	km	0.00	0.00	1.40	3.00	3.00	7.40
7	Panjang Flyover dan Underpass yang dibangun	m	0.00	0.00	288.53	374.03	374.03	1,036.60
8	Panjang Penanganan Keselamatan Jalan	km	0.00	0.00	10.00	5.00	9.00	24.00

Dalam mendukung pencapaian indikator panjang jalan jembatan yang ditingkatkan, maka dari itu direncanakan Pembangunan *antara lain*:

1. Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi Bunga Tanjung– Teluk Tapang
Untuk mendukung lancarnya akses arus barang melalui Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 34 km.
2. Pembangunan Jalan Alih Trase Akibat Abrasi di Pulau Sipora (Kep. Mentawai)
3. Pembangunan Fly Over Panorama I Sitinjau Lauik di Kota Padang
4. Pembangunan Fly Over Duku BIM di Kabupaten Padang Pariaman
5. Pembangunan Fly Over Tabing dan Lubuk Buaya di Kota Padang
6. Mendukung Pembangunan Jembatan Gantung bagi pejalan kaki di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
7. Mendukung pembangunan jalan daerah

Penyusunan Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Tahun 2020-2024 untuk Preservasi Jalan dilakukan berdasarkan Petunjuk Penyusunan Program Preservasi Jalan oleh Direktorat Preservasi Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun perkiraan perubahan kondisi jalan akibat penanganan untuk perkerasan jalan adalah dengan KPI Rating Kondisi 2,20.

2.2 Perjanjian Kinerja

2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Salah satu ruang lingkup dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 09/PRT/M/2018 seperti yang telah dijelaskan pada Bab 1 diatas adalah Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Amanat tersebut telah dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilakukannya penyusunan perjanjian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada 10 Januari 2024.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Awal TA 2024 UPT BPJN Sumatera Barat

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2024	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	100,00 %	100,00 %	
	Parameter <i>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</i>	76,00 %	80,00 %	
	Rincian Output			
	RBC 006 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP)	30,15 Km	19,10 Km	
	a. Pembangunan Jalan	30,15 Km	19,10 Km	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	30,15 Km	19,10 Km	
	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	7,47 Km	7,47 Km	
	a. Pembangunan Jalan	7,47 Km	7,47 Km	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	7,47 Km	7,47 Km	
	RBC 001 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	0,0001 Km	0,0001 Km	
	b. Pembangunan Terowongan	0,0001 Km	0,0001 Km	
	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	380,00 M	120,00 M	
	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	100,00 %	100,00 %	
	Parameter <i>Rating Kondisi Jalan Nasional</i>	2,78	2,78	
	Rincian Output			
	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	- Km	1.315,70 Km	
	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	1.212,35 Km	0,0001 Km	
	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	67,38 Km	28,08 Km	
	a. Pemeliharaan Preventif	7,92 Km	2,60 Km	
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	12,29 Km	10,10 Km	
	c. Rehabilitasi Mayor Jalan	36,97 Km	4,00 Km	
	d. Rekonstruksi Jalan	10,20 Km	11,04 Km	
	f. Penanganan Longsor	0,0001 Km	0,34 Km	
	CDC 004 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	- Km	0,0001 Km	
	- Penanganan Drainase	- Km	0,0001 Km	
	GDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	10.484,45 M	15.587,60 M	
	GDF 002 Preservasi Jembatan	594,70 M	2.756,10 M	
	a. Rehabilitasi Jembatan	594,70 M	1.087,10 M	
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	0,00 M	1.669,00 M	
	RDF 006 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	68,40 M	17,00 M	
	c. Penggantian Jembatan	68,40 M	17,00 M	
	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	6,00 Dokumen	10,00 Dokumen	
	CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
		IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %
		Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100,00 %	100,00 %
		Rincian Output		
		EBA 956 Layanan BMN	3,00 Layanan	1,00 Layanan
EBA 962 Layanan Umum		5,00 Layanan	5,00 Layanan	
EBA 994 Layanan Perkantoran		5,00 Layanan	5,00 Layanan	
EBB 951 Layanan Sarana Internal		63,00 Unit	50,00 Unit	
EBB 971 Layanan Prasarana Internal		6,00 Unit	1,00 Unit	

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga

Total Anggaran

Anggaran

Rp. 689.674.147.000
Rp. 30.416.578.000
Rp. 720.090.725.000

2.2.2. Perjanjian Kinerja Revisi

Pada tanggal 06 April 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor : 08/PRT/M/2018) maka sesuai Pasal 16.1.b pada Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan dalam hal salah satunya terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran).

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2024 UPT BPJN Sumatera Barat

REVISI			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	KSP: Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
	IK: Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %
	Parameter: Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	76,00 %	76,00 %
	CBC 002 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	-	180 Km
	a. Pelebaran Jalan Menambah Lajur	-	180 Km
	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	380,00 M	380,00 M
	a. Pembangunan Jembatan Jembatan	380,00 M	380,00 M
	RBC 001 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	0,00 Km	0,00 Km
	a. Pembangunan Jembatan	0,00 Km	0,00 Km
	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi ProPR	7,67 Km	7,67 Km
	a. Pembangunan Jalan Simpul Perantara	7,67 Km	7,67 Km
	RBC 006 Pembangunan Jalan Trans pada 10 Pulau Tertinggal Terkur dan Terlepan MP	30,38 Km	30,38 Km
	a. Pembangunan Jalan Simpul Perantara	30,38 Km	30,38 Km
	KSP: Rating Kondisi Jalan Nasional		
	IK: Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %
Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional	2,79	2,82	
CBR 001 Layanan Penyajian dan Pengendalian Pelaksanaan	6,00 Dokumen	10,00 Dokumen	
CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknis	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	
CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	-	1.328,70 Km	
a. Pemeliharaan Rutin Rutin	-	1.027,17 Km	
b. Penunjang Rutin Rutin	-	278,22 Km	
CDC 002 Preservasi Rekonstruksi Rehabilitasi Jalan	67,38 Km	48,25 Km	
a. Pemeliharaan Persepsi	7,92 Km	2,80 Km	
b. Rehabilitasi Mayor Jalan	12,29 Km	10,30 Km	
c. Rehabilitasi Mayor Jalan	36,87 Km	1,20 Km	
d. Rekonstruksi Jalan	10,20 Km	10,30 Km	
e. Penanganan Lanjutan	-	5,89 Km	
EDC 004 Peningkatan Drainase Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	-	0,00 Km	
a. Peningkatan Drainase	-	0,00 Km	
EDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya	1.212,35 Km	0,00 Km	
a. Pemeliharaan Rutin Rutin	1.212,35 Km	0,00 Km	
EDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah	31,77 Km	8,30 Km	
a. Peningkatan Struktur dan Perawatan	31,77 Km	8,30 Km	
EDF 002 Preservasi Jembatan	384,70 M	2.758,30 M	
a. Rehabilitasi Jembatan	384,70 M	1.087,50 M	
b. Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	1.669,00 M	
EDF 003 Penggantian Jembatan	61,00 M	43,80 M	
a. Penggantian Jembatan	61,00 M	43,80 M	
EDF 010 Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya	10.484,45 M	10.987,60 M	
a. Pemeliharaan Rutin Rutin	10.484,45 M	10.987,60 M	
EDF 006 Jalan Trans pada 10 Pulau Tertinggal Terkur dan Terlepan MP	68,40 M	17,00 M	
a. Penggantian Jembatan	68,40 M	17,00 M	
KSP: Rating Keselamatan Jalan Nasional			
IK: Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %	
Parameter: Rating Keselamatan Jalan Nasional	4,36	4,77	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	KSP: Tingkat Dukungan Manajemen Kamtibmas PUPH		
	IK: Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %
	Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100,00 %	100,00 %
	EBA 956 Layanan BHM	3,00 Layanan	1,00 Layanan
	EBA 962 Layanan Umum	5,00 Layanan	5,00 Layanan
	EBA 994 Layanan Perkantoran	5,00 Layanan	5,00 Layanan
	EBA 991 Layanan Sarana Internal	63,00 Unit	66,00 Unit
	EBA 971 Layanan Sarana Internal	6,00 Unit	1,00 Unit
	Kegiatan		Anggaran
	1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Rp. 1.271.607.470.000
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga		Rp. 31.367.048.000	
Total Anggaran		Rp. 1.302.974.518.000	

2.2.3. Kronologis Perubahan Perjanjian Kinerja

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat melakukan revisi Perjanjian Kinerja TA. 2024 pada 31 Desember 2024 yang disesuaikan dengan Revisi Renstra Kementerian PUPR yakni adanya penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dan berdasarkan revisi DIPA terakhir TA. 2024 di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Komponen perjanjian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada tahun 2024 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Program, dalam penyusunan perjanjian kinerja, program dikaitkan dengan program penganggaran dalam DIPA dan mengacu kepada sasaran/kegiatan Renstra 2020-2024.
- Sasaran, sesuai dengan yang dimuat dalam Review Renstra Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada perjanjian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat tahun 2024 terdapat 2 (dua) sasaran program dan 21 (dua puluh satu) rincian output. Sasaran dan Kegiatan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi (tusi) dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2020-2024.

Berdasarkan PK Revisi untuk Target IKSP Rating Kondisi Jalan pada Satker BPJN Sumatera Barat terdapat penurunan target dari 2,78 menjadi 2,82 karena hal-hal sebagai berikut :

1. Sepanjang 18,2 km ruas jalan sioban - katiet (N.052) (1,28%) terdampak abrasi pantai sehingga dalam kondisi rusak berat. Terdapat paket pembangunan jalan alih trase pada segmen jalan yang abrasi. Segmen jalan yang abrasi masih terhitung dalam SK Jalan Nasional 2022.
2. Sepanjang 18 km segmen ruas jalan lubuk selasih - surian (N.053) (1,26%) merupakan bagian kawasan air dingin. Segmen ruas jalan tersebut didominasi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat akibat aktivitas tambang galian c pada sisi kiri dan kanan jalan.
3. Terdapat 35,3 km panjang jalan (2,48%) dalam kondisi iri marginal berdasarkan survei iri smt 2 2023 yang berubah status dari sedang menjadi kondisi rusak ringan dan rusak berat pada survei smt 2 2024.

2.2.4. Perbandingan PK Awal dan PK Revisi 2024 (Outcome)

Indikator Kinerja Kegiatan, Pada Perjanjian Kinerja awal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat tahun 2024 terdapat 2 (dua) sasaran program dan 26 (dua puluh enam) output, namun pada Perjanjian Kinerja awal yang digunakan sebagai sumber data adalah DIPA awal TA. 2024 sedangkan pada Perjanjian Kinerja revisi yang digunakan sebagai sumber data adalah DIPA revisi terakhir TA. 2024 seperti yang dijelaskan pada tabel Perjanjian Kinerja di bawah ini :

Tabel 2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (outcome)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET.
			PK AWAL	PK REVISI	
	Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional				
	IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	80,00	76,00	Berubah
	IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional	Nilai	2,78	2,82	Berubah
	IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional	Nilai	-	3,77	Berubah
	Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
	IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100,00	100,00	Tetap

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut :

1. Untuk Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional terdapat penurunan target karena Terdapat 1 (satu) nodes (Pelabuhan Teluk Tapang) yang semula menjadi target TA 2024 didrop karena Pelabuhan belum fungsional.
2. Untuk Rating Kondisi Jalan Nasional pada BPJN Sumatera Barat terdapat penurunan target dari 2,78 menjadi 2,82 karena hal-hal sebagai berikut:
 - Sepanjang 18,2 km ruas jalan sioban - katiet (N.052) (1,28%) terdampak abrasi pantai sehingga dalam kondisi rusak berat. Terdapat paket pembangunan jalan alih trase pada segmen jalan yang abrasi. Segmen jalan yang abrasi masih terhitung dalam SK Jalan Nasional 2022.

- Sepanjang 18 km segmen ruas jalan lubuk selasih - surian (N.053) (1,26%) merupakan bagian kawasan air dingin. Segmen ruas jalan tersebut didominasi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat akibat aktivitas tambang galian c pada sisi kiri dan kanan jalan.
 - Terdapat 35,3 km panjang jalan (2,48%) dalam kondisi iri marginal berdasarkan survei iri smt 2 2023 yang berubah status dari sedang menjadi kondisi rusak ringan dan rusak berat pada survei smt 2 2024
3. Untuk Rating Keselamatan jalan nasional pada PK Awal tidak dimunculkan IKSP Rating Keselamatan karena pada DIPA awal tidak mendapatkan anggaran pada RO Penanganan Blackspot, namun setelah adanya Revisi DIPA Penanganan Blackspot diakomodir melalui kegiatan Preservasi, sehingga target IKSP Rating Keselamatan dimunculkan pada PK Revisi. Target penanganan titik blackspot di tahun 2024 sebanyak 18 Titik *Blackspot*, ditambah 1 titik *Blackspot* target penanganan 2022 yang belum tuntas, sehingga target pada TA 2024 menjadi 19 titik *Blackspot*. Total target penanganan titik *Blackspot* 2022-2024 sejumlah 48 titik *Blackspot*.
 4. Untuk Rating Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR tetap

2.2.5 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Output)

Tabel 2.5 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output)

No	Output	Sat	Target		Ket
			PK Awal	PK Revisi	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional					
1	CBC 006 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	0,00	1,60	
	a. Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	0,00	1,60	
	Output Renstra: Dukungan Jalan Daerah	Km	0,12	0,16	
2	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M	120,00	156,00	
	a. Pembangunan Jembatan Gantung	M	120,00	156,00	
	Output Renstra: Panjang Jalan Bebas Hambatan yang akan Dibangun dengan Dukungan Pemerintah	Km	0,0001	0,0000	
3	RBC 001 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Km	0,00	0,00	
	a. Pembangunan Terowongan	M	0,00	0,00	
	Output Renstra: Panjang Jalan Akses Simpul Transportasi yang Dibangun	Km	7,47	7,47	
4	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	Km	7,47	7,47	
	a. Pembangunan Jalan	M	7,47	7,47	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	M	7,47	7,47	
	Output Renstra: Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang Dibangun	Km	19,10	19,10	
5	RBC 006 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP) (PEN)	Km	19,10	19,10	
	a. Pembangunan Jalan	M	19,10	19,10	

No	Output	Sat	Target		Ket
			PK Awal	PK Revisi	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	M	19,10	19,10	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional					
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional					
6	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	10,00	10,00	
7	CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	2,00	2,00	
	Output Renstra: Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	1.315,70	1.315,70	
8	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	1.315,70	1.315,70	
	a. Pemeliharaan Rutin Kondisi	Km	1.037,67	1.037,67	
	b. Penunjang Holding	Km	278,03	278,03	
9	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km	0,0001	0,0001	
	a. Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	0,00	0,00	
	Output Renstra: Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	28,08	55,55	
10	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	28,08	46,25	
	a. Pemeliharaan Preventif	Km	2,60	2,60	
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	Km	10,10	10,10	
	c. Rehabilitasi Mayor Jalan	Km	4,00	11,30	
	d. Rekonstruksi Jalan	Km	11,04	16,36	
	e. Penanganan Longsoran	Km	0,34	5,89	
11	CDC 004 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	0,0001	0,0001	
	a. Penanganan Drainase	Km	0,0001	0,0001	
12	CDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km	0,0000	9,3000	
	a. Peningkatan Struktur ke Perkerasan	Km	0,0000	9,3000	
	Output Renstra: Panjang jembatan yang dipelihara	M	15.587,60	15.587,60	

No	Output	Sat	Target		Ket
			PK Awal	PK Revisi	
13	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	M	15.587,60	15.587,60	
	a. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Km	15.587,60	15.587,60	
	Output Renstra: Panjang jembatan yang ditingkatkan	Km	2.773,10	2.819,70	
14	CDF 002 Preservasi Jembatan	M	2.756,10	2.756,10	
	a. Rehabilitasi Jembatan	M	1.087,10	1.087,10	
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	1.669,00	1.669,00	
15	CDF 003 Penggantian Jembatan	M	0,00	63,60	
	a. Rehabilitasi Jembatan	M	0,00	63,60	
16	RDF 006 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)	M	17,00	17,00	
	a. Penggantian Jembatan	M	17,00	17,00	
IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional					(*) PK Awal tidak dimunculkan IKSP Rating Keselamatan karena pada DIPA awal tidak mendapatkan anggaran pada RO Penanganan Blackspot, namun setelah adanya Revisi DIPA Penanganan Blackspot diakomodir melalui kegiatan Preservasi
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional					
Parameter	Rating Keselamatan Jalan Nasional		-	3,77	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan					
17	EBA 956 Layanan BMN	Layanan	1,00	1,00	
18	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	5,00	5,00	
19	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	5,00	5,00	
20	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	50,00	69,00	
21	EBB 971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1,00	1,00	

2.3 Metode Pengukuran

Untuk melihat capaian kinerja program dan kegiatan, maka perlu dilaksanakan evaluasi pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target dengan capaian. Secara umum adalah membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal – hal yang diukur dalam Laporan Kinerja :

1. Sasaran Program
2. Sasaran Kegiatan

2.3.1 Pengukuran Sasaran Program

Indikator Sasaran Program 1: TINGKAT AKSESIBILITAS JALAN NASIONAL

Tingkat Aksesibilitas didefinisikan sebagai persentase jumlah pusat kegiatan dan simpul transportasi yang terakses langsung dengan jalan nasional. Dalam hal ini pusat kegiatan atau simpul transportasi didefinisikan telah terakses bila jalan nasional telah terhubung sampai dengan pintu masuk (gate) dari masing-masing pusat kegiatan. Khusus untuk Pelabuhan, Bandara, Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dimana jalan akses berada dalam kewenangan operator/pengembang (developer), maka akses jalan nasional hanya sampai pada titik awal jalan yang dikelola oleh operator/developer.

Tingkat aksesibilitas diukur berdasarkan persentase pusat kegiatan yang telah diakses jalan nasional, meliputi:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
- Kawasan Industri (KI);
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan
- Simpul transportasi nasional (pelabuhan utama; pelabuhan pengumpul; bandar udara primer, sekunder, tersier; pelabuhan penyeberangan kelas IA, dan terminal kelas IA)

Pengukuran tingkat aksesibilitas dilakukan terlebih dahulu dengan mengidentifikasi pusat kegiatan dan simpul transportasi baik eksisting

maupun rencana dengan menggunakan dokumen perencanaan dari berbagai sektor terkait, antara lain:

1. PP No.13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional untuk menentukan lokasi dan deliniasi dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
2. PP No.50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 untuk menentukan lokasi dan deliniasi dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
3. PP No.2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 untuk menentukan rencana kawasan industri prioritas nasional. Sementara untuk kawasan industri eksisting berdasarkan data GIS, data tersebut dapat diakses di: <http://geoportal.kemenperin.go.id/pencarian?kategori=Lingkungan%20Terbangun>
4. Untuk peraturan yang menaungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain:
 - a. KEK Arun Lhokseumawe (PP No.5 Tahun 2017)
 - b. KEK Bitung (PP No.32 Tahun 2014)
 - c. KEK Galang Batang (Peraturan-Pemerintah No.42 Tahun 2017)
 - d. KEK Maloy (PP No.85 Tahun 2014)
 - e. KEK Mandalika (PP No.52 Tahun 2014)
 - f. KEK Morotai (PP No.50 Tahun 2014)
 - g. KEK Palu (PP No.31 Tahun 2014)
 - h. KEK Sei Mangke (PP No.29 Tahun 2012)
 - i. KEK Singashari (PP No.68 Tahun 2019)
 - j. KEK Sorong (PP No.31 Tahun 2016)
 - k. KEK Tanjung Apiapi (PP No.51 Tahun 2014)
 - l. KEK Tanjung Kelayang (PP No.6 Tahun 2016)
 - m. KEK Tanjung Lesung (PP No.26 Tahun 2012)
5. Kepmenhub No. KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Letak Bandara Internasional untuk menentukan lokasi bandara pengumpul primer, pengumpul sekunder dan pengumpul tersier baik eksisting maupun rencana yang secara hirarki memenuhi ketentuan untuk diakses oleh jalan nasional sesuai dengan pasal 18 ayat 2 – PP No. 13 tahun 2017;

6. KP no.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) untuk menentukan lokasi Pelabuhan Utama dan Pengumpul baik eksisting maupun rencana yang secara hirarki memenuhi ketentuan untuk diakses oleh jalan nasional sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 – PP No.13 tahun 2017;
7. Kepmenhub No. KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Tipe A di seluruh wilayah Indonesia.

Setelah data-data tersebut diolah dalam bentuk GIS dan dilakukan *overlay* dengan data GIS jalan nasional terbaru, maka proses identifikasi pusat-pusat kegiatan yang telah terakses dengan jalan nasional dapat dilakukan. Tingkat aksesibilitas jalan nasional dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{TI}}{\sum \text{SNa}} \times 100 (\%)$$

Dimana:

- TI : Tingkat Aksesibilitas (%)
 SNa : Jumlah Pusat Kegiatan yang telah terakses Jalan Nasional
 \sum SN : Total jumlah Pusat Kegiatan

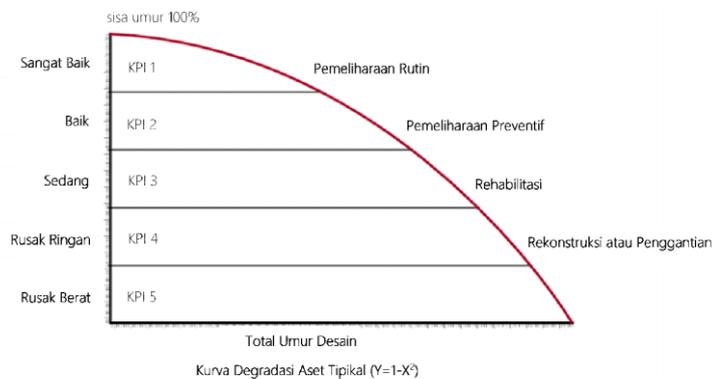
Indikator Sasaran Program 2: TINGKAT RATING KONDISI JALAN

Untuk meningkatkan kehandalan pelayanan jalan dan pengambilan keputusan, Ditjen Bina Marga menyusun indikator kinerja kondisi jalan dengan 4 komponen berikut:

2. Kekasaran / Roughness (nilai international roughness index, IRI)
3. Kondisi Permukaan Perkerasan / Pavement Surface Condition (PCI)
4. Sisa Umur Perkerasan / Remaining Useful Life of Pavement (RSL)
5. Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness*

Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5, dimana skor 1 menunjukkan bahwa kondisi jalan masih sangat baik atau baru, sedangkan skor 5 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak berat. Setiap komponen juga memiliki skor individu yang berupa bilangan bulat dalam rentang 1 sampai 5. Setiap skor kemudian dikalikan dengan faktor pembobot yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai IKP Komponen Final. Namun bila ada setidaknya satu dari keempat IKP Komponen tersebut memperoleh skor 5, maka nilai IKP Rating Kondisi Jalan Final secara otomatis adalah 5. Nilai Final ini mengindikasikan perlu adanya

penanganan/perbaikan pada segmen tersebut untuk mencapai tingkat layanan yang disyaratkan.



Gambar 2.3 Penggunaan KPI Jalan

1) **Kekerasan / Roughness** (nilai *international roughness index*, IRI)

Tabel 2.6 Skala Penilaian KPI Roughness

Skor IKP Roughness	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup
1	Sangat Baik	IRI < 2	IRI < 4
2	Baik	2 ≤ IRI < 4	4 ≤ IRI < 9
3*	Sedang	4 ≤ IRI < 6	9 ≤ IRI < 13
4	Rusak Ringan	6 ≤ IRI < 8	13 ≤ IRI < 4
5	Rusak Berat	IRI ≥ 8	IRI ≥ 14
*3	*Sedang	*Tidak Ada Data	*Tidak Ada Data

2) **Kondisi Permukaan Perkerasan / Pavement Surface Condition (PCI)**

Tabel 2.7 Skala KPI PCI

Skor IKP Kondisi Permukaan Jalan	Diskripsi	Rentang PCIfinal
1	Sangat Baik	PCI > 85
2	Baik	70 < PCI ≤ 85
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25

3) Sisa Umur Perkerasan / Remaining Structural Life (RSL)

$$RSL = \frac{LN \left(\frac{CAP * r + MESA * (1+r)}{MESA} \right)}{LN (1+r)} - 1$$

Dimana :

- RSL = Sisa Umur Perkerasan (dalam tahun)
- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Stuktural Perkerasan/
- r = Laju pertumbuhan lalu lintas

Apabila data lendutan/ defleksi tidak tersedia, nilai RSL dapat diperoleh dengan pendekatan terhadap nilai IRI sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{IRI} = \frac{In \frac{IRI - 1.52}{6.48}}{-0.074}$$

Jika IRI = 0 atau tidak ada data, maka diambil nilai RSL = 9 (tahun)

Jika IRI < 2 maka diambil nilai RSL = 35 (tahun)

Bila nilai RSL_{IRI} kurang dari 0, maka diambil nilai RSL = 0 sesuai persamaan berikut :

$$RSL_{aprox} = (RSL_{IRI}, 0)$$

Nilai RSL_{final} adalah nilai minimum antara RSL_{aprox} atau 50 sesuai dengan persamaan berikut :

$$RSL_{final} = (RSL_{aprox}, 50)$$

Tabel 2.80 Skala Penilaian IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan

Skor IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan	Diskripsi	Rentang RSL (tahun)
1	Sangat Baik	RSL > 15
2	Baik	10 < RSL ≤ 15
3	Sedang	5 < RSL ≤ 10
4	Rusak Ringan	1 < RSL ≤ 5
5	Rusak Berat	RSL ≤ 1

4) Efektifitas Drainase/*Drainage Effectiveness (Surface Drainage and Subsoil Drainage)*

Terdapat 2 sub komponen penting dalam menentukan nilai IKP

Komponen Efektifitas Drainase yaitu:

- Sub Komponen Kondisi Drainase Permukaan
- Sub Komponen Kondisi Drainase Sub Soil

Karena keterbatasan data yang tersedia saat ini, maka digunakan sistem penilaian IKP Efektifitas Drainase yang disederhanakan untuk jangka pendek.

Tabel 2.91 Skala Penilaian KPI Efektifitas Drainase Permukaan

Skor IKP Sub-Komponen Drainase	Deskripsi	KOMBINASI PCI dan Terrain Datar		Kombinasi PCI dan Terrain Berbukit/Pegunungan	
		Rentang PCIRAW	Terrain	Rentang PCIRAW	Terrain
1	Sangat Baik	PCI > 85	Datar	PCI > 70	Berbukit/Pegunungan
2	Baik	70 < PCI ≤ 85	Datar	55 < PCI ≤ 70	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70	Datar	25 < PCI ≤ 55	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55	Datar	PCI ≤ 25	Berbukit/Pegunungan
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25	Datar		Berbukit/Pegunungan

Tabel 2.12 Skala Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Sub Soil

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil	Deskripsi	Infrastruktur Drainase Tersedia	Terrain
2	Baik	Ya	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	Tidak/Tidak ada data	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	Ya	Datar
5	Rusak Berat	Tidak/Tidak ada data	Datar

Nilai IKP Drainase rata-rata terbobot dari kedua komponen tersebut diatas dengan rasio pembobotan 80% drainase permukaan dan 20% drainase subsoil. Apabila salah satu dari kedua komponen mendapatkan skor 5, maka nilai IKP Efektifitas Drainase Final otomatis adalah 5.

Sistem Penilaian IKP Efektifitas Drainase – Jangka Panjang Apabila data inventaris dan kondisi drainase sudah tersedia dengan lengkap, IKP Efektivitas Drainase dihitung dengan metode yang dijelaskan berikut ini. 1. Efektivitas Sub – Komponen Drainase Permukaan Untuk menilai IKP Sub – Komponen Drainase Permukaan digunakan pendekatan menggunakan data per 100 m berikut, antara lain :

- a. Data kondisi permukaan perkerasan (PCI);
- b. Luasan dan tingkat keparahan *rutting*;
- c. Jenis, ketinggian, dan kondisi bahu jalan*; * Jika bahu tidak berpenutup maka nilai kondisi +1 (semakin buruk), dan jika bahu lebih tinggi dari permukaan jalan yang dilalui lalu lintas maka nilai kondisi +1(semakin buruk)
- d. Data medan (terrain)** ** Jika medan perbukitan atau pegunungan maka nilai kondisi -1 (semakin baik).

Tabel 2.103 Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi			Deskripsi
Medan (<i>Terrain</i>)	Perbukitan/Pegunungan	-1	Semakin Baik
Bahu	Tanpa Penutup	+1	Semakin Buruk
	Lebih tinggi dari permukaan jalan	+1	Semakin Buruk

Faktor pembobot untuk masing – masing sub-komponen efektivitas drainase permukaan (a,b,c) adalah :

Tabel 2.14 Efektivitas Drainase Permukaan

Sub-Komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi Permukaan Jalan	40%
<i>Rutting</i> (luas dan tingkat keparahan)	40%
Kondisi Bahu	20%

Efektivitas Sub – Komponen Drainase Subsoil Komponen penilaian drainase subsoil meliputi beberapa aspek berikut :

- a. Infrastruktur drainase : saluran terbuka, pit, struktur Inlet dan Outlet, pipa
- b. Efektivitas berdasarkan kondisi dan performa jaringan drainase ditunjang dengan pemeliharaan.

Data kondisi per 100m berikut dibutuhkan untuk menghitung Nilai Kondisi Drainase Subsoil :

- a. Kondisi struktural dari infrastruktur
- b. Serviceability infrastruktur : siltasi/puing-puing/ penyumbatan dan/atau pengikisan struktur inlet/outlet.

Tabel 2.15 Efektivitas Drainase Subsoil

Sub-Komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi Struktural	50%
<i>Serviceability</i>	50%

Perlu dipahami bahwa data yang diambil dan digunakan dalam penilaian indikator ini adalah data segmen per 100m pada setiap lajur, sesuai yang tersedia di database Subdit DPSI. Nantinya masing-masing segmen memiliki 4 nilai KPI individu, dan KPI final sebagai rerata terbobot dari 4 nilai KPI individu tersebut.

Tabel 2.116 Tabel Faktor Pembobot KPI Final

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%
Efektifitas Drainase	15%

Pembobotan ini didasari oleh kesepakatan yang dilakukan antara seluruh Direktorat Kompetensi Ditjen Bina Marga dengan KIAT, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

1. Bobot IRI 60% dikarenakan IRI merupakan data yang paling lengkap yang dimiliki oleh Ditjen Bina Marga. Data yang akurat sebab Time-Series Data terinventarisasi secara baik;
2. Bobot PCI 10% dikarenakan pengambilan data yang dilakukan secara manual melihat kondisi visual;

3. Bobot RSL 15% dikarenakan data lendutan yang dimiliki oleh Balai masih belum lengkap;

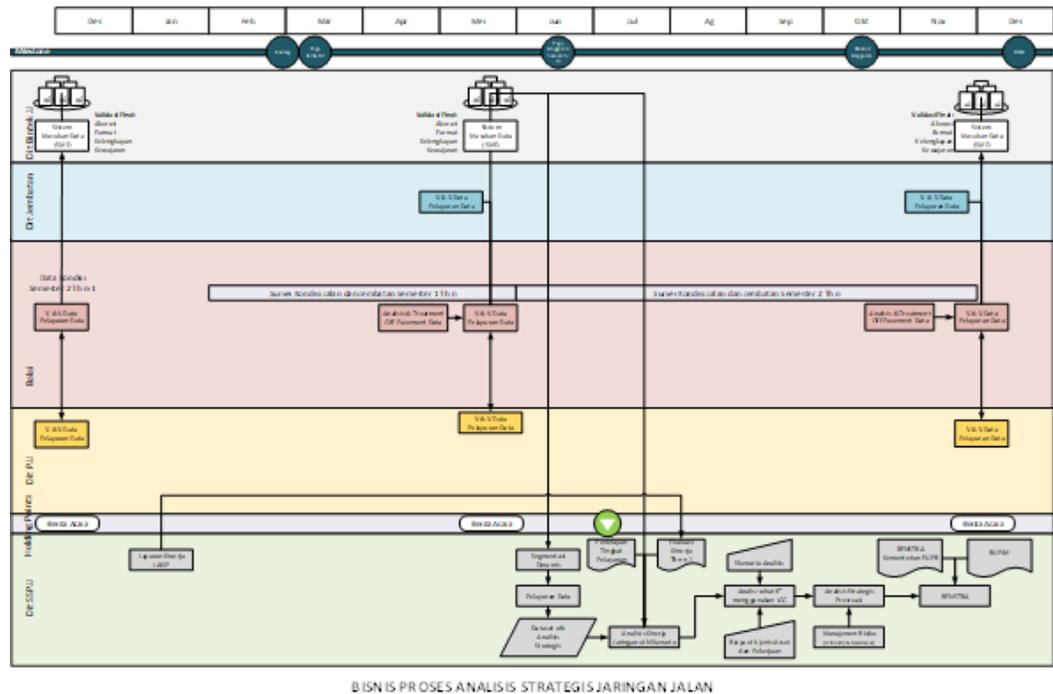
4. Bobot Efektivitas Drainase 15% dikarenakan data yang dimiliki oleh Balai masih belum lengkap.

Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5, dimana skor 1 menunjukkan bahwa kondisi jalan masih sangat baik atau baru, sedangkan skor 5 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak berat. Setiap komponen juga memiliki skor individu yang berupa bilangan bulat dalam rentang 1 sampai 5. Setiap skor kemudian dikalikan dengan faktor pembobot yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai IKP Komponen Final. Namun bila ada setidaknya satu dari keempat IKP Komponen tersebut memperoleh skor 5, maka nilai IKP Rating Kondisi Jalan Final secara otomatis adalah 5. Nilai Final ini mengindikasikan perlu adanya penanganan/perbaikan pada segmen tersebut untuk mencapai tingkat layanan yang disyaratkan.

The Indonesian Road Management System-Version 3 (IRMS-V3) dikembangkan sebagai perangkat analisis strategis dan analisis pemrograman dalam penyelenggaraan jalan, khususnya untuk pekerjaan Preservasi jaringan jalan Nasional, yaitu untuk:

1. Penetapan Sasaran Kinerja Prasarana Jaringan Jalan jangka Panjang;
2. Penetapan bentuk penanganan dan kebutuhan biaya jangka panjang berdasarkan data inventori dan kondisi jalan, pemodelan penurunan kondisi jalan, analisis biaya keseluruhan siklus hidup;
3. Penetapan Sasaran Kinerja Tahunan
4. Penetapan bentuk penanganan dan distribusi anggaran untuk setiap Balai sesuai sasaran kinerja tahunan Balai dengan anggaran yang tersedia.
5. Distribusi anggaran untuk setiap provinsi sesuai sasaran kinerja setiap provinsi dengan anggaran yang tersedia.
6. Pelaporan pencapaian kinerja jaringan jalan setiap tahun

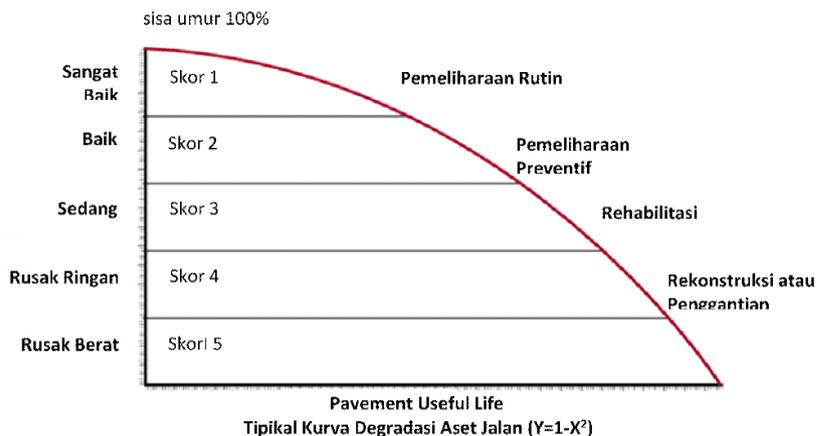
Survey IRI, PCI, RSL dan Efektivitas Drainase dilaksanakan untuk mengetahui kondisi jalan, hasil survey yang dilakukan oleh Balai diinput kedalam Sistem Masukan Data (SMD) Jalan dan selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai sumber data dalam menjawab setiap kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pimpinan.



Gambar 2.4 Bisnis Proses Analisis Strategi Jaringan Jalan

Indikator baru ini dipakai sebagai Indikator Kinerja Program Rating Kondisi Jalan Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai IKP Rating Kondisi Jalan. IKP Rating Kondisi Jalan adalah kompilasi dari kinerja keempat komponen diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. IKP Rating Kondisi Jalan dinyatakan dalam skala penilaian 1 sampai dengan 5. Nilai 1 menunjukkan bahwa kondisi jalan masih sangat baik atau Jalan baru, sedangkan nilai 5 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak berat.
- b. Kinerja keempat komponen tersebut (IRI, PCI, RSL dan efektivitas drainase) juga dinilai dengan rentang skala 1 sampai dengan 5. IKP Rating Kondisi Jalan dihitung rerata terbobot dari ke 4 komponen tersebut.
- c. Bobot dari setiap komponen ditentukan berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap penentuan rating kondisi Jalan serta mempertimbangkan juga seberapa jauh ketersediaan dan akurasi data untuk komponen tersebut. Tipikal kurva degradasi asset Jalan dan hubungannya dengan nilai IPK Rating Kondisi Jalan bisa dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 2.5 IKP Rating Kondisi Jalan dan Kurva Penurunan Kondisi Aset Jalan

Indikator Sasaran Program 3: TINGKAT KESELAMATAN JALAN

IKP Tingkat Keselamatan Jalan didefinisikan sebagai nilai komposit terbobot dari 2 komponen individu yakni IKP Komponen Kecelakaan dan IKP Komponen Blackspot. IKP Komponen Kecelakaan diperoleh dari rasio angka kecelakaan terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu (provinsi/Balai/Pulau/Nasional). Sedangkan IKP Komponen Blackspot diperoleh dari rasio jumlah blackspot terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu.

Terdapat 3 parameter yang digunakan untuk menghitung IKP Tingkat Keselamatan Jalan, antara lain:

a. Fatalitas Kecelakaan

Data kecelakaan diperoleh dari pihak Kepolisian yang dihimpun dalam Sistem Pengendalian Data Jalan Nasional (SiPDJN) oleh Subdit ADPS. Informasi-informasi krusial yang diperlukan dari data kecelakaan, antara lain:

- Nama dan kode provinsi
- Tahun pengambilan data
- Fatalitas kecelakaan (fatal, luka berat, luka ringan).

Dalam menghitung KPI Kecelakaan pada tahun berjalan, digunakan data pada tahun sebelumnya karena data dinilai lengkap (akumulasi data yang dikumpulkan selama satu tahun penuh, terhitung sejak bulan Januari hingga Desember). Apabila digunakan data pada tahun

berjalan, data yang terkumpul belum lengkap karena bukan merupakan akumulasi data selama satu tahun penuh.

b. Jumlah blackspot

Data jumlah blackspot juga berasal dari data kecelakaan, namun data yang diperlukan adalah data kecelakaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dari data tersebut kemudian diidentifikasi jumlah blackspot pada masing-masing provinsi.

Blackspot didefinisikan sebagai segmen jalan sepanjang minimum 500m dengan setidaknya 3 kasus luka berat termasuk 1 kasus fatal dalam 4 tahun terakhir.

c. Total populasi (dalam juta)

Data jumlah populasi pada tiap provinsi diperoleh berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015 oleh Badan Pusat Statistik

Data yang digunakan adalah proyeksi jumlah penduduk tahun tahun berjalan.

Ketiga data tersebut harus tersedia untuk masing-masing provinsi untuk kemudian diolah lebih lanjut untuk memperoleh Nilai KPI Keselamatan Jalan

- Nilai IKP Komponen Kecelakaan

Pembobotan Total Kecelakaan/Populasi	Nilai IKP
0-15	1
16-30	2
31-45	3
46-60	4
> 60	5

Dimana :

$$\text{Indeks Kecelakaan} = \frac{\text{Total Kecelakaan terbobot}}{\text{Populasi (juta)}}$$

Faktor Pembobot

Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
75%	20%	5%

- IKP Komponen Blackspot

Blackspot/Populasi	Nilai IKP
0-2	1
2-4	2
4-6	3
6-8	4
>8	5

Dimana :

$$Indeks\ Blackspot = \frac{Total\ Blackspot}{Populasi\ (juta)}$$

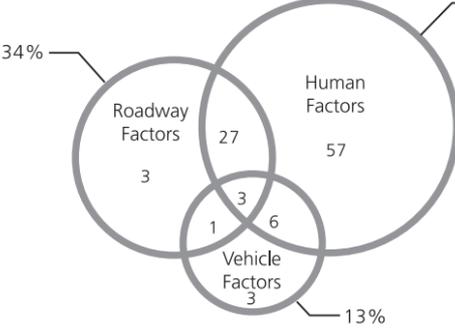
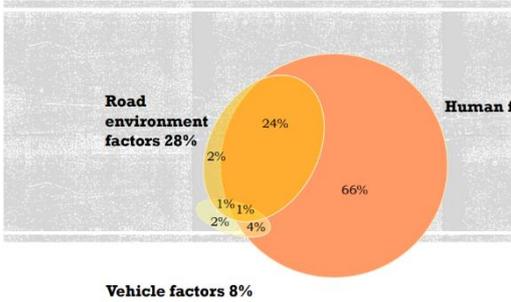
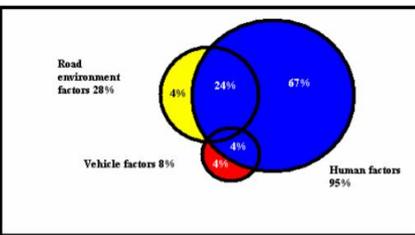
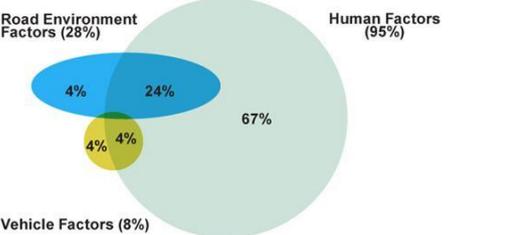
- IKP Tingkat Keselamatan Final

$$IKP_{Tingkat\ Keselamatan\ Final} = (70\% \times IKP_{Kecelakaan}) + (30\% \times IKP_{Blackspot})$$

IKP Rating Keselamatan Jalan, disusun oleh KIAT (2019) dan disetujui oleh Direktorat SSPJJ. Detail usulan perhitungan terdapat pada report berikut (terlampir: file RNPP presentation on KPIs 10-Sep Road Safety.pdf)

Bobot 70% komponen kecelakaan dan 30% komponen blackspot disepakati bersama oleh penyusun Renstra. Bobot tersebut dinilai relevan dengan kajian/riset mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dimana mayoritas adalah faktor manusia. Berdasar studi-studi internasional, Faktor Lingkungan Jalan berkontribusi 28% sampai dengan 34% terhadap kejadian kecelakaan. Laporan Korlantas seperti dikutip kominfo.go.id juga menjelaskan bila 30% penyebab kecelakaan jalan adalah faktor jalan.

Oleh karena itu, bobot 30% komponen perbaikan/penanganan Blackspot dianggap relevan dengan presentase kontribusi faktor lingkungan/prasarana jalan.

Presentase Faktor	Sumber
 <p>Source: Treat 1979 Figure 3-3. Contributing Factors to Vehicle Crashes</p>	<p>Highway Safety Manual (Bonneson, 2010),</p>
<p>The factors involved with crashes</p> 	<p>https://www.carecprogram.org/</p>
 <p>Figure 1: The three factors that contribute to road accidents (Austroads 1994)</p>	<p>Austrroads (1994),</p>
 <p>Source: NSW Roads and Traffic Authority, 1996.</p>	<p>NSW Roads and Traffic Authority (1996)</p>

SETIAP JAM RATA-RATA 3 ORANG MENINGGAL AKIBAT KECELAKAAN JALAN DI INDONESIA

Faktor penyebab terbesar kecelakaan Lalu Lintas

61%	karena faktor manusia (terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi)
9%	karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan)
30%	disebabkan oleh faktor prasarana lingkungan

Sumber : (data: Kepolisian Republik Indonesia)

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr

Indikator Sasaran Program : TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

- Perhitungan capaian outcome (IKSP)

$$\text{Capaian IKSP (\%)} = \frac{((\text{capaian (\%)} \text{ RO A} \times \text{Pagu RO A})/100) + (\text{capaian (\%)} \text{ RO B} \times \text{Pagu RO B})/100) + (\text{dst})}{\text{Pagu RO A} + \text{RO B} + \text{dst}} \times 100\%$$

- Perhitungan Capaian Output

$$\text{Capaian RO Y (\%)} = \frac{(\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket A} \times \text{Pagu Paket A}) + (\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket B} \times \text{Pagu Paket B}) + \text{dst}}{\text{Pagu Paket A} + \text{Paket B} + \text{dst}} \times 100\%$$

2.3.2. Pengukuran Sasaran Kegiatan

Tabel 2.127 Matriks Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

	Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran	Sumber Data
IKP 1	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional		
IKK 1	Panjang Jalan Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat Pemeliharaan Rutin	e-Monitoring
IKK 2	Panjang Jalan Yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat rehabilitasi	e-Monitoring
IKK 3	Panjang Jalan Yang Mendapat Rekonstruksi	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat rekonstruksi	e-Monitoring
IKK 4	Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin	e-Monitoring
IKK 5	Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan Berkala	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan Berkala	e-Monitoring
IKK 6	Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi	e-Monitoring
IKK 7	Panjang Jembatan Yang Mendapat Penggantian	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Penggantian	e-Monitoring
IKK 8	Panjang Jalan Yang Mendapat Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat Pelebaran Jalan Menuju Standar	e-Monitoring
IKP 2	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
IKK 1	Panjang Jalan Baru Yang Dibangun	Jumlah Panjang Jalan yang mendapat Pembangunan	e-Monitoring
IKK 2	Panjang Jembatan Baru Yang Dibangun	Jumlah Panjang Jembatan yang mendapat Pembangunan	e-Monitoring

2.3.3. Penanggung Jawab Pengumpulan Data

Pada tahun 2024, Paket Survey berada pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat tepatnya pada PPK Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan bukan pada Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional lagi, sehingga yang menjadi penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah Kasi. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan

2.4. Target Kinerja Tahun Berjalan Menurut Renstra

2.4.1. Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

Berdasarkan Matriks Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, banyak perubahan yang terjadi dari Perjanjian Kinerja TA. 2024 karena banyaknya faktor lain yang perlu diperhitungkan dalam pemograman pada kegiatan TA. 2024 tersebut. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini besarnya ketimpangan antara Perjanjian Kinerja 2024 dengan Matriks Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat TA. 2024.

Tabel 2.138 Sandingan Outcome dan Target Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	76,00	76,00	76,00	
2	Rating Kondisi Jalan Nasional	Nilai	2,20	2,82	2,82	
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional	Nilai	3,77	3,77	3,77	
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
4	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100,00	100,00	100,00	

Keterangan Tabel:

- Target Renstra: Merupakan Nilai yang diambil dari Target Tahun 2024 pada Renstra
- Target Perjanjian Kinerja: Merupakan Nilai yang diambil dari Target PK Revisi Tahun 2024
- Target Revisi Akhir: Merupakan Nilai yang diambil dari Volume pada DIPA Revisi terakhir.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut :

1. Untuk tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional terdapat penurunan target karena Terdapat 1 (satu) nodes (Pelabuhan Teluk Tapang) yang semula menjadi target TA 2024 didrop karena Pelabuhan belum fungsional.
2. Rating Kondisi Jalan pada Satker BPJN Sumatera Barat terdapat penurunan target dari 2,78 menjadi 2,82 karena hal-hal sebagai berikut:
 - Sepanjang 18,2 km ruas jalan sioban - katiet (N.052) (1,28%) terdampak abrasi pantai sehingga dalam kondisi rusak berat. Terdapat paket pembangunan jalan alih trase pada segmen jalan yang abrasi. Segmen jalan yang abrasi masih dihitung dalam SK Jalan Nasional 2022.
 - Sepanjang 18 km segmen ruas jalan lubuk selasih - surian (N.053) (1,26%) merupakan bagian kawasan air dingin. Segmen ruas jalan tersebut dominasi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat akibat aktivitas tambang galian c pada sisi kiri dan kanan jalan.
 - Terdapat 35,3 km panjang jalan (2,48%) dalam kondisi iri marginal berdasarkan survei iri smt 2 2023 yang berubah status dari sedang menjadi kondisi rusak ringan dan rusak berat pada survei smt 2 2024

3. Untuk Rating Keselamatan Jalan Nasional pada PK Awal tidak dimunculkan IKSP Rating Keselamatan karena pada DIPA awal tidak mendapatkan anggaran pada RO Penanganan Blackspot, namun setelah adanya Revisi DIPA Penanganan Blackspot diakomodir melalui kegiatan Preservasi, sehingga target IKSP Rating Keselamatan dimunculkan pada PK Revisi. Target penanganan titik blackspot di tahun 2024 sebanyak 18 Titik *Blackspot*, ditambah 1 titik *Blackspot* target penanganan 2022 yang belum tuntas, sehingga target pada TA 2024 menjadi 19 titik *Blackspot*. Total target penanganan titik *Blackspot* 2022-2024 sejumlah 48 titik *Blackspot*.
4. Untuk Rating Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR tetap

2.4.2 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

Tabel 2.149 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

NO	OUTPUT	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
1	Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun	Km		19,10	19,10	
	RBC 006 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP)	Km		19,10	19,10	
	a. Pembangunan Jalan	Km		19,10	19,10	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km		19,10	19,10	
2	Panjang Jalan yang dilebarkan (14 m)	Km		1,60	1,60	
	CBC 002 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km		1,60	1,60	
	a. Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km		1,60	1,60	
3	Panjang Jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan dukungan pemerintah	Km	3,00	0,00	0,00	
	RBC 001 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Km		0,00	0,00	
	a. Pembangunan Jalan	Km		0,00	0,00	
	b. Pembangunan Terowongan	Km		0,00	0,00	
4	Panjang Jalan akses simpul transportasi yang dibangun	Km	9,50	7,47	7,47	
	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km		7,47	7,47	
	a. Pembangunan Jalan	Km		7,47	7,47	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km		7,47	7,47	
6	Panjang flyover dan underpass yang dibangun	M	374,04	-	-	
	CBF 002 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan	M		-	-	

NO	OUTPUT	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
7	Dukungan Jalan Daerah	Km		0,16	0,16	
	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	Km		0,16	0,16	
	<i>a. Pembangunan Jembatan Gantung</i>	M		156,00	156,00	
8	Panjang jalan yang terpelihara	Km	1448,81	1315,70	1315,70	
	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Km		0,00	0,00	
	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km		1315,70	1315,70	
9	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	188,11	46,25	46,25	
	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km		46,25	46,25	
	<i>a. Pemeliharaan Preventif</i>	Km		2,60	2,60	
	<i>b. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km		10,10	10,10	
	<i>c. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km		11,30	11,30	
	<i>d. Rekonstruksi Jalan</i>	Km		16,36	16,36	
	<i>e. Penanganan Longsoran</i>	Km		5,89	5,89	
	CDC 015 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya)	Km		0,0001	0,0001	
	<i>a. Penanganan Drainase</i>	Km		0,0001	0,0001	
	CDC 023 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km		0,00	9,30	
	<i>a. Peningkatan Struktur ke Perkerasan</i>	Km		0,00	9,30	
10	Mendukung Keselamatan	M	9,00	-	-	
	CDC 023 Penanganan Blackspot	Km		-	-	
11	Panjang jembatan yang dipelihara	M	17952,54	15587,60	10494,45	
	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	M		15587,60	10494,45	
	RDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	M		0,00	0,00	
12	Panjang jembatan yang ditingkatkan	M	1843,00	2836,70	2836,70	
	CDF 002 Preservasi Jembatan	M		2756,10	2756,10	
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	M		1087,10	1087,10	
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	M		1669,00	1669,00	
	<i>c. Pelebaran Jembatan</i>	M		0,00	0,00	
	CDF 011 Preservasi Jembatan (Padat Karya)	M		0,00	0,00	
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	M		0,00	0,00	
	CDF 003 Penggantian Jembatan	M		63,60	63,60	
	<i>a. Penggantian Jembatan</i>	M		63,60	63,60	
	RDF 003 Jalan Strategis (ProPN)	M		0,00	0,00	
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	M		0,00	0,00	
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	M		0,00	0,00	
	RDF 003 Jalan Strategis (ProPN)	M		77,70	77,70	
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	M		38,30	38,30	

NO	OUTPUT	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
RDF 006	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	M		17,00	17,00	
	<i>c. Penggantian Jembatan</i>	<i>M</i>		<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	
13	Non Fisik			98,00	98,00	
CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen		10,00	10,00	
CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen		2,00	2,00	
EBA 956	Layanan BMN	Layanan		1,00	1,00	
EBA 962	Layanan Umum	Layanan		5,00	5,00	
EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan		5,00	5,00	
EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit		69,00	69,00	
EBB 971	Layanan Prasarana Internal	Unit		1,00	1,00	

Akuntabilitas

kinerja adalah

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari *good governance* dan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

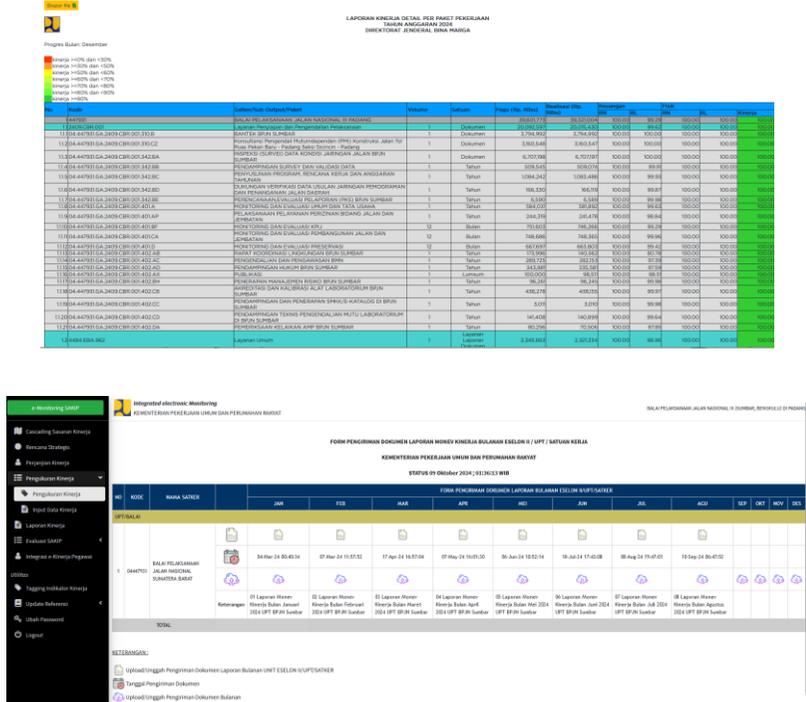
- Rencana strategis
- Perjanjian kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pengelolaan data kinerja
- Pelaporan kinerja
- Reviu dan evaluasi kinerja

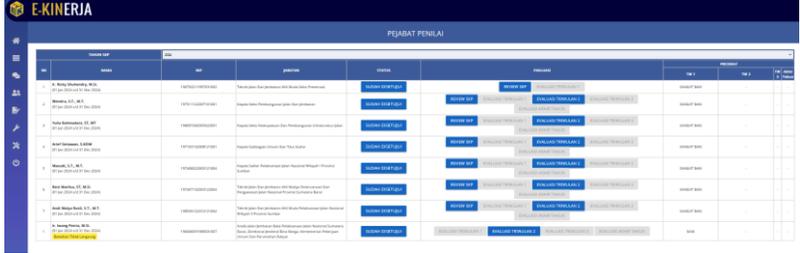
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Direktorat SSPJJ atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2023 yang disampaikan melalui surat Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nomor : PW 0201-BP/274 tanggal 24 April 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat TA. 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat telah melakukan perbaikan terhadap rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi. Adapun perbaikan rekomendasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1 Langkah tindak lanjut atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2023:

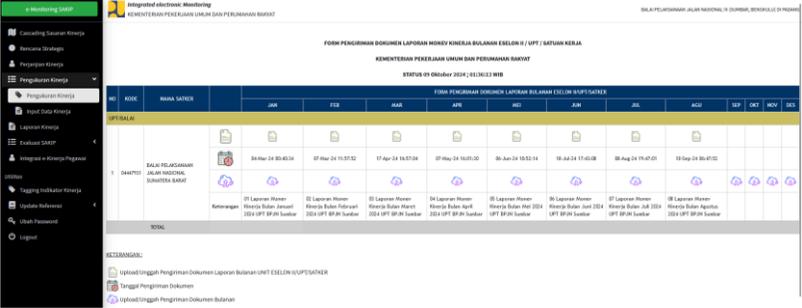
No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi																																																																
A. Perencanaan Kinerja																																																																				
1	Meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya untuk meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya	Sudah dibuat Perjanjian Kinerja Revisi sesuai Template pada Aplikasi/Website SiPP tanggal 31 Desember 2024	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>SASARAN PROGRAM</th> <th>INDIKATOR KINERJA</th> <th>BASELINE 2023</th> <th>TARGET 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</td> <td>IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Parameter : Rating Kondisi Jalan Nasional</td> <td>2,78</td> <td>2,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rincian Output:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CBR 001 Layanan Penyajian dan Pengendalian Pelaksanaan</td> <td>2,00 Dokumen</td> <td>6,00 Dokumen</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</td> <td>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PU/PR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Parameter : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rincian Output:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EBA 962 Layanan Umum</td> <td>1,00 Layanan</td> <td>1,00 Layanan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EBA 994 Layanan Perkantoran</td> <td>1,00 Layanan</td> <td>1,00 Layanan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EBB 951 Layanan Sarana Internal</td> <td>1,00 Unit</td> <td>45,00 Unit</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kegiatan</td> <td colspan="2">Anggaran</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</td> <td colspan="2">Rp. 20.092.597.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga</td> <td colspan="2">Rp. 19.509.176.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 39.601.773.000</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional			IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %	Parameter : Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,80		Rincian Output:				CBR 001 Layanan Penyajian dan Pengendalian Pelaksanaan	2,00 Dokumen	6,00 Dokumen	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PU/PR			IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %	Parameter : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100,00 %	100,00 %		Rincian Output:				EBA 962 Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan		EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan		EBB 951 Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	45,00 Unit	Kegiatan		Anggaran		1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Rp. 20.092.597.000		2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga		Rp. 19.509.176.000		Total Anggaran		Rp. 39.601.773.000	
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024																																																																	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional																																																																			
	IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %																																																																	
	Parameter : Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,80																																																																	
	Rincian Output:																																																																			
	CBR 001 Layanan Penyajian dan Pengendalian Pelaksanaan	2,00 Dokumen	6,00 Dokumen																																																																	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PU/PR																																																																			
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %																																																																	
	Parameter : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100,00 %	100,00 %																																																																	
	Rincian Output:																																																																			
	EBA 962 Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan																																																																	
	EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan																																																																	
	EBB 951 Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	45,00 Unit																																																																	
Kegiatan		Anggaran																																																																		
1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Rp. 20.092.597.000																																																																		
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga		Rp. 19.509.176.000																																																																		
Total Anggaran		Rp. 39.601.773.000																																																																		
B. Pengukuran Kinerja																																																																				

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
1	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;	UPT BPJN Sumatera Barat sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. UPT Balai dalam hal ini telah menggunakan E-Sakip, SiPP dan E-Kinerja.	UPT BPJN dalam pembuatan laporan Monitoring Pencapaian Kinerja Bulanan menggunakan data dari SiPP dan laporan tersebut diunggah dalam E-Sakip. Sampai dengan bulan November para pegawai di lingkungan BPJN Sumatera Barat sudah meng-upload SKP triwulan II pada E-Kinerja	 <p>The screenshot shows two main components: a detailed financial report table and a monitoring dashboard. The table, titled 'LAPORAN KINERJA DETAIL PER RINGKAS PEKERJAAN', lists various projects with columns for 'No', 'Kode', 'Subsistem/Output/Hasil', 'Volume', 'Status', 'Pagu (Milyar Rupiah)', 'Pembelian (Rp)', 'Pembayaran (Rp)', 'KPI', 'Monev', and 'KPI'. Below the table is a monitoring dashboard for 'Monitoring SKP' with a sidebar menu and a main area showing a grid of data for 'FORM PENGEMBAKIAN DOKUMEN LAPORAN MONITORING KINERJA BULANAN ESELON II (UPT) SATUAN KERJA'. The dashboard includes a legend for 'Kategori' and 'Status' and a list of 'TANGGAP' actions.</p>

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
				
2	Meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya untuk meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya;	dilaksanakan pada awal Januari 2025 sesuai timeline pelaporan Laporan Kinerja	-

C. Pelaporan Kinerja

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
1	Menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) dalam Dokumen Laporan Kinerja;	Info Analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional dalam dokumen laporan kinerja sudah disampaikan oleh UPT BPJN Sumatera Barat tiap bulannya dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja UPT BPJN Sumatera Barat dan laporan ini selalu diupload pada ESakip tiap minggu pertama atau kedua bulan berjalan	UPT BPJN Sumatera Barat sudah mengupload Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dari bulan Januari hingga bulan Desember 2024	
2	Meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional	UPT BPJN Sumatera Barat akan berusaha untuk meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional kedepannya	dilaksanakan pada awal Januari 2025 sesuai timeline pelaporan Laporan Kinerja	-

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;	UPT BPJN Sumatera Barat sudah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dalam hal ini UPT BPJN Sumatera Barat menggunakan E-Sakip	Sampai dengan Awal bulan ini UPT BPJN Sumatera Barat sudah mengupload Dokumen PK Awal, Dokumen Rencana Aksi dan Laporan Monitoring Pencapaian Kinerja dan Evaluasi dari bulan Januari hingga bulan Desember 2024	
2	Meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai;	UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai ke depannya;	Akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024	-
3	Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi	UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya untuk meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024	-

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
	percontohan secara nasional.	agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional ke depannya		

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA. 2024

Untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat membuat Laporan Rencana Aksi dan Monitoring dan Evaluasi Bulanan. Laporan ini dibuat yang berisi target, realisasi dan permasalahan selama pelaksanaan di lapangan. Dengan dibuatnya laporan tersebut diatas, maka segala kegiatan yang ada di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bisa dipantau dengan lebih baik.

Secara keseluruhan realisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel Pengukuran Kinerja di bawah ini :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran Program TA 2024

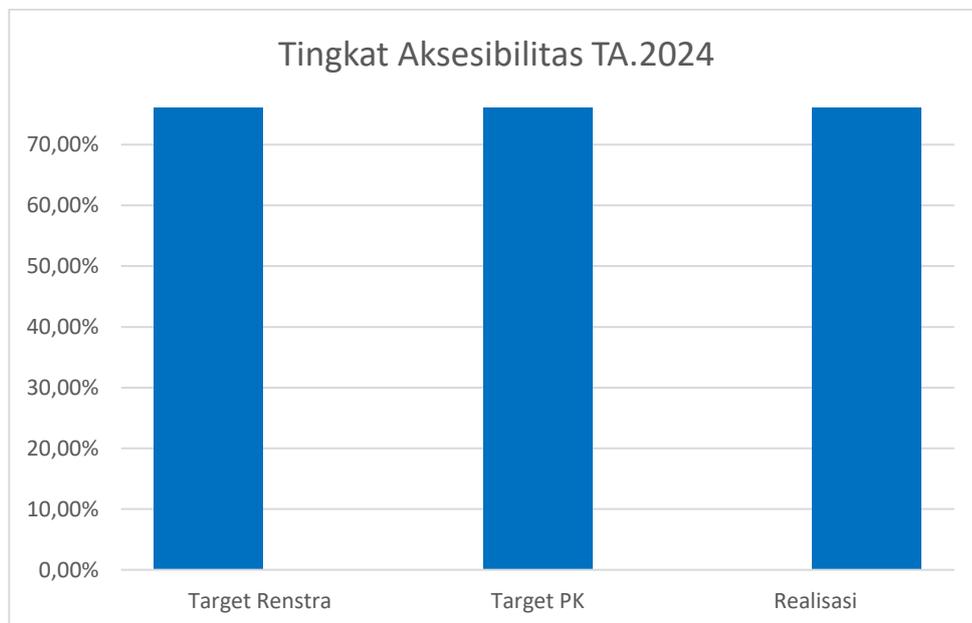
NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	76,00	76,00	100,00	
2	Rating Kondisi Jalan Nasional	Nilai	2,82	2,82	100,00	
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional	Nilai	3,77	3,77	100,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
4	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100,00	100,00	100,00	

3.2.2 Capaian Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional TA 2024

Realisasi Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional TA. 2024 sebesar 76% dengan capaian 100% terhadap target. Pada TA. 2024 tidak ada titik simpul baru yang tersambung. Terdapat 1 (satu) nodes (Pelabuhan Teluk Tapang) yang semula menjadi target TA 2024 PK dan target renstra yang didrop karena Pelabuhan belum fungsional

Tabel 3.3 Rincian Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

No	Balai / Satker / Titik Simpul (Nodes)	Renca na	Realisa si	Nama Paket Penanganan	Kendala	Tindak Lanjut
BPJN Sumatera Barat						
Provinsi Sumatera Barat						
Satker PJJ Wilayah I Sumatera Barat						
1	Teluk Tapang	0	0	Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang	Pelabuhan Teluk Tapang belum fungsional sehingga target titik simpul didrop dari target Renstra dan target PK Revisi	



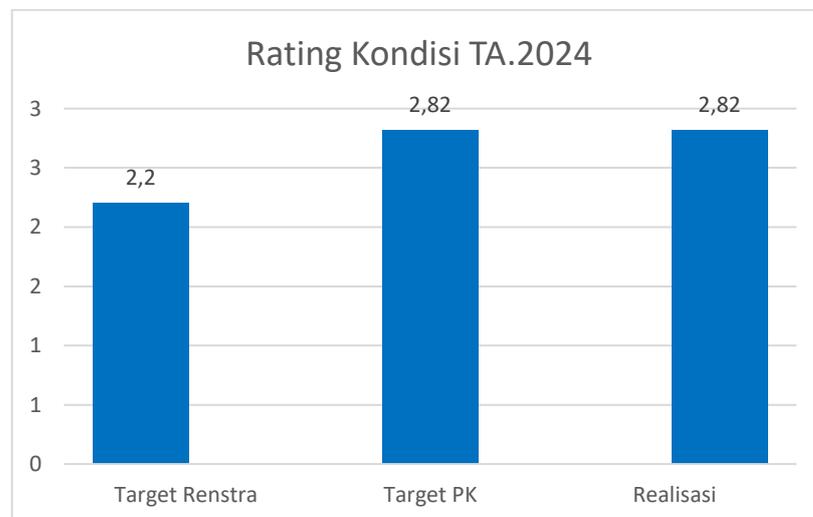
Gambar 3.1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional TA 2024

3.2.3 Capaian Rating Kondisi Jalan Nasional TA 2024

Realisasi Rating Kondisi Jalan Nasional (KPI) pada TA 2024 yaitu 2,82 dari target sebesar 2,82, dengan capaian 100% terhadap target.

Tabel 3.4 Rincian Rating Kondisi Jalan Nasional

No	Balai / Satker / PPK	KPI IRI	KPI PCI	KPI RSL	KPI DRN	TA 2024
		60%	10%	15%	15%	KPI FINAL
BPJN SUMATERA BARAT		2,92	2,38	3,22	2,32	2,82
PROVINSI SUMATERA BARAT		2,92	2,38	3,22	2,32	2,82
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT		2,82	2,49	3,18	2,42	2,78
1	PPK 1.1 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,50	3,28	3,28	2,48	2,83
2	PPK 1.2 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,45	3,49	3,49	2,42	3,03
3	PPK 1.3 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,44	2,80	2,80	2,17	2,63
4	PPK 1.4 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,25	3,12	3,12	2,25	2,55
5	PPK 1.5 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,07	2,66	2,66	2,07	2,22
6	PPK 1.6 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,58	4,06	4,06	3,52	3,75
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT		3,03	2,29	3,27	2,24	2,87
1	PPK 2.1 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,16	2,24	3,21	2,10	2,92
2	PPK 2.2 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,26	2,35	3,39	2,33	3,05
3	PPK 2.3 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,03	2,40	3,42	2,38	2,93
4	PPK 2.4 PROVINSI SUMATERA BARAT	2,44	1,91	2,76	1,91	2,35
5	PPK 2.5 PROVINSI SUMATERA BARAT	3,24	2,55	3,56	2,46	3,10
DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT		2,70	2,03	2,91	2,02	2,56
1	PPK SKPD-TP PROV SUMATERA BARAT	2,70	2,91	2,02	2,02	2,56



Gambar 3.2 Rating Kondisi Jalan Nasional TA 2024

3.2.4 Capaian Rating Keselamatan Jalan Nasional

Capaian Rating Keselamatan Jalan Nasional di BPJN Sumatera Barat adalah 3,77 dengan target 3,77 atau 100,00 %. Target penanganan Titik *Blackspot* di tahun 2024 sebanyak 18 Titik *Blackspot*, ditambah 1 titik *Blackspot* target penanganan 2022 yang belum tuntas, sehingga target pada TA 2024 menjadi 19 titik *Blackspot*, dan telah terlaksana 19 Titik *Blackspot* tersebut pada TA. 2024 ini. Total target penanganan titik *Blackspot* 2022-2024 sejumlah 48 Titik *Blackspot* telah terlaksana semuanya.

Tabel 3.5 Rincian Rating Keselamatan Jalan Nasional

No	Balai / Satker / Titik Blackspot	Renana	Realisasi	Nama Paket Penanganan	Kendala	Tindak Lanjut
BPJN Sumatera Barat						
Provinsi Sumatera Barat						
Satker PJJN II Sumatera Barat						
1	<i>Tlk. Kabung Utara, Bungus</i>	1	1	Preservasi Jalan Padang - Painan - Kambang	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
2	<i>Duku, Koto XI Tarusan</i>	1	1	Preservasi Jalan Padang - Painan - Kambang	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
3	<i>Terminal Sago Salido, Painan</i>	1	1	Preservasi Jalan Padang - Painan - Kambang	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
4	<i>Kapuh, Koto XI Tarusan,</i>	1	1	Preservasi Jalan Padang - Painan - Kambang	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
5	<i>Simpang Jl. Tanah Galak, Koto XI Tarusan</i>	1	1	Preservasi Jalan Padang - Painan - Kambang	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
6	<i>Simpang Kampung Lalang, ByPass</i>	1	1	Preservasi Jalan Padang - Solok - Sawah Lunto	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
7	<i>Puskesmas Ikuwa Koto, By Pass II</i>	1	1	Preservasi Jalan Padang - Solok - Sawah Lunto	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat						
8	<i>Simpang Kalumpang, Koto Tengah</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
9	<i>Seputaran Polsek Padang Utara</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
10	<i>STIE Perdagangan, Perupuk Tabing</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
11	<i>Milagros Padang, Lubuk Buaya</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi

No	Balai / Satker / Titik Blackspot	Renca na	Realisa si	Nama Paket Penanganan	Kendala	Tindak Lanjut
12	<i>Stasiun Tabing, Bungo Pasang</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
13	<i>Bungo Pasang, Koto Tengah</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
14	<i>Kasang, Batang Anai</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
15	<i>Lubuk Buaya, Koto Tengah</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
16	<i>Pasar Lubuk Buaya</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
17	<i>Masjid Raya Al-Azhar</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
18	<i>Adinegoro, Desa Lubuk buaya, Koto Tengah</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi
19	<i>Simpang Tiga Jl. Jambu Air, Bukit tinggi</i>	1	1	Preservasi Jalan Kota Padang Dan Kota Bukittinggi	Tidak ada paket khusus blackspot	Diakomodir melalui kegiatan preservasi

3.2.5. Capaian Kemantapan Jalan Nasional TA 2024

Capaian kondisi kemantapan jalan nasional Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat setelah dilaksanakan kegiatan – kegiatan ditahun 2023 ini adalah sebesar 92,97%.

Tabel 3.6 Capaian Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	BALAI / SATKER / PPK	PANJANG RUAS (Km)	TARGET AWAL									CAPAIAN AKHIR TA. 2024 (SEMESTER 2 TAHUN 2024)								
			NILAI			KONDISI JALAN				MANTAP		NILAI			KONDISI JALAN				MANTAP	
			IRI	PCI	KPI FINAL	BAIK	SEDANG	R.RINGAN	R.BERAT	PANJANG (Km)	%	IRI	PCI	KPI FINAL	BAIK	SEDANG	R.RINGAN	R.BERAT	PANJANG (Km)	%
BPJN SUMATERA BARAT		1423,40	2,94	2,30	2,78	526,22	797,16	85,54	14,46	1323,38	92,97%	2,92	2,38	2,82	581,67	723,78	94,84	23,12	1305,44	91,71%
PROV.SUMATERA BARAT		1423,40	2,94	2,30	2,78	526,22	797,16	85,54	14,46	1323,38	92,97%	2,92	2,38	2,82	581,67	723,78	94,84	23,12	1305,44	91,71%
I	SATKER PJJN WILAYAH I	674,57	2,83	2,24	2,68	287,33	342,67	32,71	11,85	630,00	93,39%	2,82	2,49	2,78	312,71	310,68	32,22	20,51	623,39	92,20%
1	PPK 1.1	117,11	2,85	2,21	2,71	36,50	78,6	1,9	0,11	115,10	98,28%	2,86	2,50	2,83	40,59	75,07	2,80	0,21	115,65	97,47%
2	PPK 1.2	105,06	3,01	2,14	2,75	31,24	70,1	3,62	0,1	101,34	96,46%	3,16	2,45	3,03	24,94	72,76	7,36	0,00	97,70	92,99%
3	PPK 1.3	140,72	2,80	2,14	2,60	55,91	81,65	3,16	0	137,56	97,75%	2,74	2,44	2,63	63,40	72,26	5,06	0,00	135,66	96,40%
4	PPK 1.4	133,98	2,57	2,19	2,52	69,50	64,18	0,3	0	133,68	99,78%	2,53	2,25	2,55	77,82	54,26	1,80	0,10	132,08	98,58%
5	PPK 1.5	100,03	2,38	1,62	2,21	70,99	28,14	0,9	0	99,13	99,10%	2,18	2,07	2,22	82,79	17,24	0,00	0,00	100,03	100,00%
6	PPK 1.6	77,67	3,65	3,51	3,58	23,19	20	22,83	11,64	43,19	55,61%	3,76	3,58	3,75	23,17	19,10	15,20	20,20	42,27	54,42%
II	SATKER PJJN WILAYAH II	714,02	3,05	2,36	2,89	223,66	435,61	52,13	2,61	659,27	92,33%	3,03	2,29	2,87	252,59	395,56	61,71	2,61	648,14	90,97%
1	PPK 2.1	116,02	3,17	2,423863	2,95	23,7	86,86	5,46	0	23,70	20,43%	3,16	2,24	2,92	26,05	80,66	7,76	0,00	106,71	93,22%
2	PPK 2.2	165,97	3,26	2,56	3,10	32,35	117,49	15,72	0,4	32,35	19,49%	3,26	2,35	3,05	38,68	109,87	17,22	0,20	148,55	89,51%
3	PPK 2.3	124,31	2,94	2,37	2,85	46,41	68,4	9,4	0,1	46,41	37,33%	3,03	2,40	2,93	43,27	68,44	12,50	0,10	111,71	89,87%
4	PPK 2.4	146,88	2,50	1,62	2,32	88,10	57,38	1,4	0	88,10	59,98%	2,44	1,91	2,35	96,76	47,82	2,30	0,00	144,58	98,43%
5	PPK 2.5	160,84	3,35	2,79	3,20	33,1	105,48	20,15	2,11	33,10	20,58%	3,24	2,55	3,10	47,82	88,77	21,94	2,31	136,59	84,92%
III	SATKER SKPD	34,81	2,70	2,09	2,55	15,23	18,88	0,70	0,00	34,11	97,99%	2,70	2,03	2,56	16,38	17,53	0,90	0,00	33,91	97,41%
1	PPK SKPD	34,81	2,70	2,09	2,55	15,23	18,88	0,70	0,00	34,11	97,99%	2,70	2,03	2,56	16,38	17,53	0,90	0,00	33,91	97,41%

3.2.6. Perbandingan Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Akhir) dan Realisasi Kinerja TA. 2024

Tabel 3.7 Perbandingan Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Akhir) dan Realisasi Kinerja TA. 2024

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
1	RBC 006 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP	Km	19,10	19,10	19,10	100,00	100,00	
	a. Pembangunan Jalan	Km	19,10	19,10	19,10	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km	19,10	19,10	19,10	100,00	100,00	
2	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi ProPN	Km	7,47	7,47	7,47	100,00	100,00	
	a. Pembangunan Jalan	Km	7,47	7,47	7,47	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km	7,47	7,47	7,47	100,00	100,00	
3	RBC 001 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Km	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1 Paket Diskresi (Development Of New Tunnels Alignment In Payakumbuh - Pangkalan Toll Road) belum mendapat arahan pimpinan
	a. Pembangunan Terowongan	Km	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1 Paket Diskresi (Development Of New Tunnels Alignment In Payakumbuh - Pangkalan Toll Road) belum mendapat arahan pimpinan

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
4	CBC 002 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	1,60	1,60	1,60	100,00	100,00	
	a. Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	1,60	1,60	1,60	100,00	100,00	
5	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M	156,00	156,00	154,53	99,06	99,06	
	a. Pembangunan Jembatan Gantung	M	156,00	156,00	154,53	99,06	99,06	Terdapat 1 Paket Masa Denda (RPATA)
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
6	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	1315,70	1315,70	1315,70	100,00	100,00	
7	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya	Km	0,0001	0,0001	0,0001	100,00	100,00	
8	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi Rehabilitasi Jalan	Km	46,25	46,25	46,25	100,00	100,00	
	a. Pemeliharaan Preventif	Km	2,60	2,60	2,60	100,00	100,00	
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	Km	10,10	10,10	10,10	100,00	100,00	
	c. Rehabilitasi Mayor Jalan	Km	11,30	11,30	11,30	100,00	100,00	
	d. Rekonstruksi Jalan	Km	16,36	16,36	16,36	100,00	100,00	
	e. Penanganan Longsor	Km	5,89	5,89	5,89	100,00	100,00	
9	CDC 004 Penanganan Drainase Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	0,0001	0,0001	0,0001	100,00	100,00	
	- Penanganan Drainase	Km	0,0001	0,0001	0,0001	100,00	100,00	
10	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya	M	15587,60	15587,60	15587,60	100,00	100,00	

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
11	CDF 002 Preservasi Jembatan	M	2756,10	2756,10	2756,10	100,00	100,00	
	a. Rehabilitasi Jembatan	M	1087,10	1087,10	1087,10	100,00	100,00	
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	1669,00	1669,00	1669,00	100,00	100,00	
12	CDF 003 Penggantian Jembatan	M	63,60	63,60	63,60	100,00	100,00	
	a. Penggantian Jembatan	M	63,60	63,60	63,60	100,00	100,00	
13	RDF 006 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP	M	17,00	17,00	16,33	96,05	96,05	
	c. Penggantian Jembatan	M	17,00	17,00	16,33	96,05	96,05	Terdapat 1 Paket Masa Denda (RPATA)
14	CDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km	9,30	9,30	9,06	97,43	97,43	
	e. Peningkatan Struktur ke Perkerasan	Km	9,30	9,30	9,06	97,43	97,43	Terdapat 1 Paket Masa Denda (RPATA)
15	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
16	CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional								Tidak mendapatkan anggaran pada RO Penanganan Blackspot, sehingga Penanganan Blackspot diakomodir melalui kegiatan Preservasi
Indikator Kinerja Kegiatan								
	CBC 022 Penanganan Blackspot	Km	-	-	-	-	-	Tidak mendapatkan anggaran pada RO Penanganan Blackspot, sehingga Penanganan Blackspot diakomodir melalui kegiatan Preservasi

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR								
Indikator Kinerja Kegiatan								
17	EBA 956 Layanan BMN	Layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
18	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
19	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
20	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00	
21	EBB 971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	

3.2.6.1 Analisa dan Manfaat

Di dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, UPT Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat mengalami keberhasilan maupun hambatan pada berbagai output yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Analisa manfaat, kendala yang dihadapi, solusi serta penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja output yang telah diperjanjikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. RBC 006 - Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP

Tabel 3.8 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output RBC 006

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
1	RBC 006 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP	Km	19,10	19,10	19,10	100,00	100,00	

- Penjelasan:
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP) ditargetkan 19,10 km dan terealisasi 100 %.
- Manfaat:
Terbangunnya Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan, sehingga dapat dinikmati masyarakat pengguna jalan di Kepulauan Mentawai.
- Kendala:
-
- Alternatif Solusi:
-
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:
-
- Dokumentasi:



2. RBC 005 - Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)

Tabel 3.9 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output RBC 005

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
2	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi ProPN	Km	7,47	7,47	7,47	100,00	100,00	

- **Penjelasan:**
Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) ditargetkan 7,47 km dan terealisasi 100 %.
- **Manfaat:**
Terbangunnya Akses Jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang, sehingga bermanfaat dalam bidang transportasi barang/jasa khususnya dan masyarakat pengguna jalan yang bermukim di sekitar wilayah tersebut secara umumnya, yang sebelum jalan terbangun sarana transportasi masyarakat dulunya adalah rakit dan sampan.
- **Kendala:**
Pelabuhan Teluk Tapang belum beroperasi karena baru terbangun dermaganya saja. Untuk prasarana lainnya belum terbangun. Status Jalan eksisting merupakan jalan daerah (Pemprov Sumbar), terdapat grade yang tidak memenuhi standar.
- **Alternatif Solusi:**
Untuk grade yang tidak memenuhi standar telah dilaksanakan penurunan grade, namun belum sampai ke perkerasan. Akan dibahas program Pembangunan Jalan sisa pekerjaan perkerasan yang belum terlaksana. Untuk Status Jalan akan dilakukan upgrade status dari Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional karena merupakan Jalan akses simpul transportasi. Untuk pelabuhannya, diharapkan Kemenhub dan Pemprov Sumbar bisa membangun prasarana Pelabuhan (gedung dan lainnya) agar segera fungsional/ bisa beroperasi.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:**
-
- **Dokumentasi :**



3. RBC 001 - Pembangunan Jalan Bebas Hambatan

Tabel 3.10 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output RBC 001

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
3	RBC 001 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Km	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1 Paket Diskresi (Development Of New Tunnels Alignment In Payakumbuh - Pangkalan Toll Road) belum mendapat arahan pimpinan

- Penjelasan:
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan ditargetkan 0 km/kegiatan dan terealisasi 0 Km, kinerja 100%.
- Manfaat :
-
- Kendala :
Paket **Development Of New Tunnels Alignment In Payakumbuh - Pangkalan Toll Road** pada RO Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan **komponen Pembangunan Terowongan** merupakan tagging pagu (paket diskresi) yang belum bisa dilaksanakan karena belum ada arahan pimpinan terkait program/kegiatan Pembangunan Terowongan pada Jalan Tol di Provinsi Sumatera Barat
- Alternatif Solusi :
Pagu blokir
- Analisis :
-
- Dokumentasi :
-

4. CBC 002 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur

Tabel 3.11 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CBC 002

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
4	CBC 002 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	1,60	1,60	1,60	100,00	100,00	

- **Penjelasan:**
Pelebaran Jalan Menambah Lajur ditargetkan 1,6 km dan terealisasi 100%.
- **Manfaat:**
Terbangunnya Pelebaran Jalan Menambah Lajur, sehingga mengurangi kepadatan dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh sehingga dapat dinikmati pengguna jalan.
- **Kendala:**
-
- **Alternatif Solusi:**
-
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:**
-
- **Dokumentasi:**



5. CBF 024 - Dukungan Penanganan Jembatan Daerah

Tabel 3.12 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CBF 024

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
5	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M	156,00	156,00	154,53	99,06	99,06	1 Paket Masa Denda (RPATA)

- **Penjelasan:**
Dukungan Penanganan Jembatan Daerah ditargetkan 156 m dan terealisasi 99,06 % hingga 31 Desember 2024, karena terdapat 1 paket Pembangunan Jembatan Gantung Siguntur yang dikerjakan dalam masa denda.
- **Manfaat:**

Terbangunnya Jembatan Gantung, sehingga dapat dinikmati masyarakat di sekitar Jembatan Gantung yang dibangun untuk menyeberangi sungai dengan aman dan nyaman, sehingga meningkatkan nilai ekonominya dan menghemat waktu, yang sebelumnya harus menyeberang menggunakan rakit, sampan dan sejenisnya atau ada beberapa lokasi pembangunan jembatan gantung yang mempunyai alternatif menempuh jalan yang jauh untuk melewati jembatan permanen.

- **Kendala:**
Paket Pembangunan Jembatan Gantung Siguntur yang dikerjakan dalam masa denda, hal ini disebabkan terkendala batu karang saat pengeboran untuk ABT.
- **Alternatif Solusi:**
Pekerjaan dilaksanakan pada masa denda dan direncanakan akan selesai pada tanggal 25 Januari 2025.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:**
-
- **Dokumentasi:**



6. CDC 012 - Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya

Tabel 3.13 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CDC 012

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
6	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya	Km	0,0001	0,0001	0,0001	100,00	100,00	

- **Penjelasan:**
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya ditargetkan 0,00 km (12 paket/ kegiatan) dan terealisasi 100 %.
- **Manfaat:**

Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya, sehingga dapat dinikmati masyarakat pengguna jalan, dan terserapnya tenaga kerja lokal/setempat melalui kegiatan padat karya, sehingga membantu perekonomian masyarakat.

- Kendala:
 -
- Alternatif Solusi:
 -
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:
 -
- Dokumentasi:



7. CDC 001 - Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

Tabel 3.14 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CDC 001

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
7	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	1315,70	1315,70	1315,70	100,00	100,00	

- Penjelasan:

Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan ditargetkan 1315,70 km dan terealisasi 100 %.
- Manfaat:

Terpeliharanya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan, sehingga dapat dinikmati masyarakat pengguna jalan.
- Kendala:
 -
- Alternatif Solusi:
 -
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:
 -

- Dokumentasi:



8. CDC 002 - Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

Tabel 3.15 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CDC 002

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
8	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi Rehabilitasi Jalan	Km	46,25	46,25	46,25	100,00	100,00	

- Penjelasan:

Preservasi Rekonstruksi Rehabilitasi Jalan ditargetkan 46,25 km dan terealisasi 100 %.

- Manfaat:

Terlaksananya Preservasi Rekonstruksi Rehabilitasi Jalan, sehingga kondisi jalan yang rusak dikembalikan menjadi kondisi baik, sehingga dapat dinikmati masyarakat pengguna jalan, mengurangi risiko kecelakaan, aman dan nyaman untuk dilewati dan menghemat waktu tempuh.

- Kendala:

-

- Alternatif Solusi:

-

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:

-

- Dokumentasi:



9. CDC 004 - Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan

Tabel 3.16 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CDC 004

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
9	CDC 004 Penanganan Drainase Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	0,0001	0,0001	0,0001	100,00	100,00	6 Paket

- **Penjelasan:**
Penanganan Drainase Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan ditargetkan 0,00 km (6 paket/ kegiatan) dan terealisasi 100 %.
- **Manfaat:**
Terlaksananya Penanganan Drainase jalan, sehingga jalan dengan kondisi baik dapat terjaga dengan adanya drainase tersebut karena air saat kondisi hujan dapat tertampung di drainase disalurkan ke outlite atau ke sungai terdekat dan tidak menggenang di badan jalan, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan, aman dan nyaman untuk dilewati dan menghemat waktu tempuh pengguna jalan.
- **Kendala:**
-
- **Alternatif Solusi:**
-
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:**
-
- **Dokumentasi:**



10. CDF 010 - Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya

Tabel 3.17 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CDF 010

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
10	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya	M	15587,60	15587,60	15587,60	100,00	100,00	

- **Penjelasan:**
Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya ditargetkan 15587,60 m dan terealisasi 100 %.
- **Manfaat:**
Terpeliharanya Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya, sehingga dapat dinikmati masyarakat pengguna jalan, dan terserapnya tenaga kerja lokal/setempat melalui kegiatan padat karya, sehingga membantu perekonomian masyarakat.
- **Kendala:**
-
- **Alternatif Solusi:**
-
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:**
-
- **Dokumentasi:**



11. CDF 002 - Preservasi Jembatan

Tabel 3.18 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CDF 002

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
58	CDF 002 Preservasi Jembatan	M	1147,00	1147,00	1147,00	100,00	100,00	

- **Penjelasan:**
Preservasi Jembatan ditargetkan 2756,10 km dan terealisasi 100 %.
- **Manfaat:**
Terlaksananya Preservasi Jembatan, sehingga kondisi jembatan terjaga dengan kondisi baik, sehingga dapat meminimalisir kerusakan terhadap struktur jembatan, umur rencana jembatan dapat tercapai, mengurangi risiko kecelakaan, tetap aman dan nyaman untuk dilewati.
- **Kendala:**
-

- Alternatif Solusi:
 -
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:
 -
- Dokumentasi:



12. CDF 003 - Penggantian Jembatan

Tabel 3.19 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CDF 003

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
12	CDF 003 Penggantian Jembatan	M	63,60	63,60	63,60	100,00	100,00	

- Penjelasan:

Penggantian Jembatan ditargetkan 63,60 m dan terealisasi 100 %.
- Manfaat:

Terbangunnya Penggantian Jembatan, sehingga dapat dinikmati masyarakat pengguna jalan, jembatan lama dengan nilai kondisi kerusakan NK-4 (rusak berat) atau NK-5 (runtuh), setelah dibangun jembatan pengganti, nilai kondisi jembatan baru tersebut yaitu NK-1, sehingga kembali aman dan nyaman untuk dilewati, dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menghemat waktu tempuh pengguna jalan yang sebelumnya mungkin sudah diberlakukan pembatasan jumlah kendaraan dengan sistem satu arah/ buka tutup.
- Kendala:
 -
- Alternatif Solusi:
 -
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:
 -

- Dokumentasi:



13. RDF 006 - Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP

Tabel 3.20 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output RDF 006

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
13	RDF 006 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP	M	17,00	17,00	16,33	96,05	96,05	Masa Denda (RPATA)

- Penjelasan:

Penggantian Jembatan pada RO Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP ditargetkan 17 m dan terealisasi 96,05 %, yaitu 1 paket Penggantian Jembatan Sagitsi Cs yang dikerjakan dalam masa denda.

- Manfaat:

Terbangunnya Penggantian Jembatan pada RO Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan MP, sehingga dapat dinikmati masyarakat pengguna jalan di Kepulauan Mentawai, jembatan lama (pada umumnya jembatan struktur kayu) digantikan Jembatan Permanen, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan, aman dan nyaman untuk dilewati dan menghemat waktu tempuh pengguna jalan.

- Kendala:

Paket Penggantian Jembatan Sagitsi Cs terhambat akibat cuaca ekstrim, terlambatnya material samapai ke lokasi proyek (Kep. Mentawai), *cashflow* penyedia jasa.

- Alternatif Solusi:

Paket Penggantian Jembatan Sagitsi Cs telah mendapat beberapa evaluasi, termasuk SCM, dan setelah melewati masa kontrak dikerjakan dalam masa denda.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:

-

- Dokumentasi:



14. CDC 023 - Dukungan Penanganan Jalan Daerah

Tabel 3.21 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CDC 023

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
14	CDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km	9,30	9,30	9,06	97,43	97,43	Masa Denda (RPATA)

- Penjelasan:

Dukungan Penanganan Jalan Daerah ditargetkan 9,30 km dan terealisasi 84,09 %, terdapat 1 paket Preservasi Jalan Rimbo Data - Kapujan yang dikerjakan dalam masa denda.

- Manfaat:

Dengan adanya program dukungan penanganan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023 diharapkan agar dapat menangani jalan daerah (jalan non nasional) yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah. Program Inpres Jalan Daerah (IJD) sangat membantu daerah dalam memperbaiki/ meningkatkan jalan daerah, karena anggaran daerah yang terbatas, sehingga dapat dinikmati masyarakat pengguna jalan dengan aman dan nyaman, dan meningkatkan nilai ekonomisnya serta menghemat waktu tempuh karena merupakan jalan alternatif yang menghubungkan 2 Kabupaten, menghubungkan Kecamatan, yang sebelumnya harus melalui rute yang jauh, misalnya jika melalui Jalan Nasional.

- Kendala:

Paket Preservasi Jalan Rimbo Data - Kapujan per 31 Desember 2024, mengalami keterlambatan sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai masa pelaksanaan yang telah ditetapkan akibat akumulasi permasalahan di lapangan, yaitu :

- Waktu pelaksanaan yang cukup singkat 50 (lima puluh) Hari Kalender akibat program IJD baru terealisasi ke DIPA pada bulan Oktober 2024,

b. Tingginya intensitas hujan pada bulan November sampai dengan Desember Tahun 2024 yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. Pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam masa denda dan telah selesai 100% pada tanggal 09 Januari 2025.

- Alternatif Solusi:

Tindak lanjut yang dilakukan pada paket Preservasi Jalan Rimbo Data - Kapujan adalah memonitoring pekerjaan dimana pekerjaan tersebut bekerja dalam masa denda dan mengingstruksikan percepatan pekerjaan. Paket telah selesai pada tanggal 09 Januari 2025.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:

-

- Dokumentasi:



15. CBR 001 - Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan

Tabel 3.22 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CBR 001

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
15	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	

- **Penjelasan:**
Jumlah Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan ditargetkan 10 dokumen dan terealisasi 100 %.
- **Manfaat:**
Terlaksananya Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan di lingkungan BPJN Sumatera Barat.
- **Kendala:**
-
- **Alternatif Solusi:**
-
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:**
-
- **Dokumentasi:**
-

16. CBR 002 - Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik

Tabel 3.23 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output CBR 002

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
16	CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	

- **Penjelasan:**
Jumlah Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik ditargetkan 2 dokumen dan terealisasi 100 %.
- **Manfaat:**
Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik di lingkungan BPJN Sumatera Barat.
- **Kendala:**
-
- **Alternatif Solusi:**

-
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:

-

- Dokumentasi:

-

17. EBA 956 – Layanan BMN

Tabel 3.24 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output EBA 956

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
17	EBA 956 Layanan BMN	Layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	

- Penjelasan:

Jumlah Layanan BMN ditargetkan 1 layanan dan terealisasi 100 %.

- Manfaat:

Terlaksananya Layanan BMN di lingkungan BPJN Sumatera Barat.

- Kendala:

-

- Alternatif Solusi:

-

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:

-

- Dokumentasi:

-

18. EBA 962 – Layanan Umum

Tabel 3.25 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output EBA 962

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
18	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	

- Penjelasan:

Jumlah Layanan Umum ditargetkan 5 layanan dan terealisasi 100 %

- Manfaat:

Terlaksananya Layanan Umum di lingkungan BPJN Sumatera Barat.

- Kendala:

-

- Alternatif Solusi:
 -
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:
 -
- Dokumentasi:

19. EBA 994 – Layanan Perkantoran

Tabel 3.26 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output EBA 994

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
19	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	

- Penjelasan:
 - Jumlah Layanan Perkantoran ditargetkan 5 layanan dan terealisasi 100 %.
- Manfaat:
 - Terlaksananya Jumlah Layanan Perkantoran di lingkungan BPJN Sumbar.
- Kendala:
 -
- Alternatif Solusi:
 -
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:
 -
- Dokumentasi:
 -

20. EBB 951 – Layanan Sarana Internal

Tabel 3.27 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output EBB 951

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
20	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00	

- Penjelasan:
 - Jumlah Layanan Sarana Internal ditargetkan 69 unit dan terealisasi 100 %.
- Manfaat:
 - Terlaksananya Layanan Sarana Internal di lingkungan BPJN Sumbar.
- Kendala:

-
- Alternatif Solusi:
 -
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:
 -
- Dokumentasi:
 -

21. EBB 971 – Layanan Prasarana Internal

Tabel 3.28 Perbandingan Volume, Anggaran dan Presentase Rincian Output EBB 971

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
21	EBB 971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	

- Penjelasan:

Jumlah Layanan Prasarana Internal ditargetkan 1 unit dan terealisasi 100%.
- Manfaat:

Terlaksananya Layanan Prasarana Internal di lingkungan BPJN Sumbar.
- Kendala:
 -
- Alternatif Solusi:
 -
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja:
 -
- Dokumentasi:
 -

3.3 Perbandingan Kinerja Organisasi

3.3.1 Membandingkan Antara Capaian Kinerja *Outcome* Tahun 2024 dengan beberapa Tahun Terakhir (2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024)

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Outcome Tahun 2020 s/d 2024

NO	IKSP	SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)												
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional																	
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	76,00	76,00	100,00	76,00	76,00	100,00	76,00	76,00	100,00	76,00	76,00	100,00	76,00	76,00	100,00
2	Rating Kondisi Jalan Nasional	Nilai	2,75	2,85	96,49	2,75	2,81	97,86	2,76	2,79	99,28	2,80	2,78	100,72	2,82	2,82	100,00
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional	Nilai	-	-	-	-	-	-	4,5	4,51	91,57	4,13	4,16	99,28	3,77	3,77	100,00
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya																	
4	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.3.2 Membandingkan Antara Capaian Kinerja Outcome dengan beberapa Tahun Terakhir

Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

Tabel 3.300 Capaian Kinerja Outcome Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

No	Balai / Satker / Titik Simpul (Nodes)	Tahun Penanganan				
		2020	2021	2022	2023	2024
BPJN Sumatera Barat						
Provinsi Sumatera Barat						
Satker PJJN I Sumatera Barat						
1	<i>Teluk Tapang</i>			1	1	1

Rating Keselamatan Jalan Nasional

Tabel 3.311 Capaian Kinerja Outcome Rating Keselamatan Jalan Nasional

No	Balai / Satker / Titik Blackspot	Tahun Penanganan				
		2020	2021	2022	2023	2024
BPJN Sumatera Barat						
Provinsi Sumatera Barat						
Satker PJJN I Sumatera Barat						
1	<i>Pasar Lubuk Alung</i>			1		
2	<i>MAN Lubuk Alung - RSUD Padang Pariaman (MAN Lubuk Alung)</i>			1		
3	<i>Raya Padang – Bukit tinggi KM 44 (Raya Padang – Bukit tinggi KM 41+300)</i>			1		
4	<i>Simpang Tiga Kampung Lapai</i>			1		
5	<i>Guguak, 2x11 Kayu Tanam</i>			1		
6	<i>Cingkariang, Banuhampu</i>			1		
7	<i>Tabek Panjang, Baso</i>			1		
8	<i>SDN 19 Ujuang Guguak Jorong Beruah</i>			1		
9	<i>Batu Hampa, Akaliburu</i>			1		
10	<i>Simpang Tiga Jl. Diponegoro</i>			1		
11	<i>Masjid Nurul Ihsan, Panti</i>			1		
12	<i>Simpang Tiga Jl. Jambu Air, Bukit tinggi</i>			1		
13	<i>Simpang IAIN Bukit Tinggi</i>			1		

No	Balai / Satker / Titik Blackspot	Tahun Penanganan				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Kantor Camat Ampek Angkek			1		
15	Sungai Buluh 01, Batang Anai				1	
16	Masjid Buayan, Batang Anal				1	
17	Simpang Tiga Lubuk Alung				1	
18	Stikes Nan Tongga, Lubuk Alung				1	
19	Sungai buluh 02, Batang Anai				1	
20	Pasar Usang, Sungai Buluh, Batang Anai				1	
21	Tikungan Masjid Pungguang Kasiak Balibi				1	
22	Tikungan Masjid Tawakal, Taluak				1	
23	SMPN 1 Sintoga,				1	
24	Simpang 3 Jl. Pelambayan				1	
Satker PJN II Sumatera Barat						
1	Asrama TNI AD Cengkeh, Padang			1		
2	Simp 3 Jl Cupak Tengah, Bandar Buat			1		
3	Simpang 3 Akses PPI			1		
4	Sitinjau Lauik, Indarung			1		
5	Koto Gadang Guguak, Gn. Talang, Solok			1		
6	Simpang 3 Jl By Pass			1		
7	Puskesmas Ikua Koto, By Pass II					1
8	Simpang Kampung Lalang, By Pass					1
9	Tlk. Kabung Utara, Bungus					1
10	Duku, Koto XI Tarusan					1
11	Terminal Sago Salido, Painan					1
12	Kapuh, Koto XI Tarusan,					1
13	Simpang Jl. Tanah Galak, Koto XI Tarusan					1
Satker Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat						
1	Simpang Kalumpang, Koto Tengah					1
2	Seputaran Polsek Padang Utara					1

No	Balai / Satker / Titik Blackspot	Tahun Penanganan				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	<i>STIE Perdagangan, Perupuk Tabing</i>					1
4	<i>Milagros Padang, Lubuk Buaya</i>					1
5	<i>Stasiun Tabing, Bungo Pasang</i>					1
6	<i>Bungo Pasang, Koto angh</i>					1
7	<i>Kasang, Batang Anai</i>					1
8	<i>Lubuk Buaya, Koto Tengah,</i>					1
9	<i>Pasar Lubuk Buaya</i>					1
10	<i>Masjid Raya Al- Azhar</i>					1
11	<i>Adinegoro, Desa Lubuk buaya, Koto Tengah</i>					1

3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2024 dengan beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.322 Perbandingan Capaian Kinerja Output TA. 2020 s/d 2024 per output

NO	SASARAN PROGRAM/ IKSP/IKK/OUTPUT/RO		SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional																		
IKSP: Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional																		
Indikator Kinerja Kegiatan																		
1	Output Renstra	Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun	Km							16,31	16,31	100,00	31,55	29,89	94,74	19,10	19,10	100,00
	CBC 001	Pembangunan Jalan	Km	2,00	2,00	100,00	0,0001	0,0001	100,00									
	RBC 006	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP	Km							16,31	16,31	100,00	31,55	29,89	94,74	19,10	19,10	100,00
2		Panjang Jalan yang mendukung kawasan prioritas yang dibangun	Km															
	CBC 009	Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)(PEN)	Km				0,0001	0,0001	100,00									
3		Panjang Jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan dukungan pemerintah	Km							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	RBC 001	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Km							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4		Panjang Jalan akses simpul transportasi yang dibangun	Km				9,60	8,90	92,71	7,00	7,00	100,00	7,47	7,47	100,00	7,47	7,47	100,00

NO	SASARAN PROGRAM/ IKSP/IKK/OUTPUT/RO		SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
	RBC 005	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km				9,60	8,90	92,71	7,00	7,00	100,00	7,47	7,47	100,00	7,47	7,47	100,00
5		Panjang Jembatan dibangun	M	200,00	179,14	89,57	84,00	84,00	100,00	42,00	42,00	100,00						
	CBF 001	Pembangunan Jembatan	M	200,00	179,14	89,57	84,00	84,00	100,00	42,00	42,00	100,00						
	CBF 010	Pembangunan Jembatan (PEN)	M				0,0001	0,0001	100,00									
6		Dukungan Jalan Daerah	Km										31,77	31,77	100,00	9,30	9,06	97,42
	CDC 023	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km										31,77	31,77	100,00	9,30	9,06	97,42
7		Dukungan Jembatan Daerah	M										380,00	380,00	100,00	156,00	154,53	99,06
	CBF 024	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M										380,00	380,00	100,00	156,00	154,53	99,06
8		Panjang jalan yang terpelihara	Km	1348,41	1149,64	85,26	1388,32	1388,32	100,00	1366,80	1366,80	100,00	1272,56	1272,56	100,00	1315,70	1315,70	100,00
	CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	1348,41	1149,64	85,26	1350,32	1350,32	100,00							1315,70	1315,70	100,00
	CDC 012	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya	Km							917,81	917,81	100,00	1212,35	1212,35	100,00	0,00	0,00	100,00
	CDC 013	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	Km				38,00	38,00	100,00									
	RDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km										60,21	60,21	100,00			
	RDC 009	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Km							448,99	448,99	100,00						

NO	SASARAN PROGRAM/ IKSP/IKK/OUTPUT/RO		SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REAL	KINERJA (%)												
9		Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	247,96	236,97	95,57	161,31	161,20	99,93	67,81	67,81	100,00	85,03	85,03	100,00	47,85	47,85	100,00
	CBC 002	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	4,40	4,40	100,00										1,60	1,60	100,00
	CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	66,84	55,85		14,08	13,97	99,22	33,37	33,37	100,00	67,38	67,38	100,00	46,25	46,25	100,00
	CDC 013	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (Padat Karya)	Km									0,0001	0,0001	100,00				
	CDC 003	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Km	5,00	5,00	100,00												
	CDC 017	Pelebaran Jalan Menuju Standar (PEN)	Km				0,0001	0,0001	100,00									
	CDC 004	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	171,72	171,72	100,00				0,0001	0,0001	100,00				0,0001	0,0001	100,00
	CDC 015	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya)	Km									0,0001	0,0001	100,00				
	CDC 018	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Km				0,35	0,35	100,00									
	CDC 020	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Km				103,23	103,23	100,00									
	CDC 015	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	Km				10,57	10,57	100,00									

NO	SASARAN PROGRAM/ IKSP/IKK/OUTPUT/RO		SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
	CDC 016	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru (PEN)	Km				33,08	33,08	100,00									
	RDC 003	Jalan Strategis (ProPN)	Km							5,85	5,85	100,00	17,65	17,65	100,00			
	RDC 005	Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km							23,59	23,59	100,00						
	RDC 006	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Km							5,00	5,00	100,00						
11		Panjang jembatan yang dipelihara	M	15136,40	13111,65	86,62	16225,59	16225,59	100,00	16049,95	16049,95	100,00	12077,05	12077,05	100,00	15587,60	15587,60	100,00
	CDF 001	Preservasi Rutin Jembatan	M	15136,40	13111,65	86,62												
	CDF 010	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	M							9798,85	9798,85	100,00	10494,45	10494,45	100,00	15587,60	15587,60	100,00
	CDF 014	Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	M				16225,59	16225,59	100,00									
	RDF 001	Preservasi Rutin Jembatan	M										1582,60	1582,60	100,00			
	RDF 007	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	M							6251,10	6251,10	100,00						
12		Panjang jembatan yang ditingkatkan	M	917,80	796,31	86,76	1650,45	1650,45	100,00	2333,00	2333,00	100,00	6371,80	6371,80	100,00	2836,70	2836,03	99,98
	CDF 002	Preservasi Jembatan	M	797,90	722,21	90,51	1437,80	1437,80	100,00	1147,00	1147,00	100,00	594,70	594,70	100,00	2756,10	2756,10	100,00
	CDF 011	Preservasi Jembatan (Padat Karya)	M										5570,00	5570,00	100,00			
	CDF 015	Preservasi Jembatan (PEN)	M				128,30	128,30	100,00									

NO	SASARAN PROGRAM/ IKSP/IKK/OUTPUT/RO		SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
	CDF 003	Penggantian Jembatan	M	119,90	74,10	61,80	84,35	84,35	100,00	116,40	116,40	100,00	61,00	61,00	100,00	63,60	63,60	100,00
	RDF 003	Jalan Strategis (ProPN)	M							237,20	237,20	100,00	77,70	77,70	100,00			
	RDF 005	Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	M							816,00	816,00	100,00						
	RDF 006	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	M							16,40	16,40	100,00	68,40	68,40	100,00	17,00	16,33	96,05
10		Mendukung Keselamatan	Km										0,0001	0,0001	100,00			
	CBC 022	Penanganan Blackspot	Km										0,0001	0,0001	100,00			
13		Non Fisik		20,00	20,00	100,00	78,00	78,00	100,00	43,00	43,00	100,00	99,00	99,00	100,00	93,00	93,00	100,00
	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dok	5,00	5,00	100,00	10,00	10,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	10,00	10,00	100,00
	CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dok				2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00
	EBA 956	Layanan BMN	Layanan							2,00	2,00	100,00	3,00	3,00	100,00	1,00	1,00	100,00
	EBA 962	Layanan Umum	Layanan							5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00
	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00
	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	3,00	3,00	100,00	56,00	56,00	100,00	24,00	24,00	100,00	72,00	72,00	100,00	69,00	69,00	100,00
	EBB 971	Layanan Prasarana Internal	Unit	3,00	3,00	100,00	1,00	1,00	100,00				6,00	6,00	100,00	1,00	1,00	100,00

NO	SASARAN PROGRAM/ IKSP/IKK/OUTPUT/RO		SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REAL	KINERJA (%)												
	EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00									
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA				93,84			99,66			95,83			95,95			99,63		

3.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah (Kumulatif 2022-2024) yang terdapat dalam dokumen Renstra UPT dan Unit Kerja

Tabel 3.333 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah (Kumulatif 2022-2024) yang terdapat dalam dokumen Renstra UPT dan Unit Kerja

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024			CAPAIAN KUMULATIF
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional											
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional											
Indikator Kinerja Kegiatan											
1	Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun			2,00	0,0001	16,31	29,89		19,10	19,10	67,30
	CBC 001	Pembangunan Jalan	Km	2,00	0,0001						2,00
	RBC 006	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP)	Km			16,31	29,89		19,10	19,10	65,30
2	Panjang Jalan yang mendukung kawasan prioritas yang dibangun				0,0001						0,0001
	CBC 009	Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)(PEN)	Km		0,0001						0,0001
3	Panjang Jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan dukungan pemerintah		7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	RBC 001	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Km	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Panjang Jalan akses simpul transportasi yang dibangun		35,50		8,90	7,00	7,47	8,00	7,47	7,47	30,84

NO	OUTPUT		SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024			CAPAIAN KUMULATIF
					REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
	RBC 005	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km			8,90	7,00	7,47		7,47	7,47	30,84
5		Panjang Jembatan dibangun			179,14	84,00	42,00					305,14
	CBF 001	Pembangunan Jembatan	M		179,14	84,00	42,00					305,14
	CBF 010	Pembangunan Jembatan (PEN)	M			0,0001						0,0001
6		Panjang flyover dan undrerpass yang dibangun	M	1036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	374,03	0,00	0,00	0,00
	CBF 002	Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan	M		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7		Dukungan Jembatan Daerah	M					380,00		156,00	154,53	534,53
	CBF 024	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M					380,00		156,00	154,53	534,53
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional												
Indikator Kinerja Kegiatan												
8		Dukungan Jalan Daerah	Km					31,77		9,30	9,06	40,83
	CDC 023	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km					31,77		9,30	9,06	40,83
9		Panjang jalan yang terpelihara	Km	7244,05	1149,64	1388,32	1366,80	1272,56	1448,81	1315,70	1315,70	6493,02
	CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km		1149,64	1350,32	0,00	0,00		1315,70	1315,70	3815,66
	CDC 012	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Km		0,00	0,00	917,81	1212,35		0,0001	0,0001	2130,16

NO	OUTPUT		SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024			CAPAIAN KUMULATIF
					REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
	CDC 013	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	Km		0,00	38,00						38,00
	RDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km		0,00	0,00	0,00	60,21				60,21
	RDC 009	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Km		0,00	0,00	448,99	0,00				448,99
10		Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	413,91	236,97	161,20	67,81	85,03	188,11	47,85	47,85	598,86
	CBC 002	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km		4,40	0,00	0,00	0,00		1,60	1,60	6,00
	CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km		55,85	13,97	33,37	67,38		46,25	46,25	216,82
	CDC 013	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (Padat Karya)	Km		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	CDC 003	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Km		5,00	0,00	0,00	0,00				5,00
	CDC 017	Pelebaran Jalan Menuju Standar (PEN)	Km		0,00	0,00						0,00
	CDC 004	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km		171,72	0,00	0,00	0,00		0,0001	0,0001	171,72
	CDC 015	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya)	Km		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	CDC 018	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Km		0,00	0,35						0,35
	CDC 020	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Km		0,00	103,23						103,23
	CDC 015	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	Km		0,00	10,57						10,57

NO	OUTPUT		SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024			CAPAIAN KUMULATIF
					REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
	CDC 016	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru (PEN)	Km		0,00	33,08						33,08
	RDC 003	Jalan Strategis (ProPN)	Km		0,00	0,00	5,85	17,65				23,50
	RDC 005	Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km		0,00	0,00	23,59	0,00				23,59
	RDC 006	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Km		0,00	0,00	5,00	0,00				5,00
11		Panjang jembatan yang dipelihara	M	89762,70	13111,65	16225,59	16049,95	12077,05	17952,54	15587,60	15587,60	73051,84
	CDF 001	Preservasi Rutin Jembatan	M		13111,65	0,00	0,00	0,00				13111,65
	CDF 010	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	M		0,00	0,00	9798,85	10494,45		15587,60	15587,60	35880,90
	CDF 014	Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	M		0,00	16225,59						16225,59
	RDF 001	Preservasi Rutin Jembatan	M		0,00	0,00	0,00	1582,60				1582,60
	RDF 007	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	M		0,00	0,00	6251,10	0,00				6251,10
12		Panjang jembatan yang ditingkatkan	M	5993,30	796,31	1650,45	2333,00	6371,80	2184,00	2836,70	2836,03	13987,59
	CDF 002	Preservasi Jembatan	M		722,21	1437,80	1147,00	594,70		2756,10	2756,10	6657,81
	CDF 011	Preservasi Jembatan (Padat Karya)	M		0,00	0,00	0,00	5570,00				5570,00
	CDF 015	Preservasi Jembatan (PEN)	M		0,00	128,30						128,30
	CDF 003	Penggantian Jembatan	M		74,10	84,35	116,40	61,00		63,60	63,60	399,45
	RDF 003	Jalan Strategis (ProPN)	M		0,00	0,00	237,20	77,70				314,90

NO	OUTPUT		SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024			CAPAIAN KUMULATIF
					REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
	RDF 005	Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	M		0,00	0,00	816,00	0,00				816,00
	RDF 006	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	M		0,00	0,00	16,40	68,40		17,00	16,33	101,13
13		Non Fisik (Duknis)			5,00	12,00	8,00	8,00		12,00	12,00	45,00
	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dok		5,00	10,00	6,00	6,00		10,00	10,00	37,00
	CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dok		0,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	8,00
IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional												
Indikator Kinerja Kegiatan												
14		Mendukung Keselamatan		24,00				0,0001	9,00			0,0001
	CBC 022	Penanganan Blackspot	Km					0,0001				0,0001
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya												
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR												
Indikator Kinerja Kegiatan												
15		Non Fisik			20,00	78,00	43,00	99,00		93,00	93,00	333,00
	EBA 956	Layanan BMN	Layanan		0,00	0,00	2,00	3,00		1,00	1,00	6,00
	EBA 962	Layanan Umum	Layanan		0,00	0,00	5,00	5,00		5,00	5,00	15,00

NO	OUTPUT		SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024			CAPAIAN KUMULATIF
					REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan		4,00	4,00	4,00	5,00		5,00	5,00	22,00
	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit		3,00	56,00	24,00	72,00		69,00	69,00	224,00
	EBB 971	Layanan Prasarana Internal	Unit		3,00	1,00	0,00	6,00		1,00	1,00	11,00
	EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan		5,00	5,00	0,00					10,00

3.3.5 Membandingkan Realisasi Kinerja TA 2024 dengan UPT lain yang sejenis (*Benchmarking*)

Tabel 3.34 Sandingan Capaian IKSP Instansi Sejenis

NO	SP/IKSP	BPJN SUMATERA BARAT			BPJN RIAU		
		TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN
	Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
1	IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	76,00	76,00	100,00	69,70	69,70	100,00
2	IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional	2,82	2,82	100,00	2,78	2,78	100,00
3	IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional	3,77	3,77	100,00	2,53	2,53	100,00
	Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
4	IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja dari masing-masing Balai sama-sama 100%.

3.4. Realisasi Anggaran

3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Ditinjau dari aspek keuangan, dimana keseluruhan dana APBN Tahun Anggaran 2023 yang dikelola dibawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, dimana semua Satker melakukan revisi DIPA sesuai kebutuhan masing – masing.

Tabel 3.35 Tabel Alokasi DIPA

NO	UNIT KERJA	SUMBER DIPA (Rp. Ribu)			
		RPM	PHLN	SBSN	TOTAL
1	<i>Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat</i>	39.078.363			39.078.363
2	<i>Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat</i>	29.656.909			29.656.909
3	<i>Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat</i>	48.708.287			48.708.287
4	<i>Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat</i>	283.661.889	100.000	339.807.588	623.569.477
5	<i>Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat</i>	495.290.385			495.290.385
JUMLAH		583.620.375	100.000	225.578.186	809.298.561

3.4.1.1. *Kronologis Perubahan DIPA TA 2024*

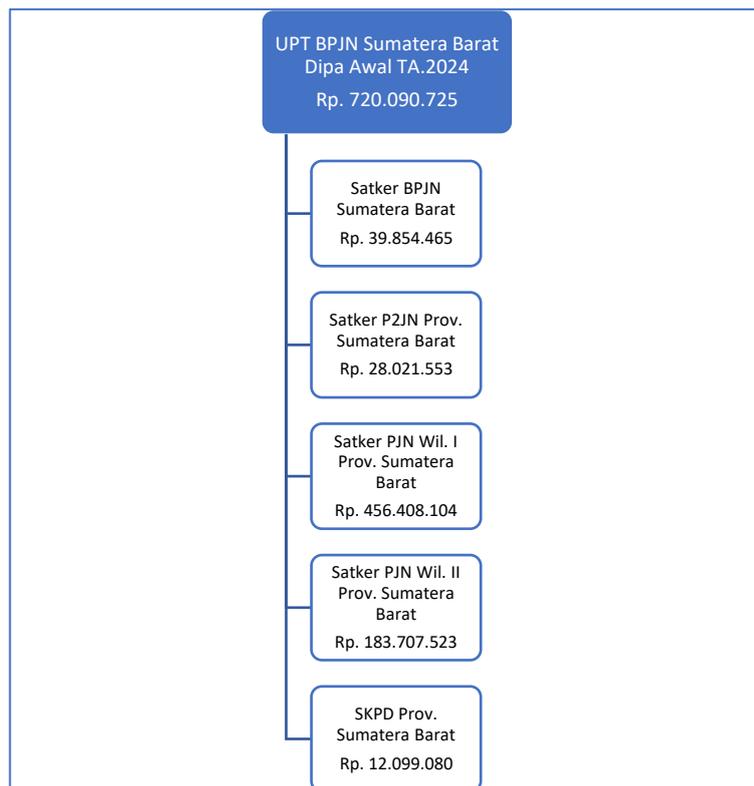
Tabel 3.36 Kronologis Perubahan DIPA

NO	Uraian	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp. Ribu)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
I	<i>Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat</i>					
1	AWAL	033.04.1.447931/2023	30 November 2022	42.118.633	42.118.633	DIPA AWAL
2	REVISI I	033.04.1.447931/2023	10 Februari 2023	42.118.633	42.118.633	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
3	REVISI II	033.04.1.447931/2023	10 April 2023	42.118.633	42.118.633	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
4	REVISI III	033.04.1.447931/2023	29 Agustus 2023	42.118.633	42.118.633	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
5	REVISI IV	033.04.1.447931/2023	17 September 2023	42.118.633	41.201.072	REVISI SISA HASIL TENDER
6	REVISI V	033.04.1.447931/2023	06 Oktober 2023	41.201.072	41.201.072	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
7	REVISI VI	033.04.1.447931/2023	9 November 2023	41.201.072	39.078.363	REVISI SISA HASIL TENDER dan SISA ANGGARAN
8	REVISI VII	033.04.1.447931/2023	27 Desember 2023	39.078.363	39.078.363	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
II	<i>Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat</i>					
1	AWAL	033.04.1.089258/2023	30 November 2022	30.529.406	30.529.406	DIPA AWAL

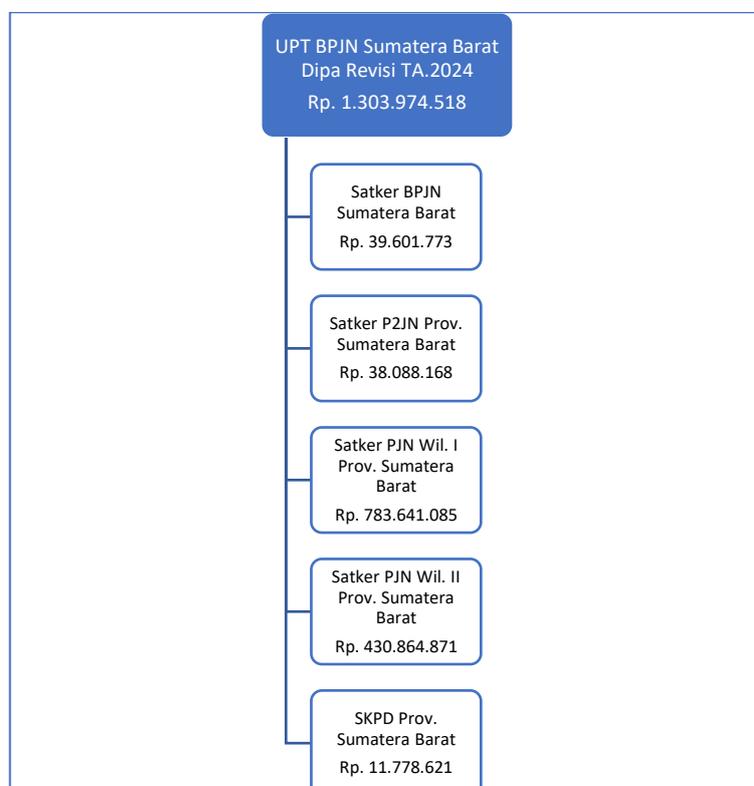
NO	Uraian	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp. Ribu)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
2	REVISI I	033.04.1.089258/2023	09 April 2023	30.529.406	30.529.406	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
3	REVISI II	033.04.1.089258/2023	17 September 2023	30.529.406	29.656.909	REVISI SISA HASIL TENDER
III	<i>Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat</i>					
1	AWAL	033.04.1.485302/2023	30 November 2022	42.833.180	42.833.180	DIPA AWAL
2	REVISI I	033.04.1.485302/2023	17 Februari 2023	42.833.180	42.833.180	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
3	REVISI II	033.04.1.485302/2023	11 July 2023	42.833.180	47.119.418	ARAHAN PIMPINAN (IJD)
4	REVISI III	033.04.1.485302/2023	09 Agustus 2023	47.119.418	47.119.418	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
5	REVISI IV	033.04.1.485302/2023	17 September 2023	47.119.418	48.100.981	REVISI SISA HASIL TENDER TAHAP 1
6	REVISI V	033.04.1.485302/2023	21 October 2023	48.100.981	47.915.890	REVISI SISA HASIL TENDER TAHAP 2
7	REVISI VI	033.04.1.485302/2023	25 Oktober 2023	47.915.890	47.915.890	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
8	REVISI VII	033.04.1.485302/2023	9 November 2023	47.915.890	48.708.287	REVISI SISA HASIL TENDER dan SISA ANGGARAN
9	REVISI VIII	033.04.1.485302/2023	01 Desember 2023	48.708.287	48.708.287	KEBUTUHAN ADMINISTRASI

NO	Uraian	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp. Ribu)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
IV	<i>Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat</i>					
1	AWAL	033.04.1.498579/2023	30 November 2022	494.202.141	494.202.141	DIPA AWAL
2	REVISI I	033.04.1.498579/2023	02 Maret 2023	494.202.141	494.202.141	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
3	REVISI II	033.04.1.498579/2023	09 April 2023	494.202.141	543.383.386	REVISI SBSN
4	REVISI III	033.04.1.498579/2023	09 Juni 2023	543.383.386	543.383.386	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
5	REVISI IV	033.04.1.498579/2023	11 July 2023	543.383.386	598.117.045	ARAHAN PIMPINAN (IJD)
6	REVISI V	033.04.1.498579/2023	17 September 2023	598.117.045	580.633.847	REVISI SISA HASIL TENDER TAHAP 1
7	REVISI VI	033.04.1.498579/2023	21 October 2023	580.633.847	581.469.925	REVISI SISA HASIL TENDER TAHAP 2
8	REVISI VII	033.04.1.498579/2023	09 November 2023	581.469.925	623.569.477	REVISI SISA HASIL TENDER dan SISA ANGGARAN
9	REVISI VIII	033.04.1.498579/2023	21 November 2023	623.569.477	623.569.477	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
10	REVISI IX	033.04.1.498579/2023	19 Desember 2023	623.569.477	623.569.477	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
V	<i>Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat</i>					

NO	Uraian	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp. Ribu)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
1	AWAL	033.04.1.498580/2023	30 November 2022	384.734.189	384.734.189	DIPA AWAL
2	REVISI I	033.04.1.498580/2023	10 April 2023	384.734.189	384.734.189	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
3	REVISI II	033.04.1.498580/2023	11 July 2023	384.734.189	472.875.189	ARAHAN PIMPINAN (IJD)
4	REVISI III	033.04.1.498580/2023	17 September 2023	472.875.189	468.808.373	REVISI SISA HASIL TENDER TAHAP 1
5	REVISI IV	033.04.1.498580/2023	21 October 2023	468.808.373	466.449.225	REVISI SISA HASIL TENDER TAHAP 2
6	REVISI V	033.04.1.498580/2023	09 November 2023	466.449.225	495.290.385	REVISI SISA HASIL TENDER dan SISA ANGGARAN
7	REVISI VI	033.04.1.498580/2023	30 November 2023	495.290.385	495.290.385	KEBUTUHAN ADMINISTRASI
8	REVISI VII	033.04.1.498580/2023	18 Desember 2023	495.290.385	495.290.385	KEBUTUHAN ADMINISTRASI



Gambar 3.3 Bagan Pohon Anggaran DIPA Awal (dalam Rp. Ribuan)



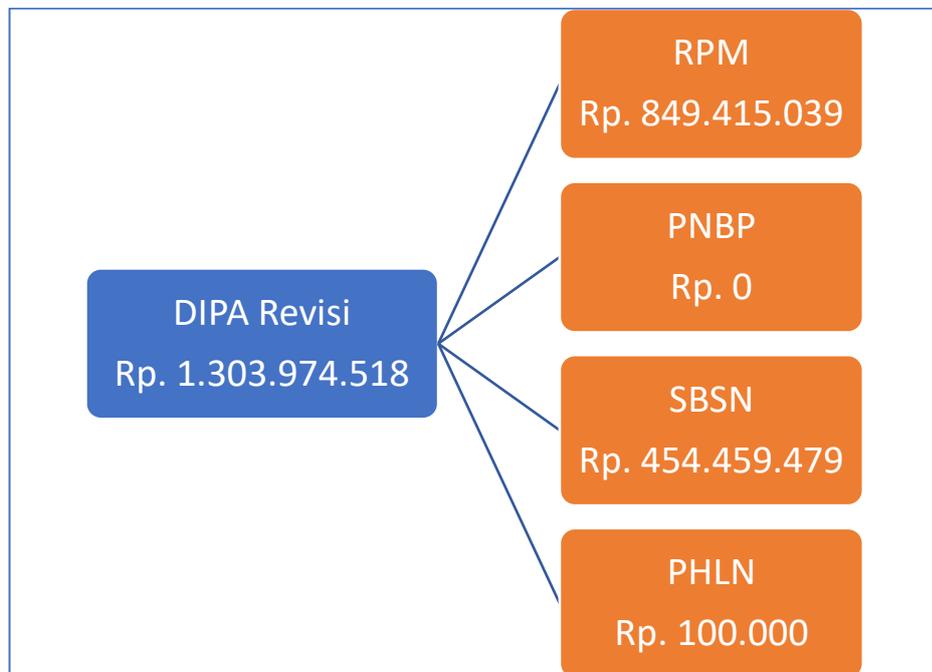
Gambar 3.4 Bagan Pohon Anggaran DIPA Revisi (dalam Rp. Ribuan)

3.4.1.2. Komposisi Pendanaan (RPM, PNBP, SBSN, PLN)

1. Komposisi Pendanaan Pada Dipa Awal (Rp. Dalam Ribuan)



2. Komposisi Pendanaan Pada DIPA Revisi (Rp. Dalam Ribuan)



3.4.1.3 Anggaran UPT BPJN Sumatera Barat Berdasarkan Sumber Pendanaan 2020-2024

Tabel 3. 13 Anggaran UPT BPJN Sumatera Barat Berdasarkan Sumber Pendanaan 2020-2024

Tahun	DIPA (Rp. 1000,-)			
	RPM	SBSN	PHLN	Total
2020	467.725.962	246,957,640	12,123.456	726.807.058
2021	631.366.663	3.531.780		634.898.443
2022	588.763.479	224.694.662	100.000	813.558.141
2023	896.395.833	339.807.588	100.000	1.236.303.421
2024	849.415.039	454.459.479	100.000	1.303.974.518

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2024

Subbab ini menyajikan realisasi atas penyerapan anggaran tahun berjalan yang dibreakdown per program.

Tabel 3.37 Realisasi Anggaran per Program dan per Jenis Belanja

No	Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu	Fis.	
1	Program Infrastruktur Konektivitas	1.272.607.470	1.272.156.377	99,96	99,73	99,77
2	Program Dukungan Manajemen	31.367.048	31.011.419	98,87	100,00	101,15
TOTAL		1.303.974.518	1.303.167.796	99,94	99,82	99,88

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya

NO	OUTPUT		PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
			AWAL *PK Revisi	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
1	RBC 006	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP	142.911.525	142.911.525	142.911.524	100,00	100,00	
		a. Pembangunan Jalan	142.911.525	142.911.525	142.911.524	100,00	100,00	
		- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	142.911.525	142.911.525	142.911.524	100,00	100,00	
2	RBC 005	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi ProPN	68.570.326	68.570.326	68.570.326	100,00	100,00	
		a. Pembangunan Jalan	68.570.326	68.570.326	68.570.326	100,00	100,00	
		- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	68.570.326	68.570.326	68.570.326	100,00	100,00	
3	RBC 001	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
		a. Pembangunan Terowongan	100.000	100.000	0	0,00	0,00	

4	CBC 002	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	42.016.034	42.016.034	42.016.034	100,00	100,00	
5	CBF 024	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	24.418.559	24.418.559	24.418.559	100,00	100,00	
		a. Pembangunan Jembatan Gantung	24.418.559	24.418.559	24.418.559	100,00	100,00	
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
6	CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	63.750.686	63.750.686	63.750.684	100,00	100,00	
7	CDC 012	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padat Karya	35.000.898	35.000.898	34.999.689	100,00	100,00	
8	CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	698.325.270	698.325.270	698.249.782	99,99	99,99	
		a. Pemeliharaan Preventif	2.681.845	2.681.845	2.681.844	100,00	100,00	
		b. Rehabilitasi Minor Jalan	17.486.974	17.486.974	17.486.973	100,00	100,00	
		c. Rehabilitasi Mayor Jalan	83.953.989	83.953.989	83.953.989	100,00	100,00	
		d. Rekonstruksi Jalan	194.937.675	194.937.675	194.937.674	100,00	100,00	
		e. Penanganan Longsoran	399.264.787	399.264.787	399.189.302	99,98	99,98	
9	CDC 004	Penanganan Drainase Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	5.705.215	5.705.215	5.705.214	100,00	100,00	
		- Penanganan Drainase	5.705.215	5.705.215	5.705.214	100,00	100,00	
10	CDF 010	Preservasi Rutin Jembatan Padat Karya	12.469.577	12.469.577	12.468.528	99,97	99,97	
11	CDF 002	Preservasi Jembatan	37.785.727	37.785.727	37.785.727	100,00	100,00	
		a. Rehabilitasi Jembatan	26.129.935	26.129.935	26.129.935	100,00	100,00	
		b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	11.655.792	11.655.792	11.655.792	100,00	100,00	

12	CDF 003	Penggantian Jembatan	31.481.512	31.481.512	31.481.512	100,00	100,00	
		a. Penggantian Jembatan	31.481.512	31.481.512	31.481.512	100,00	100,00	
13	RDF 006	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal Terluar dan Terdepan MP	4.463.517	4.463.517	4.463.517	100,00	100,00	
		a. Penggantian Jembatan	4.463.517	4.463.517	4.463.517	100,00	100,00	
14	CDC 023	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	43.034.371	43.034.371	43.034.371	100,00	100,00	
		a. Peningkatan Struktur ke Perkerasan	43.034.371	43.034.371	43.034.371	100,00	100,00	
15	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	31.811.773	31.811.773	31.541.355	99,15	99,15	
16	CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	30.762.480	30.762.480	30.759.555	99,99	99,99	
IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
*	CBC 022	Penanganan Blackspot	-	-	-	-	-	Tidak mendapatkan anggaran pada RO Penanganan Blackspot, sehingga Penanganan Blackspot diakomodir melalui kegiatan Preservasi
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR								

Indikator Kinerja Kegiatan								
17	EBA 956	Layanan BMN	17.972	17.972	17.589	97,87	97,87	
18	EBA 962	Layanan Umum	4.992.892	4.992.892	4.951.898	99,18	99,18	
19	EBA 994	Layanan Perkantoran	24.533.093	24.533.093	24.232.431	98,77	98,77	
20	EBB 951	Layanan Sarana Internal	773.091	773.091	759.912	98,30	98,30	
21	EBB 971	Layanan Prasarana Internal	1.050.000	1.050.000	1.049.588	99,96	99,96	

3.4.4 Isu-isu terkait Program dan Anggaran TA 2024

Isu-isu terkait Anggaran pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dimana terjadinya perubahan anggaran dari anggaran awalnya yang semula Rp. 994.417.549.000,-,- menjadi pada anggaran akhirnya Rp. 1.236.303.421.000,-. Ini terdapat pergeseran anggaran pada beberapa Satker yaitu :

- ❖ Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat yang DIPA awalnya Rp. 39.854.465.000,- pada DIPA Revisi Akhir menjadi Rp. 39.601.773.000,- ini terjadi karena hal-hal sebagai berikut :
- a. Pada Revisi DIPA VII terjadi pemotongan belanja pegawai
- b. Pada revisi DIPA VIII adanya Self Blocking perjalanan dinas

Melalui surat nomor S-1023/MK.02/2024, Menteri Keuangan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Satuan Kerja diminta untuk:

Meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Satuan Kerja melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan.

Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Berkoordinasi dengan unit eselon I Kementerian/Lembaga dalam melakukan revisi pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri.

- ❖ Satuan Kerja tidak dapat mengajukan SPM LS/GUP/PTUP termasuk pengajuan persetujuan TUP yang terdapat unsur belanja perjalanan dinas sebelum melakukan revisi penghematan belanja perjalanan dinas.
- ❖ KPPN dapat menerima pengajuan permintaan pembayaran belanja perjalanan dinas setelah Satuan Kerja melakukan revisi penghematan belanja perjalanan dinas yang dibuktikan dengan:
Surat Pengesahan revisi penghematan belanja perjalanan dinas oleh Satuan Kerja; atau
Surat Pengesahan revisi penghematan belanja perjalanan dinas Eselon I Kementerian/Lembaga dalam hal revisi penghematan dilakukan secara terpusat.

2. Satker P2JN Provinsi Sumatera Barat yang DIPA awalnya sebesar Rp. 42.833.180.000,- pada DIPA Revisi akhir menjadi sebesar Rp. 48.708.287.000,-, ini terjadi karena pada revisi ke dua terdapat penambahan kegiatan IJD (arahan Pimpinan).

3. Satker SKPD yang DIPA awalnya sebesar Rp. 30.529.406.000,- berubah menjadi pada DIPA Revisi akhir sebesar Rp. 29.656.909.000,- ini terjadi karena adanya revisi sisa Hasil Tender.

4. Satker PJN Wil. 1 Provinsi Sumatera Barat yang DIPA awalnya sebesar Rp. 494.202.141.000,- berubah menjadi pada DIPA Revisi akhir sebesar Rp. 623.569.477.000,-, ini terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- Penambahan Paket IJD Pada revisi ke empat
- Penamabahan akibat revisi sisa hasil tender dan sisa anggaran pada revisi ketujuh

5. Satker PJN Wil. 2 Propinsi Sumatera Barat yang DIPA awalnya sebesar Rp. 384.734.189.000,- berubah menjadi pada DIPA Revisi akhir sebesar Rp. 495.290.385.000,- ini terjadi karena hal- hal sebagai berikut :

- Penambahan Paket IJD Pada revisi ke dua
- Penamabahan akibat revisi sisa hasil tender dan sisa anggaran pada revisi kelima

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah praktik untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dengan meminimalkan dampak lingkungan. Efisiensi sumber daya merupakan komponen penting dari komitmen terhadap keberlanjutan.

3.5.1 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2023 jumlah pegawai di lingkungan BPJN Sumatera Barat sebanyak 379 orang (PNS sebanyak 130 orang dan Non PNS sebanyak 234 orang dan PPPK sebanyak 15 orang) dan pada Tahun 2024 terjadi pengurangan Pegawai karena pensiun dan penambahan pegawai PPPK sehingga jumlah pegawai di lingkungan BPJN Sumatera Barat menjadi 375 orang yang terdiri dari 129 orang PNS dan 219 orang Non PNS dan 27 orang PPPK). Rata-rata Capaian kinerja terhadap akhir PK tercapai 99,63%, dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2023 untuk tahun ini pencapaian kinerja BPJN Sumatera Barat mengalami **kenaikan**.

Tabel 3.39 Capaian Kinerja TA. 2020 - 2024

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	Realisasi Anggaran (Rp)	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020	385	690.103.665.000	93,84
2021	385	660.132.134.000	99,66
2022	382	754.823.777.000	95,83
2023	379	1.234.452.187.000	95,95
2024	375	1.303.167.796.000	99,63

3.5.2 Efisiensi Atas Penggunaan Anggaran

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 Hal : Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas, berikut efisiensi yang dilakukan Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat sebesar **Rp. 39.601.773.000,-** Adapun tingkat efisiensi sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.19

Tabel 3. 45 Efisiensi Anggaran

No	Program	Pagu (Rp.	Realisasi (Rp.	Progres		Nilai
		dlm ribu)	dlm ribu)	Keu	Fisik	Efisiensi
1	Rating Kondisi Jalan Nasional	20.092.597,-	20.015.430,-	99,62	100,0	100,38
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	19.509.176,-	19.305.575,-	98,96	100,0	101,05
	Total	39.601.773	39.321.005	99,29	100,0	100,71

Dari tabel di atas dapat diketahui efisiensi dari Rating Kondisi Jalan Nasional mencapai 100,38 % sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen mencapai 101,05%, dan secara keseluruhan efisiensi yang dicapai sebesar 100,71% pada Tahun 2024.

3.6.Pemanfaatan Laporan Kinerja

Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemanfaatan laporan kinerja. Terdapat berbagai aspek yang menjadi penekanan, yaitu :

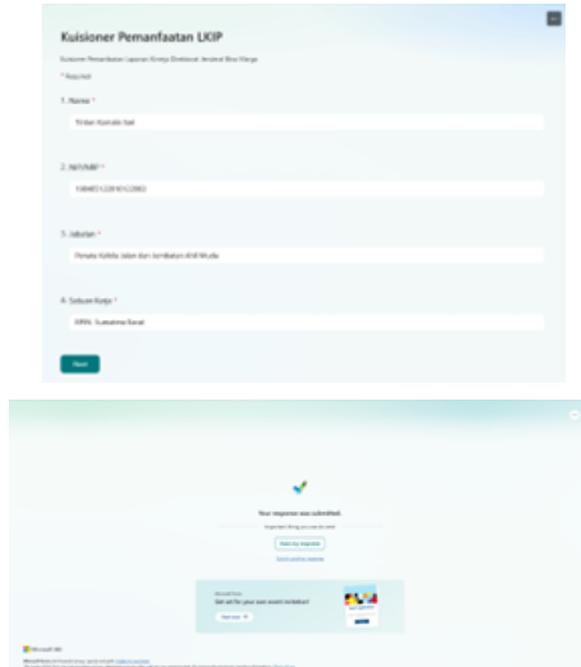
- Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan
- Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
- Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat ini dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang disampaikan kepada pejabat dan pegawai di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat disesuaikan dengan komponen-komponen yang menjadi perhatian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.

Guna menilai sejauh mana pemanfaatan laporan kinerja tersebut, pada akhir Desember 2024 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Responden diminta untuk memilih jawaban atas pernyataan pernyataan yang diberikan dan disesuaikan dengan pengetahuan, pengalaman, dan persepsi masing-masing. Guna mempermudah responden pejabat dan pegawai di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

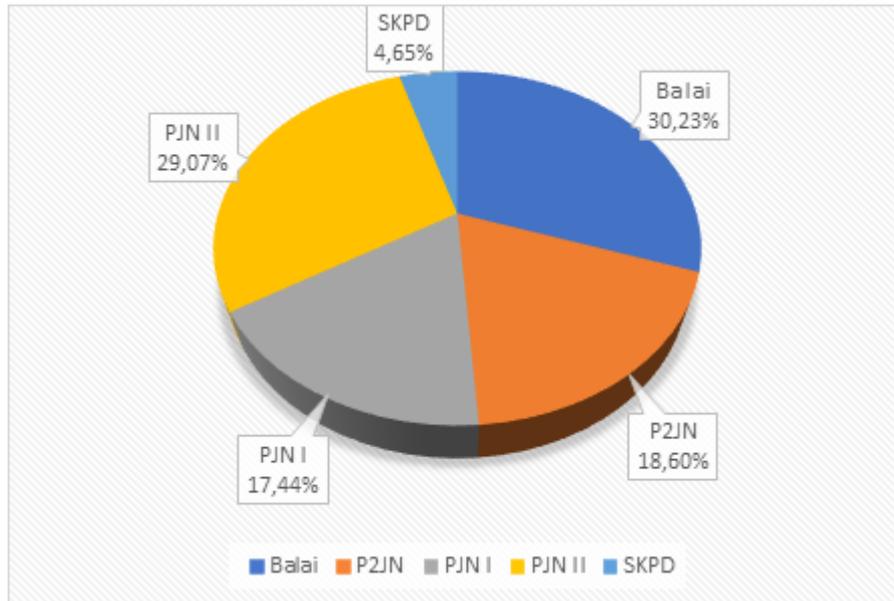
Sumatera Barat dalam menjawab pertanyaan, formulir kuesioner yang disiapkan dalam bentuk *Google Forms*.

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sntpsuFBUC2svC9poe-UnZzgF3v0FhBt7nOR6Oi30tUMjdDQ0kxSEpRQVIWTzZQR1QyNUpHOEE3Uy4u>).



Gambar 3. 24 Pengisian kuesioner Pemanfaatan LAKIN di BPJN Sumatera Barat

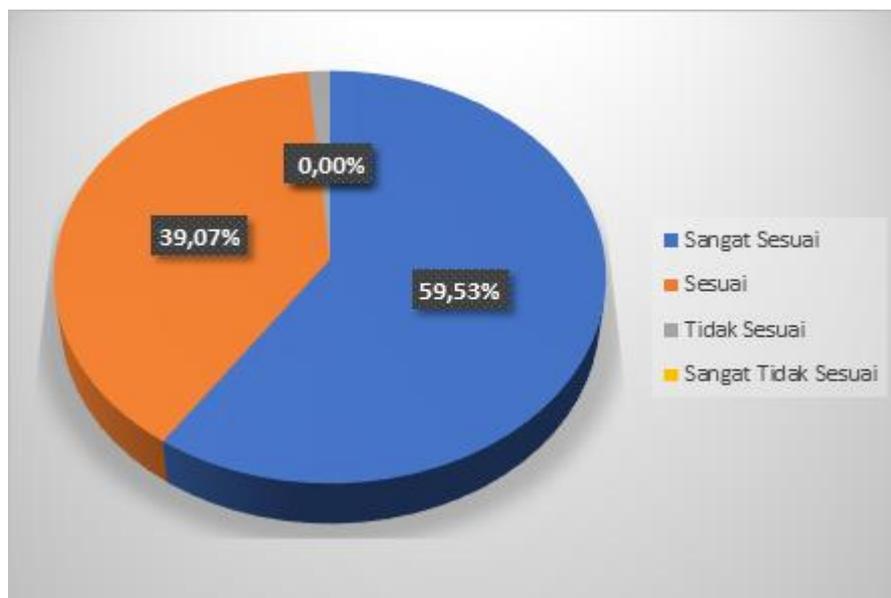
Selain menggunakan informasi dari hasil kuesioner tersebut, analisis pemanfaatan laporan kinerja juga diperkuat dengan bukti bukti dukung lain yang sesuai. Dengan demikian penggambaran pemanfaatan laporankinerja dapat lebih lengkap dan objektif. Adapun hasil penyebaran kuesioner dan bukti-bukti dukungnya adalah sebagai berikut:



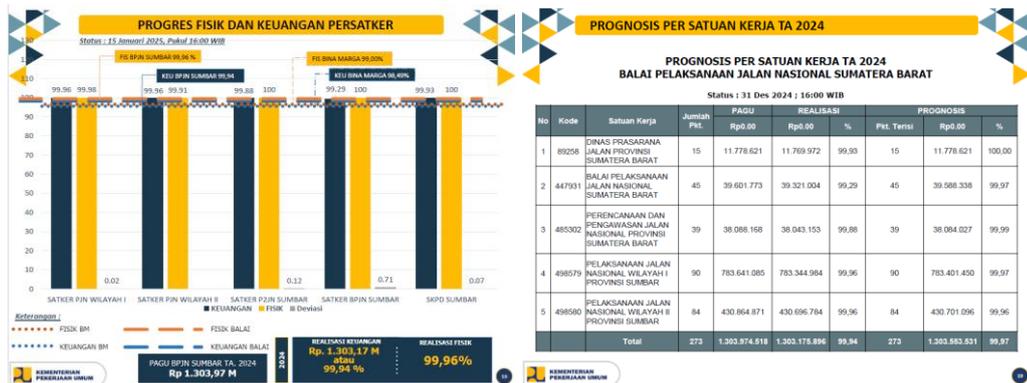
Gambar 3. 25 Data Responden

A. Informasi Dalam Laporan Kinerja Menjadi Perhatian Utama Pimpinan

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 59,53 % mengatakan “sangat sesuai” dan 39,07 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja memang telah menjadi perhatian utama pimpinan. Hanya 0,00 % responden yang mengatakan “tidak sesuai”.



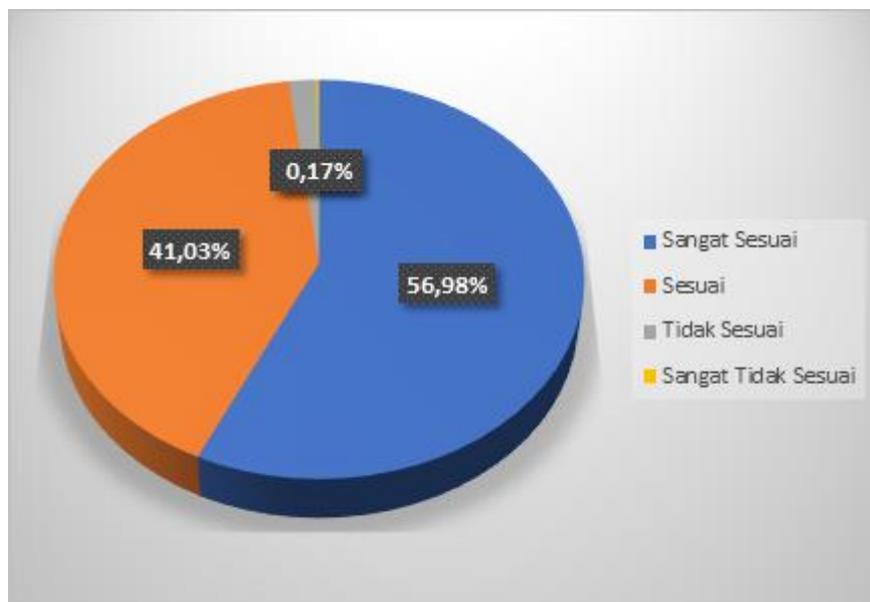
Gambar 3. 26 hasil kuesioner Laporan Kinerja Menjadi Perhatian Utama Pimpinan



Gambar 3.5 Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Menjadi Perhatian Utama Pimpinan: Bahan Rapat Pimpinan

B. Informasi Dalam Laporan Kinerja Menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai

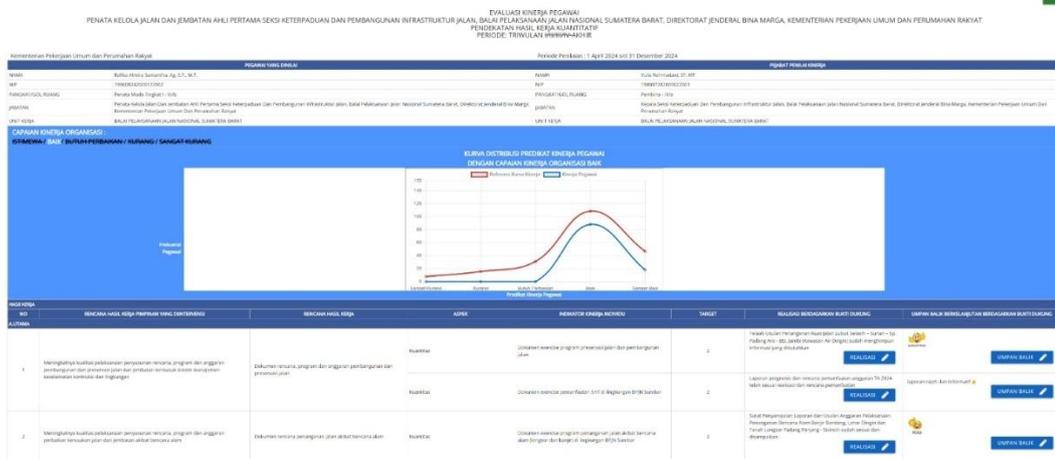
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarikan pada total 86 responden, sebanyak 56,98 % mengatakan “sangat sesuai” dan 41,03% mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja memang telah menjadi kepedulian seluruh pegawai. Sebesar 0,17 % responden mengatakan “tidak sesuai”.



Gambar 3. 28 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai

Bukti kepedulian pegawai terhadap salah satu informasi dalam laporan kinerja yaitu capaian kinerja organisasi, dapat dilihat dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dimana seluruh pegawai di lingkungan

BPJN Sumatera Barat wajib mengisi SKP setiap tahunnya dan mengetahui peran masing-masing di dalam pencapaian kinerja organisasi.



Gambar 3.6 Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai: Sasaran Kinerja Pegawai

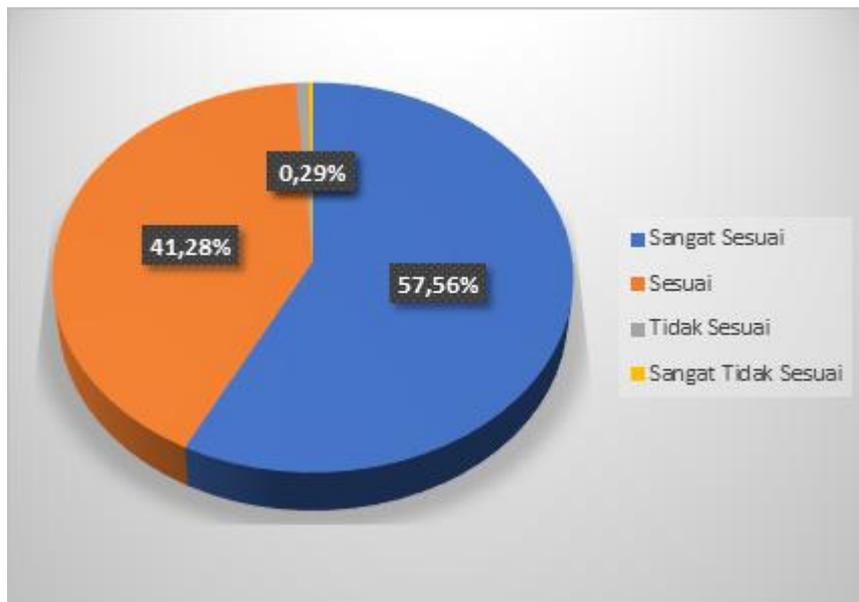
Bukti selanjutnya dari kepedulian pegawai terhadap salah satu informasi dalam laporan kinerja, yaitu informasi isu strategis, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan dan rekomendasi, kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, serta deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan yang telah disampaikan dalam acara Rapat Kinerja yang mengundang seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional dan perwakilan pelaksana di lingkungan BPJN Sumatera Barat. Sehingga, informasi-informasi yang disampaikan dalam acara ini telah menjadi kepedulian dari seluruh pegawai.



Gambar 3.7 Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Menjadi Kepedulian Seluruh Pegawai: Rapat Kerja BPJN Sumatera Barat. Evaluasi Kegiatan T.A. 2024 dan Persiapan Kegiatan T.A. 2025

C. Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 57,56 % mengatakan “sangat sesuai” dan 41,28 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja memang telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Sebesar 0,29 % responden mengatakan “tidak sesuai”.



Gambar 3. 31 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja

Adapun muatan dalam kategori ini antara lain mencakup: informasi mengenai kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan, serta permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja yang telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Muatan terakhir yang harus ada adalah adanya laporan kinerja periode sebelumnya yang menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya. Salah satu bukti yang mendukung poin informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja adalah melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja (PK), menindaklanjuti hasil evaluasi catatan evaluasi SAKIP Kementerian PUPR Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB, dimana Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Salah satu tindak lanjut yang

dilakukan BPJN Sumatera Barat menanggapi evaluasi tersebut berupa Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja seperti yang terlihat pada subbab 1.4.2. menunjukkan bahwa informasi dalam laporan kinerja periode sebelumnya yang menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya.

Tabel 3.40 Bukti Dukung Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan dalam Penyesuaian Aktivitas untuk Mencapai Kinerja: Catatan Evaluasi SAKIP BPJN Sumatera Barat 2023

No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan
A	Perencanaan Kinerja		
	1. Dokumen perencanaan belum inovatif dan menjadi percontohan nasional;	1. Meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	1. UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya untuk meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya
B	Pengukuran Kinerja		
	1. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi); 2. Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja; 2. Meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	1. UPT BPJN Sumatera Barat sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja . Satker Bali dalam hal ini telah menggunakan E-

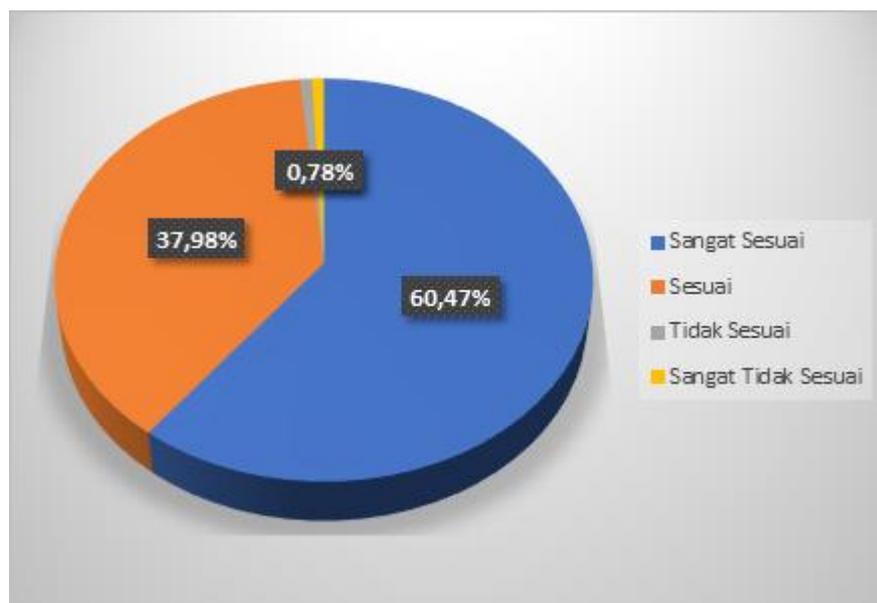
No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan
			<p>Sakip, SiPP dan E-Kinerja.</p> <p>2. UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya untuk meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional ke depannya</p>
C	Pelaporan Kinerja		
	<p>1. Dokumen laporan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.</p>	<p>1. Menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) dalam Dokumen Laporan Kinerja;</p> <p>2. Meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.</p>	<p>1. Info Analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional dalam dokumen laporan kinerja sudah disampaikan oleh UPT BPJN Sumatera Barat tiap bulannya dalam bentuk laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja UPT BPJN Sumatera Barat dan laporan ini selalu diupload pada E-Sakip tiap minggu pertama atau kedua bulan berjalan. ;</p> <p>2. UPT BPJN Sumatera Barat akan berusaha untuk meningkatkan</p>

No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan
			pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional kedepannya.
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). 2. Belum terciptanya capaian kinerja yang konsisten naik 3. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 2. Meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai. 3. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT BPJN Sumatera Barat sudah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dalam hal ini UPT BPJN Sumatera Barat menggunakan E-Sakip 2. UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai ke depannya; 3. UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya untuk meningkatkan evaluasi akuntabilitas

No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan
			kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional ke depannya.

D. Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Anggaran Untuk Mencapai Kinerja

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 60,47% mengatakan “sangat sesuai” dan 37,98 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja. Sebesar 0,78% responden mengatakan “tidak sesuai”.



Gambar 3. 32 Hasil Kuisisioner Laporan Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Anggaran Untuk Mencapai Kinerja

Adapun muatan dalam kategori ini antara lain mencakup: informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan, serta

permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala yang telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja. Bukti yang dapat mendukung poin informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja antara lain adalah adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan /Priodik yang disusun setiap bulannyadan diup;load ke e-SAKIP, dimana poin-poin yang terdapat dalam laporan kinerja berkala seperti informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan,deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan, serta permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan Keputusan erkait penyesuaian anggaran di BPJN Sumatera Barat. .

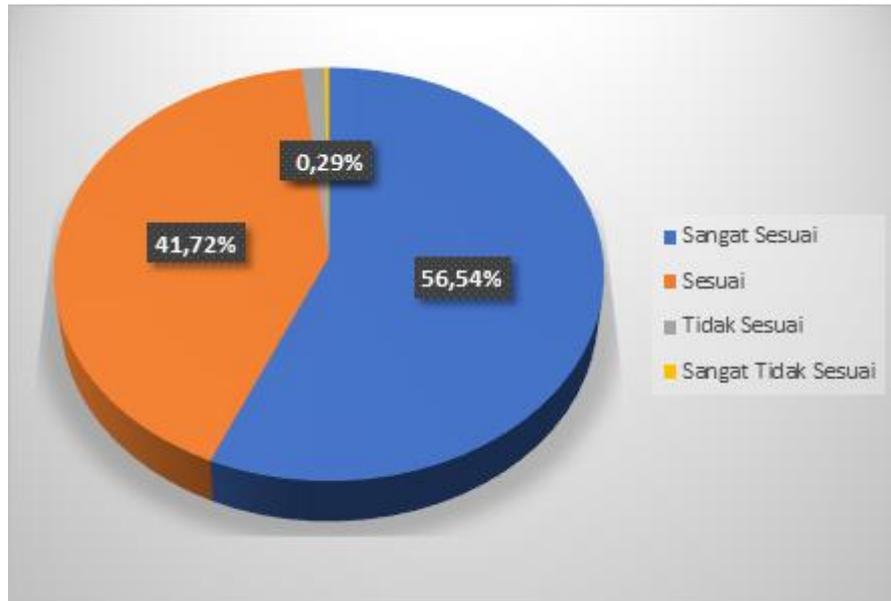
NO	KODE	NAMA SATKER	FORMIL PENGIRIMAN DOKUMEN LAPORAN BULANAN ESELON II/UPT/SATKER												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
UPT/BALAI															
1	04447931	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT													
			04-Mar-24 00:40:34	07-Mar-24 11:57:52	17-Apr-24 16:57:04	07-May-24 16:01:20	06-Jun-24 10:52:14	18-Jul-24 17:43:08	08-Aug-24 19:47:01	10-Sep-24 06:47:52	11-Oct-24 13:23:29	07-Nov-24 23:38:37	07-Dec-24 23:14:28	15-Jan-25 18:47:21	
		Keterangan	01 Laporan Monev Kinerja Bulan Januari 2024 UPT BPJN Sumbar	02 Laporan Monev Kinerja Bulan Februari 2024 UPT BPJN Sumbar	03 Laporan Monev Kinerja Bulan Maret 2024 UPT BPJN Sumbar	04 Laporan Monev Kinerja Bulan April 2024 UPT BPJN Sumbar	05 Laporan Monev Kinerja Bulan Mei 2024 UPT BPJN Sumbar	06 Laporan Monev Kinerja Bulan Juni 2024 UPT BPJN Sumbar	07 Laporan Monev Kinerja Bulan Juli 2024 UPT BPJN Sumbar	08 Laporan Monev Kinerja Bulan Agustus 2024 UPT BPJN Sumbar	09 Laporan Monev Kinerja Bulan September 2024 UPT BPJN Sumbar (Revisi BAB 3.3.3)	10 Laporan Monev Kinerja Bulan Oktober 2024 UPT BPJN Sumbar	11 Laporan Monev Kinerja Bulan November 2024 UPT BPJN Sumbar	12 Laporan Monev Kinerja Bulan Desember 2024 UPT BPJN Sumbar	
TOTAL															

Gambar 3.8 Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala Telah Digunakan Dalam Penyesuaian

Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan UPT BPJN Sumatera Barat TA 2024 pada E-SAKIP

E. Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun Telah Digunakan Dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarikan pada total 86 responden, sebanyak 56,54% mengatakan “sangat sesuai” dan 41,72% mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja. Sebesar 0,29 % responden mengatakan “tidak sesuai”.



Gambar 3. 34 Hasil Kuisioner Laporan Kinerja Tahun Telah Digunakan Dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja

Adapun muatan dalam kategori ini antara lain mencakup: informasi isu strategis, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan dan rekomendasi, kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, serta deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam

laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Laporan kinerja periode sebelumnya dalam laporan kinerja juga harus digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa informasi dalam laporan kinerja tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dapat dilihat melalui adanya Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPJN Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 yang melampirkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2023 di lingkungan BPJN Sumatera Barat dan telah ditandatangani oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan tim evaluator dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Selanjutnya, hasil evaluasi ini juga telah ditindaklanjuti dengan disosialisasikan dalam acara penyusunan Laporan Kinerja PUPR Tahun 2024. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa informasi-informasi tersebut telah menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SATUAN KERJA DIREKTORAT BERTANGGUNG JAWAB PENYELENGGANAAN JALAN DAN JEMBATAN
dan nomor: 32/kesra/2024, tahun: 2024, tanggal: 24 April 2024

Nomor : PW 0201-BP/273 Bandung, 24 April 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Sumatera Barat TA. 2023

Yth. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
di -
Tempat

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 pada Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Sumatera Barat, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Pengusan

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor: 02/SE/IJ/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 14/2017/SD/2024 tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Unit Kerja/LPT dan Satker Unit Kerja/LPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.

B. Tujuan Evaluasi

1. Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah;
2. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
4. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
5. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
6. Memenuhi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan diadopsi untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;



baik.

baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Uraian Hasil Evaluasi

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi AKIP Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 dapat dikategorikan A dalam pengertian bahwa instansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 (Pegawai/Subordinator (Memadani)) dengan pencapaian nilai 83,55% dengan rincian per komponen:

No	KOMPONEN	BOBOT / NILAI MAKSIMAL (%)	NILAI HASIL EVALUASI TA 2022 (%)	NILAI HASIL EVALUASI TA 2023 (%)
1	Perencanaan kinerja	30	25,20	25,20
2	Pengukuran kinerja	30	26,10	24,30
3	pelaporan kinerja	15	12,50	13,50
4	Evaluasi AKUNTABILITAS Kinerja Internal	25	18,75	20,25
Nilai akuntabilitas kinerja		100	80,54	83,55

2. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi SAKIP di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/subkomponen SAKIP sebagai berikut:

f. Perencanaan...

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan
1	Perencanaan Kinerja	-
	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	-
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (crosscutting) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Dokumen perencanaan belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Dokumen perencanaan belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
2	Pengukuran Kinerja	-
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi); 2. Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1. Bukti pimpinan selalu terlibat sebagai pembuat keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja belum terdokumentasikan dengan baik; 2. Belum adanya penjelasan terkait efisiensi anggaran; 3. Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
3	Pelaporan Kinerja	-
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	-

b Dokumen...

-4-

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	Dokumen laporan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Dokumen laporan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi); 2. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi); 2. Belum tercapainya capaian kinerja yang konsisten naik 3. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.

E. Rekomendasi	
KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
1. Perencanaan Kinerja	1. Meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
2. Pengukuran Kinerja	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. 2. Meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
3. Pelaporan Kinerja	1. Meningkatkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dalam Dokumen Laporan Kinerja; 2. Meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; 2. Meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai; 3. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,
Wulan Octavian
NIP. 197110091997031002
Diunduh/ditandatangani secara elektronik

Tembusan:
Pk. Direktur Jenderal Bina Marga

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL EVALUASI ANP BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
SUMATERA BARAT TAHUN 2023
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang beranda tangan dibawah ini:

- Nama : Syauqi Kamal, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Subdirektori Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
Unit Kerja : Direktorat Pembangunan Jalan
- Nama : Hesti Dwi Aristyan, ST
Jabatan : Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda Subdirektori Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
Unit Kerja : Direktorat Pembangunan Jalan

Bertindak sebagai Evaluator BPJN Sumatera Barat TA. 2023 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 14/20PTSD/2024 Tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Unit Kerja/UPT dan Salakir Unit Kerja/UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- Nama : Yulia Rahmadhani, ST., MT
Jabatan : Kepala Seksi KPIJ
Unit Kerja : BPJN Sumatera Barat

Bertindak sebagai Evaluasi atas nama BPJN Sumatera Barat TA 2023 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Evaluasi SAKIP tahun anggaran 2023 dengan uraian sebagaimana teruang dalam lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.

PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kinerja Unit Kerja/UPT dimasa yang akan datang. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan perbaikan atau perubahan manajemen kinerja yang masih perlu dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Nama	Tanda Tangan
1. Syauqi Kamal, S.T., M.T.	
2. Hesti Dwi Aristyan, ST	

PIHAK KEDUA

Nama	Tanda Tangan
1. Yulia Rahmadhani, ST., MT	

No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluator
C	Pelaporan Kinerja		
1.	Dokumen laporan kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	1. Meningkatkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dalam Dokumen Laporan Kinerja; 2. Meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	1. Info Analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional dalam dokumen laporan kinerja sudah dilaksanakan oleh UPT BPJN Sumbang tahun sebelumnya dalam bentuk laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja UPT BPJN Sumbang dan laporan ini selalu diupload pada E-Sakip tiap minggu pertama atau kedua bulan berjalan. 2. UPT BPJN Sumbang akan berusaha untuk meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional kedepannya.
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	1. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. UPT BPJN Sumbang sudah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dalam hal ini UPT BPJN Sumbang
2.	Belum tercapainya capaian kinerja yang konsisten naik	2. Meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai.	
3.	Evaluasi akuntabilitas kinerja belum inovatif	3. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak	

No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluator
	dan menjadi percontohan nasional.	menjadi percontohan secara nasional.	menggunakan E-Sakip 2. UPT BPJN Sumbang akan berupaya meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai ke depannya. 3. UPT BPJN Sumbang akan berupaya untuk meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional ke depannya.

Catatan :
Lampiran ini harus diparaf para pihak atau walitnya yang mendandatangani DA disertai lambarnya

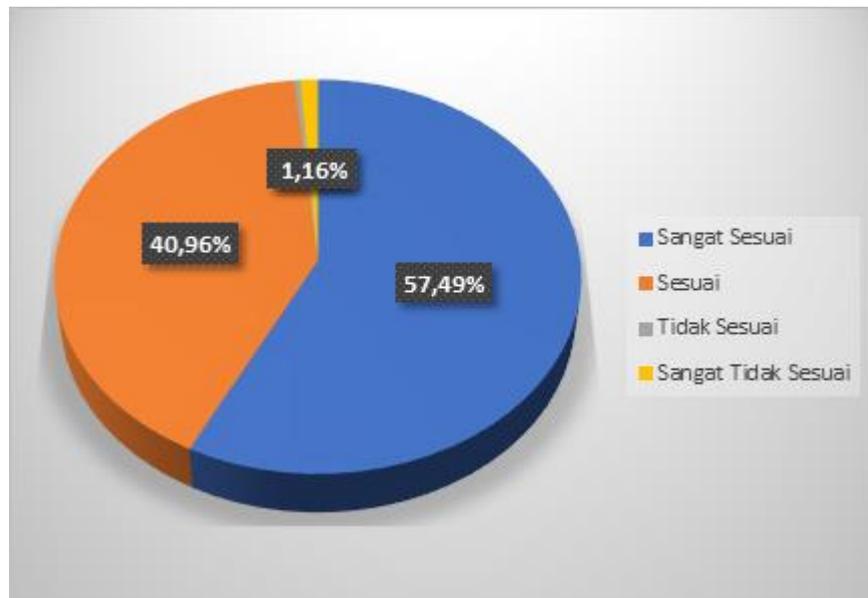
**Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi
BPJN Sumatera Barat**

No	Catatan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluator
A	Perencanaan Kinerja		
1.	Dokumen perencanaan belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	1. Meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	1. UPT BPJN Sumbang akan berupaya untuk meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya
B	Pengukuran Kinerja		
1.	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.	1. UPT BPJN Sumbang sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. Diakhir BAI dalam hal ini telah menggunakan E-Sakip, SFP dan E-Kinerja.
2.	Pengukuran kinerja belum inovatif dan menjadi percontohan nasional.	2. Meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	2. UPT BPJN Sumbang akan berupaya untuk meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional ke depannya

Gambar 3.9 Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun Telah Digunakan Dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja: LHE SAKIP UPT BPJN Sumatera Barat TA 2023

F. Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 57,49 % mengatakan “sangat sesuai” dan 40,96 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja. Sebesar 1,16 % responden mengatakan “tidak sesuai”.



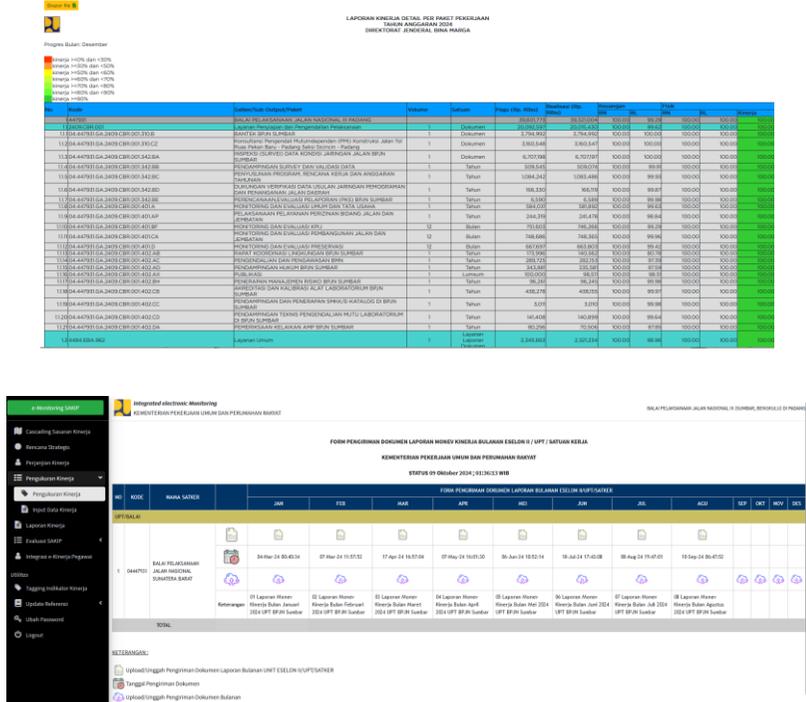
Gambar 3. 36 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Tahun 2023 Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2024

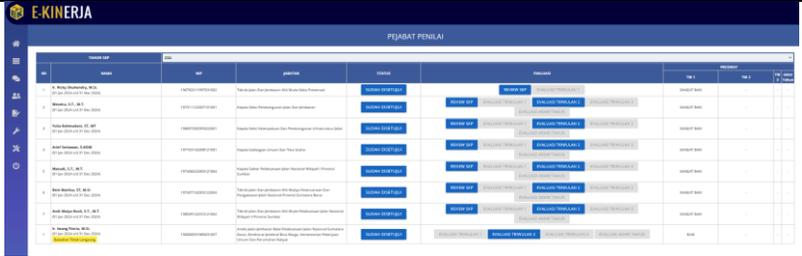
Sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab 2.2, salah satu bukti bahwa Informasi dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024 adalah melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja (PK). Revisi PK pada 31 Desember 2024 dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi catatan evaluasi SAKIP Kementerian PUPR Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB. Tindak lanjut yang dilakukan BPJN Sumatera

Barat adalah menanggapi evaluasi tersebut berupa Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja seperti yang terlihat pada subbab 1.4.2. menunjukkan bahwa informasi dalam laporan kinerja periode sebelumnya yang menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya.

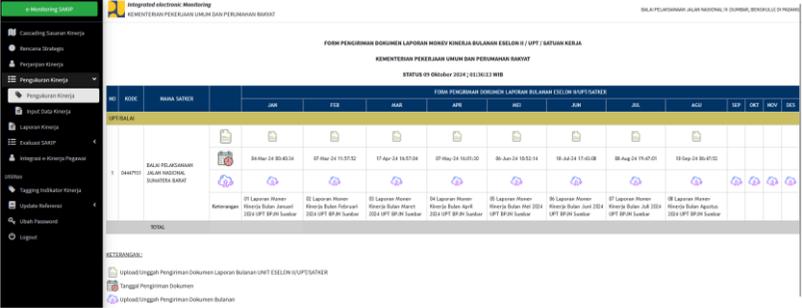
Tabel 3.41 Bukti Dukung Informasi Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Telah Digunakan Dalam Penyesuaian Perencanaan Kinerja Tahun 2024 : Progres Rencana Tindak Lanjut dari Hasil Evaluasi AKIP TA. 2023

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi																																																																
A. Perencanaan Kinerja																																																																				
1	Meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya untuk meningkatkan penyusunan perencanaan kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya	Sudah dibuat Perjanjian Kinerja Revisi sesuai Template pada Aplikasi/Website SiPP tanggal 31 Desember 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SASARAN PROGRAM</th> <th>INDIKATOR KINERJA</th> <th>BASELINE 2023</th> <th>TARGET 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</td> <td>IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional</td> <td>2,78</td> <td>2,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rincian Output</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan</td> <td>2,00 Dokumen</td> <td>6,00 Dokumen</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</td> <td>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga</td> <td>100,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rincian Output</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EBA 962 Layanan Umum</td> <td>1,00 Layanan</td> <td>1,00 Layanan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EBA 994 Layanan Perkantoran</td> <td>1,00 Layanan</td> <td>1,00 Layanan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EBB 951 Layanan Serana Internal</td> <td>1,00 Unit</td> <td>45,00 Unit</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kegiatan</td> <td>Anggaran</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</td> <td>Rp. 20.092.597.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga</td> <td>Rp. 19.509.176.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total Anggaran</td> <td>Rp. 39.601.773.000</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional			IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %	Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,80		Rincian Output				CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	2,00 Dokumen	6,00 Dokumen	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %	Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga	100,00 %	100,00 %		Rincian Output				EBA 962 Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan		EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan		EBB 951 Layanan Serana Internal	1,00 Unit	45,00 Unit	Kegiatan			Anggaran	1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			Rp. 20.092.597.000	2. Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga			Rp. 19.509.176.000	Total Anggaran			Rp. 39.601.773.000
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024																																																																	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional																																																																			
	IKK : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100,00 %	100,00 %																																																																	
	Parameter: Rating Kondisi Jalan Nasional	2,78	2,80																																																																	
	Rincian Output																																																																			
	CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	2,00 Dokumen	6,00 Dokumen																																																																	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR																																																																			
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %																																																																	
	Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga	100,00 %	100,00 %																																																																	
	Rincian Output																																																																			
	EBA 962 Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan																																																																	
	EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan																																																																	
	EBB 951 Layanan Serana Internal	1,00 Unit	45,00 Unit																																																																	
Kegiatan			Anggaran																																																																	
1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			Rp. 20.092.597.000																																																																	
2. Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga			Rp. 19.509.176.000																																																																	
Total Anggaran			Rp. 39.601.773.000																																																																	
B. Pengukuran Kinerja																																																																				

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
1	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;	UPT BPJN Sumatera Barat sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. UPT Balai dalam hal ini telah menggunakan E-Sakip, SiPP dan E-Kinerja.	UPT BPJN dalam pembuatan laporan Monitoring Pencapaian Kinerja Bulanan menggunakan data dari SiPP dan laporan tersebut diunggah dalam E-Sakip. Sampai dengan bulan November para pegawai di lingkungan BPJN Sumatera Barat sudah meng-upload SKP triwulan II pada E-Kinerja	 <p>The screenshot shows two main components: a detailed financial report table and a monitoring dashboard. The table, titled 'LAPORAN KINERJA DETAIL PER RINGKAS PEKERJAAN', lists various projects with columns for 'No', 'Kode', 'Subsistem/Output/Hasil', 'Volume', 'Status', 'Pagu (M. B. 2023)', 'Pembelian (Rp)', 'Pembayaran (Rp)', 'KPI', 'KPI', 'KPI', and 'KPI'. Below the table is a monitoring dashboard for 'Monitoring SKP' with a sidebar menu and a main area showing a grid of data for 'FORM PENGEMBAKIAN DOKUMEN LAPORAN MONITORING KINERJA BULANAN ESELON II (UPT) SATUAN KERJA'. The dashboard includes a legend for 'Kategori' and a 'RESTRANSING' section with upload instructions.</p>

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
				
2	Meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya untuk meningkatkan pengukuran kinerja agar lebih inovatif serta layak untuk menjadi percontohan secara nasional kedepannya;	dilaksanakan pada awal Januari 2025 sesuai timeline pelaporan Laporan Kinerja	-
C. Pelaporan Kinerja				

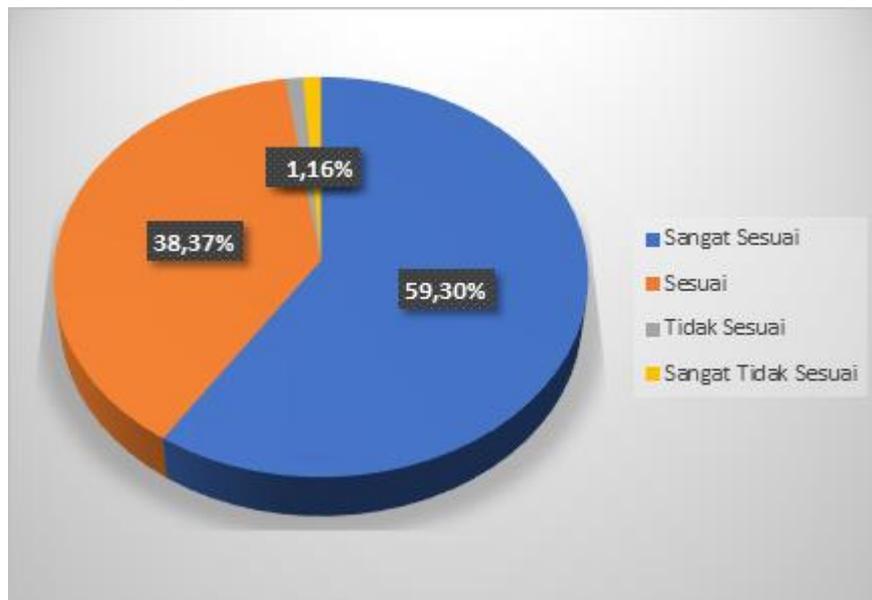
No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
1	Menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) dalam Dokumen Laporan Kinerja;	Info Analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional dalam dokumen laporan kinerja sudah disampaikan oleh UPT BPJN Sumatera Barat tiap bulannya dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja UPT BPJN Sumatera Barat dan laporan ini selalu diupload pada ESakip tiap minggu pertama atau kedua bulan berjalan	UPT BPJN Sumatera Barat sudah mengupload Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dari bulan Januari hingga bulan Desember 2024	
2	Meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional	UPT BPJN Sumatera Barat akan berusaha untuk meningkatkan pelaporan kinerja agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional kedepannya	dilaksanakan pada awal Januari 2025 sesuai timeline pelaporan Laporan Kinerja	-

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;	UPT BPJN Sumatera Barat sudah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dalam hal ini UPT BPJN Sumatera Barat menggunakan E-Sakip	Sampai dengan Awal bulan ini UPT BPJN Sumatera Barat sudah mengupload Dokumen PK Awal, Dokumen Rencana Aksi dan Laporan Monitoring Pencapaian Kinerja dan Evaluasi dari bulan Januari hingga bulan Desember 2024	
2	Meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai;	UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai ke depannya;	Akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024	-
3	Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar lebih inovatif serta layak menjadi	UPT BPJN Sumatera Barat akan berupaya untuk meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024	-

No.	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2023	Rencana Tindak Lanjut	Progres yang telah dilaksanakan sampai saat ini	Dokumentasi
	percontohan secara nasional.	agar lebih inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional ke depannya		

G. Informasi Dalam Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan pada total 86 responden, sebanyak 59,30 % mengatakan “sangat sesuai” dan 38,37 % mengatakan “sesuai”, dimana responden menyatakan setuju bahwa informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi. Sebesar 1,16 % responden mengatakan “tidak sesuai”.



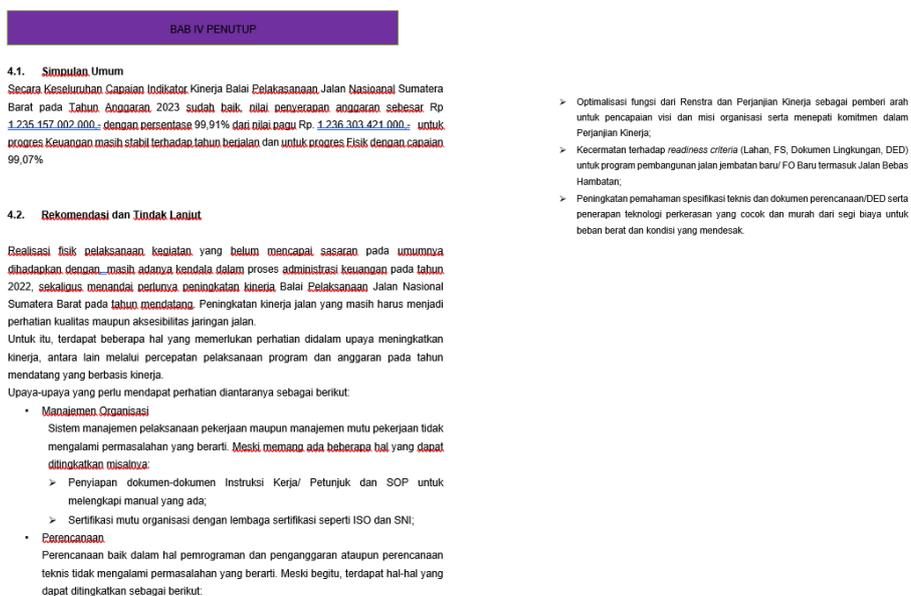
Gambar

3. 37 Hasil Kuisisioner Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi

Adapun muatan dalam kategori ini antara lain mencakup informasi: permasalahan serta rekomendasi dalam laporan kinerja menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi. Bukti yang mendukung informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi salah satunya dapat dilihat dalam proses manajemen risiko di level unit organisasi BPJN Sumatera Barat. Manajemen risiko merupakan faktor penting yang mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi melalui komitmen dan budaya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana manajemen risiko sendiri dilakukan berdasarkan pada pengendalian terhadap risikorisikoyang muncul dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Profil risikoyang telah disusun oleh BPJN Sumatera Barat sendiri disusun dengan mempertimbangkan sasaran

kinerja organisasi dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang termuat dalam laporan kinerja ditahun sebelumnya.

Salah satu rekomendasi dari Laporan Kinerja BPJN Sumatera Barat Tahun 2023 menitikberatkan pada Meminimalisir kendala di lapangan dan menetapkan target yang realistis untuk dicapai. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu risiko yang ditetapkan dalam profil risiko BPJN Sumatera Barat tahun 2024 beserta inovasi pengendaliannya. Dengan demikian, diharapkan peningkatan budaya kinerja khususnya terkait dengan komitmen organisasi dalam melaksanakan pengendalian risiko tersebut dalam rangkaian peningkatan kinerja dapat terwujud. Adapun bukti dukung Profil Risiko BPJN Sumatera Barat Tahun 2024 yang telah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja organisasi dalam Laporan Kinerja BPJN Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.10 Informasi Dalam Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi : Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada LAKIN 2024

Tabel 3.42 Bukti Dukung . Informasi Dalam Laporan Kinerja Selalu Mempengaruhi Perubahan Budaya Kinerja Organisasi : Profil Risiko Unit Organisasi BPJN Sumatera Barat

4. PROFIL RISIKO
 Unit Organisasi : Direktorat Jendral Bina Marga
 Unit Kerja : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
 Periode : 2024

No.	Tipe Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Pembuat	Dampak	Nilai Risiko yang malar					Pernyataan yang ada					Nilai Risiko setelah Pengendalian					Prioritas Risiko	Respon Risiko	Indikator Pengendalian (yang belum pernah dilakukan)	Aksi/No. Sumber Daya	Risiko yang dihapus			Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
						K	D	M	K	D	M	K	D	M	K	D	M	K	D	M										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18			
1	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Jalan Sepanjang 27,7 km	Mutu Pelayanan tidak sesuai spesifikasi	Risiko Kinerja	Ketepatan pengumpulan data dalam pelaksanaan pekerjaan	Kualitas mutu pelayanan tidak terpenuhi	4	4	19	1	Melakukan Uj. Pmk/2. Melakukan Laporan Quality Control	Menjadi	2	3	10	1	Menjaga	16	17	18	19	20	21	22	23						
2	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Jalan Sepanjang 17,7 km	Kelengkapan Data Program Kerja dan Anggaran dengan Komoditas di Lapangan	Risiko Fisik/Operasional	Kejelasan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan pekerjaan	Ketepatan anggaran	3	4	17	1	Adanya Komoditas Sempurna	Menjadi	2	2	7	2	Menjaga														
3	Penerapan Jalan Arteri kelas I dengan (One Way) dan Kawasan Strategis Nasional Sepanjang 21,00 km	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan time schedule yang telah dibuat	Risiko Kinerja	Kelengkapan Perencanaan	Pelaksanaan pekerjaan	4	3	16	1	Pengawasan dan Pelaporan secara rutin dan tepat waktu. Memastikan tenaga teknis Arteri yang sudah ada dalam hal pelaksanaan	Menjadi	2	2	7	3	Menjaga														
4	Layanan Perbaikan dan Pemeliharaan Pelaksanaan	Kelengkapan Analisa Rencana Program dengan Pelaksanaan	Risiko Kinerja	Penyusunan jadwal dengan kondisi di lapangan	Tidak sesuainya jadwal dengan kondisi di lapangan	4	3	16	1	Melakukan Slip Map Rutin dan Pengawasan Lapangan pada Arah Tahun Kegiatan	Menjadi	3	3	14	4	Mengurangi	100% Mengurangi Slip Map Rutin dan Pengawasan Lapangan pada Arah Tahun Kegiatan	100%	2	2	7	100%	100%	Slip Map Rutin tersedia di Kantor						
5	Pengukuran Ambalan Sepanjang 11 meter	Ketepatan dalam pelaksanaan pekerjaan	Risiko Kinerja	Kelengkapan Perencanaan	Ketepatan pelaksanaan pekerjaan	3	3	14	1	Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi pekerjaan	Menjadi	2	1	3	5	Menjaga														
6	Penerapan Pemeliharaan Jalan Arteri Sepanjang 143,21 km	Pengawasan pelaksanaan pekerjaan	Risiko Kinerja	Kejelasan Perencanaan	Pelaksanaan pekerjaan	3	3	14	1	Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan	Menjadi	2	1	3	6	Menjaga														
7	Dukung jalan Cerdas	CEO tidak sesuai standar pelaksanaan kerja dan desain pekerjaan	Risiko Kinerja	Kejelasan Perencanaan	Pelaksanaan pekerjaan	3	3	14	1	Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan	Menjadi	2	2	7	7	Menjaga														

Padang, 27 Desember 2023
 Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

 Thabrani, S.T., M.T.
 NIP. 198708111994031000

3.7 Paket Diresmikan dan Penghargaan

1. Penghargaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Sistem Satu Arsh (One Way) Pada Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H)



2. Lomba Video Posko Mudik Lebaran 2024 (Kategori Balai)



3.8 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Penggunaan Layanan Publik

Berdasarkan Permen PAN RB No.14 Tahun 2017, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka. Angka tersebut ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4. IKM ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian PUPR. Analisis IKM ini dapat dijadikan masukan untuk unit pelayanan publik Kementerian PUPR sebagai salah satu sumber informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian PUPR.

IKM diukur melalui kinerja tiap-tiap unit pelayanan publik di bawah Kementerian PUPR. Unit pelayanan publik tersebut merupakan unit kerja/kantor pelayanan pada Kementerian PUPR, yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan

Data hasil survei terlampir.

3.9 Paket Strategis

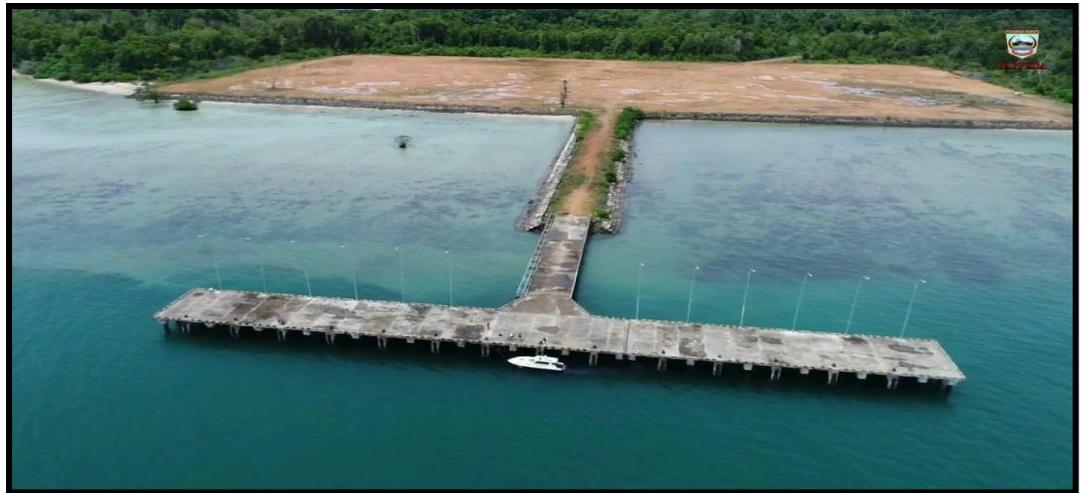
3.1.1 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Sumatera Barat

1. Paket Pembangunan Akses Pelabuhan Teluk Tapang – Bunga Tanjung

Kronologis Paket ini adalah :

- a. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan KEK pariwisata di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, menyampaikan Kepada Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat pada rapat Kordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 16 oktober tahun 2018 di gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman agar membangun jalan akses Pelabuhan Teluk tapang – Bungo tanjung dan dapat didukung (ditindak lanjuti oleh Bupati Pasaman barat)
- b. Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang – Bungo tanjung menjadi Prioritas Nasional dengan usulan pembangunan dengan biaya Rp. 470.680.000.000,-dengan panjang 41 Km, 2Km sudah jalan aspal, 39 Km masih jalan tanah untuk mempermudah pengangkutan barang (logistik) terutama hasil – hasil perkebunan kelapa sawit kepelabuhan sebagaimana diketahui hasil kelapa sawit di Pasaman Barat cukup besar.
- c. Pada tanggal 6 november tahun 2018 diadakan rapat pembahasan nilai anggaran antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III padang dengan Kasubdit Pemograman Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan hasil nilai Anggaran untuk Ta . 2020 sebesar Rp.40.000.000.000,- dengan panjang penanganan efektif 6 Km.
- d. Pada tanggal 19 Desember tahun 2019 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beserta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Pasaman Barat Beserta dengan Pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah

III Padang) melakukan kunjungan lapangan dengan agenda melihat kondisi lapangan pada saat tersebut.



Gambar 3.11 Pelabuhan Teluk Tapang

- e. Paket ini telah terkontrak pada tanggal 12 Maret 2020 Nilai kontrak awal sebesar Rp. 14.344.722.000,- Sepanjang 2 KM dengan Rekanan PT. Hariyona dengan pekerjaan tahap II sampai akhir kontrak Progres paket ini adalah 100 % untuk keuangan dan 100 % untuk fisik terhadap Pagu Kontrak



2020.

Gambar 3.12 Kondisi Jalan Paket Pembangunan Akses Pelabuhan Teluk Tapang

Bunga Tanjung

- f. Paket ini telah terkontrak pada tanggal 15 Januari 2021 Nilai kontrak awal sebesar Rp. 60,876,317.000,- Sepanjang 9.6 KM dengan Rekanan PT. Rimbo Pearduan dengan pekerjaan tahap III sampai saat ini Progres paket ini adalah 100 % untuk keuangan dan 100 % untuk fisik terhadap Pagu Kontrak 2021

Kebijakan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sumatera Barat saat ini mengarah kepada pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Barat dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan peningkatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan. Penjelasan mengenai isu strategis terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sebagai berikut :

a. Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Secara normatif, berdasarkan Lampiran III, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, ditetapkan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia. Dari 88 lokasi tersebut ditetapkan 10 destinasi prioritas dengan jargon kampanye: “Menciptakan 10 Bali Baru”. Selain itu, ada KSPN prioritas tambahan, yakni Toraja dan Mandeh sehingga 10+2 KSPN prioritas. Diperlukan peningkatan akses transportasi dan pembangunan infrastruktur yang akan menunjang pariwisata Mandeh ini semakin berkembang.

b. Mendukung nawacita Sektor Pariwisata

Dalam dokumen Nawacita, khususnya pembahasan Sektor Prioritas Pembangunan Kabinet Kerja, Jokowi – Ma’ruf Amin, sektor pariwisata adalah prioritas kelima, setelah Infrastruktur, Maritim, Energi dan Pangan.

c. Mendukung Pembangunan Jembatan Gantung Bagi Pejalan Kaki di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Barat

d. Mendukung pembangunan jalan daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktorfaktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang

tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan.

Paket-paket yang mendukung isu strategis di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ada beberapa kegiatan yang mendukung antara lain :

I. Paket preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Prov. Riau - Bts. Kota Payakumbuh (MYC)

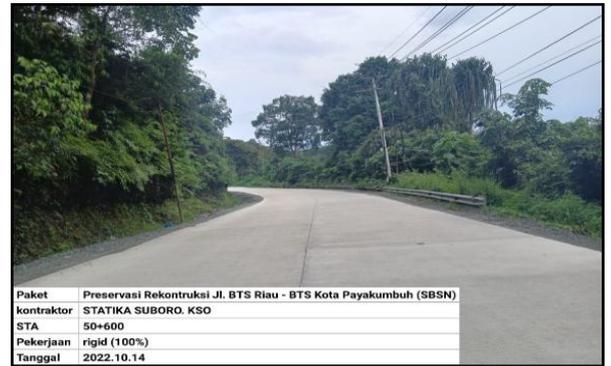
Lokasi Proyek	: Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
Nilai Kontrak	: Rp. 122.564.627.000,-
Nilai Kontrak Ta. 2022	: Rp. 69.694.662.000,-
Nilai Kontrak Ta. 2023	: Rp. 52.869.965.000,-
Jenis Kontrak	: MYC / SBSN
Nomor Kontrak	: 09/PKK/SK-PJN1-Bb.03.23.1.2/II/2022
Tanggal Kontrak	: 9 Februari 2022
Kontraktor Pelaksana	: STATIKA – SUBURO ,KSO
Konsultan Supervisi	: PT.Pola Agung KSO PT.Bina Karya dan PT. Anugerah Kridapradana
Masa Pelaksanaan	: 691 Hari Kalender
Masa Pemeliharaan	: 365 Hari Kalender
Tanggal PHO	: 31 Desember 2023

Tanggal FHO : 31 Desember 2024

Progres Keu : Ren = 100 %
Real = 100 %
Dev = 0

Progres Fisik : Ren = 100 %
Real = 100 %
Dev = 0 %

FOTO DOKUMENTASI



II. Paket Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang (MYC ON GOING)

Lokasi Proyek : Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat

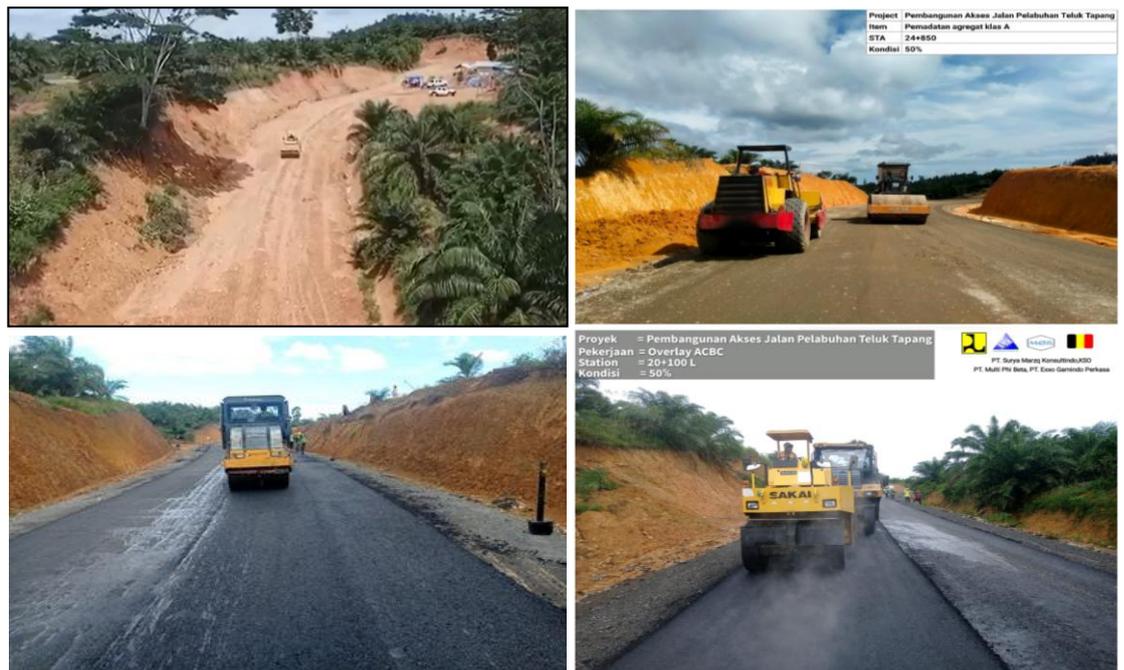
Penyedia Jasa : WIKA – PEP, KSO

SPPBJ : KU.03.01-Bb3-PJNWI-SB-PPKI.1/931 : 22 Agustus 2022

Kontrak : 14/PKK/SK-PJN1-Bb.03.23.1.4/IX/2022 ; 09 September 2022

SPMK	:	PW.04.01-Bb3-PJNWI-SB-PPK1.4/1022	;	12
September 2022				
SPL	:	PW.04.01-Bb3-PJNWI-SB-PPK1.4/1021	;	12
September 2022				
BA STL	:	PW.04.01-Bb3-PJNWI-SB-PPK1.4/1023		
Nilai Kontrak	:	Rp 216.419.511.400,- (Inc. PPN 11%)		
Sumber Dana	:	SBSN TH. 2022 s.d TH 2024		
Tahun 2022	:	Rp 60.000.000.000,-		
Tahun 2023	:	Rp 80.742.847.000,-		
Tahun 2024	:	Rp 75.676.664.400,-		
Jenis Kontrak	:	Unit Price		
Uang Muka	:	15 % atau senilai Rp 32.462.926.710,- (Inc. PPN 11%)		
Masa Pelaksanaan	:	600 Hari Kalender (sd 03 Mei 2024)		
Masa Pemeliharaan	:	365 Hari Kalender (sd 01 Mei 2025)		
Progres Keu	:	Ren = 100 %		
		Real = 100%		
		Dev = 0 %		
Progres Fisik	:	Ren = 100 %		
		Real = 100 %		
		Dev = 0, %		

FOTO DOKUMENTASI



III. Paket Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Jembatan Bailey Labuhan Bajau - Sigapokna (Pulau Siberut), (MYC ON GOING)

Nomor Kontrak	: 15/PKK/SK-PJN1-Bb.03.23.1.6/IX/2022
Tanggal	: 09 September 2022
Nilai Kontrak Awal	: Rp. 53.647.650.000,-
Kontrak TA. 2022 (Revisi III Dipa)	: Rp 15.000.000.000,-
Nama Rekanan	: PT. Petarangan Utama - PT. Mina Fajar Abadi, KSO
Masa Pelaksanaan	: 420 Hari kalender
Progres Keu	: Ren = 100 % Real = 100 % Dev = 0 %
Progres Fisik	: Ren = 100 % Real = 86.66 % Dev = -13.34 %
Keterangan	: Paket bekerja dalam masa denda, pembayaran dengan RPATA pada tahun Berikutnya (2024)

FOTO DOKUMENTASI



Pek. Bahu Jalan



Pek. Penghamparan Lapis



Pek. Galian ABT Jembatan Bailey



Pek. Perkerasan Beton Semen

Tanggal	:	07 November 2022
Nilai Kontrak Awal Total	:	Rp 156.470.400.000,-
Kontrak TA. 2022 (Revisi III Dipa)	:	Rp 40.000.000.000,-
Nama Rekanan	:	ADHI - MAK KSO
Masa Pelaksanaan	:	600 Hari kalender
Progres Keu	:	Ren = 100 %
		Real = 100 %
		Dev = 0 %
Progres Fisik	:	Ren = 100 %
		Real = 100 %
		Dev = 0 %



Pek. Timbunan Biasa dari Sumber



Pek. Laston Lapis Aus AC-WC



Pek. Gorong-Gorong Kotak Beton



Pek Aspal

V. Paket Penanganan Jalan Sioban (Simp. Logpon) – Katiet, (MYC BARU ON GOING)

Nomor Kontrak : 19/PKK/SK-PJN1-
Bb.03.23.1.6/XI/2022

Tanggal : 07 November 2022

Nilai Kontrak Awal Total : Rp. 144.250.900.000,-

Kontrak TA. 2022 (Revisi III Dipa) : Rp 22.883.524.000,-

Nama Rekanan : PT. RIMBO PERADUAN

Masa Pelaksanaan : 600 Hari kalender

Progres Keu : Ren = 100 %
Real = 100 %
Dev = 0 %

Progres Fisik : Ren = 100 %
Real = 100 %
Dev = 0 %

FOTO DOKUMENTASI



Per. Gorong-gorong Beton



50 %

Paket	Penanganan Jln. Sioban (simp. loqpan)-Katiet
Pekerjaan	Base A
Lokasi	Kab. Kepulauan Mentawai Provinsi Sumbar
STA	2+300
kondisi	50%



Pek. RWC



75 %

3.1.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. Sumatera Barat

1. Paket Pembangunan Jembatan Gantung Cubadak Air

Paket Pembangunan Jembatan Gantung Cubadak Air terkontrak pada tanggal 17 April 2023 dengan nilai kontrak Rp3.797.967.000 sesuai Kontrak No: KU.02.10/KTR.08.PPK-2.1-PJN.II/IV/2023 dengan panjang bentang 60 M. Masa pelaksanaan pekerjaan yaitu 240 hari kalender dan rekanan yang melaksanakan adalah CV. Sungai Badak. Saat ini jembatan ini banyak membantu dan mempermudah akses transportasi setempat.

Rincian paket tersebut adalah sebagai berikut:

Total Pagu	Alokasi Kebutuhan per Tahun
	T.A. 2023
Rp3.797.967.000,-	Rp3.797.967.000,-

Berikut foto dokumentasi Pembangunan Jembatan Gantung Cubadak Air:



Gambar 0.13 Paket Pembangunan Jembatan Gantung Cubadak Air

2. Paket Pembangunan Jembatan Gantung Jorong Ranah

Paket Pembangunan Jembatan Gantung Jorong Ranah terkontrak pada tanggal 07 Maret 2023 dengan nilai kontrak Rp4.484.104.000 sesuai Kontrak No: KU.02.10/KTR.07.PPK-2.2-PJN.II/III/2023 dengan panjang bentang 120 M. Masa pelaksanaan pekerjaan yaitu 297 hari kalender dan rekanan yang melaksanakan adalah CV. Indragiri Putra. Saat ini jembatan ini banyak membantu dan mempermudah akses transportasi setempat.

Rincian paket tersebut adalah sebagai berikut:

Total Pagu	Alokasi Kebutuhan per Tahun
	T.A. 2023
Rp4.484.104.000,-	Rp4.484.104.000,-

Berikut foto dokumentasi Pembangunan Jembatan Gantung Jorong Ranah:



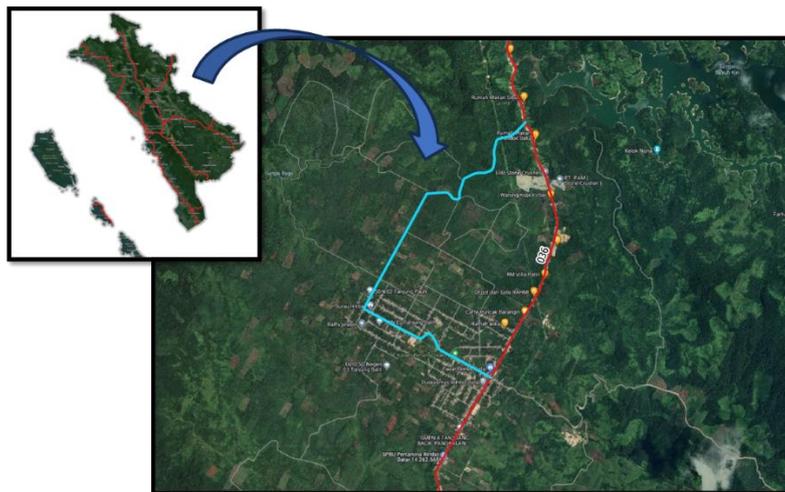
Gambar 3.14 Paket Pembangunan Jembatan Gantung Jorong Ranah

3.1.3 Penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023

NO	PROVINSI/SATKER/NAMA PAKET	KAB. /KOTA	PANJANG (Km)	PAGU ALOKASI (Rp Ribu)	NILAI KONTRAK (Rp Ribu)	TEMATIK	REAL KEUANGAN (%)	REAL FISIK (%)
	SUMATERA BARAT		31,77	147.160.897	144.367.896			
I	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT		15,95	63.908.681	55.188.224			
1	PENINGKATAN JALAN POROS – TANJUNG BALIK PANGKALAN	Kab. Lima Puluh Kota	5,40	13.205.720	11.871.346	Mendukung Kawasan Perkebunan	100,00	100,00
2	PENINGKATAN JALAN KOTA PAYAKUMBUH (JL. RASYID TAHER, JL. PROF. DR. HAMKA DAN JL. H. AGUS SALIM)	Kota Payakumbuh	3,66	17.358.099	13.886.252	Mendukung Konektivitas	100,00	100,00
3	PENINGKATAN JALAN TOMBANG PADANG - SILAYANG MUDIK	Kab. Pasaman Barat	3,00	11.706.150	9.351.078	Mendukung Kawasan Perkebunan	100,00	100,00
4	PENINGKATAN JALAN WATER FRONT CITY SUNUR-BALAI KURAI TAJI	Kota Pariaman	1,96	12.463.690	10.983.039	Mendukung Kawasan Pariwisata	100,00	100,00
5	PENINGKATAN JALAN BTS. KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI	Prov. Sumatera Barat	1,93	-	9.096.509	Mendukung Konektivitas	100,00	100,00

NO	PROVINSI/SATKER/NAMA PAKET	KAB. /KOTA	PANJANG (Km)	PAGU ALOKASI (Rp Ribu)	NILAI KONTRAK (Rp Ribu)	TEMATIK	REAL KEUANGAN (%)	REAL FISIK (%)
II	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT		15,82	88.141.000	85.481.852			
6	PENINGKATAN JALAN SUNGAI RUMBAI – BATAS SOLOK SELATAN	Kab. Dharmasraya	3,20	20.215.000	19.087.000	Mendukung Konektivitas	100,00	100,00
7	PENINGKATAN JALAN KAPUJAN – RIMBO DATA	Kab.Solok	9,00	37.000.000	35.991.122	Mendukung Kawasan Pertanian	100,00	100,00
8	PENINGKATAN JALAN SUNGAI SUNGKAI - LOG BATU SANDI /BATAS DHARMASRAYA	Kab. Solok Selatan	3,62	30.926.000	30.403.730	Mendukung Kawasan Perkebunan	100,00	100,00
III	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT			4.286.238	3.697.820			
9	PENGAWASAN INPRES JALAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT (PAKET I)	-	-	1.642.010	1.532.620	-	100,00	100,00
10	PENGAWASAN INPRES JALAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT (PAKET II)	-	-	2.644.228	2.165.200	-	100,00	100,00

PENINGKATAN JALAN POROS – TANJUNG BALIK PANGKALAN



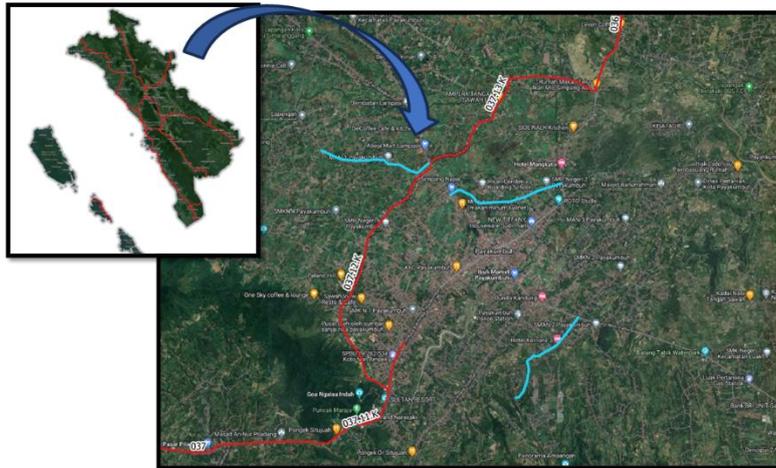
Data Kontrak :
 Nama Paket : Peningkatan Jalan Poros - Tanjung Balik Pangkalan
 Nilai Kontrak : Rp 11.871.346.000
 Penyedia Jasa : CV. Insani Kontraktor
 Tanggal Kontrak : 26 Juli 2023
 Tanggal PHO : 23 Desember 2023

- Lingkup Kegiatan :**
- Panjang = 5,715 km
 - Lebar = 3 - 3,5 m
 - Bahu = Kelas S (variasi) dan Beton fc' 15
 - t LPA = 25 cm
 - Lebar LPA = 3,5 m
 - t AC-WC = 5 cm

Dokumentasi Pelaksanaan :



**PENINGKATAN JALAN KOTA PAYAKUMBUH
(JL. RASYID TAHER, JL. PROF. DR. HAMKA DAN JL. H. AGUS SALIM)**



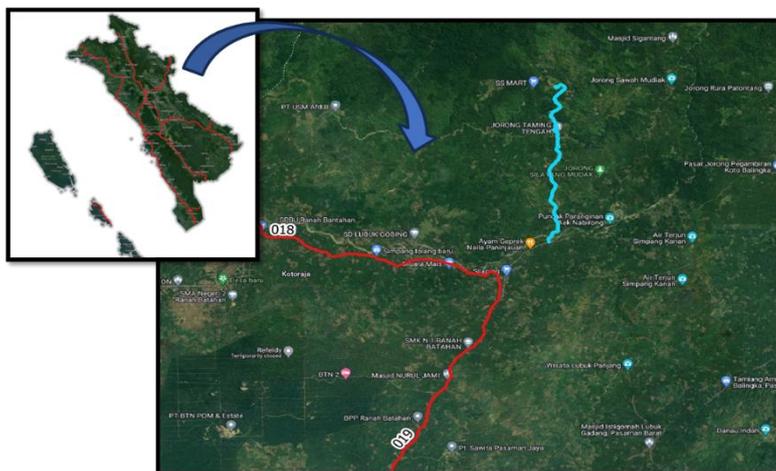
Data Kontrak :
 Nama Paket : Peningkatan Jalan Kota Payakumbuh
 (Jl. Rasyid Taher, Jl. Prof. Dr. Hamka,
 Dan Jl. H. Agus Salim)
 Nilai Kontrak : Rp 13.886.252.000
 Penyedia Jasa : PT. PEBANA ADI SARANA
 Tanggal Kontrak : 26 Juli 2023
 Tanggal PHO : 23 Desember 2023

- Lingkup Kegiatan :**
- ❖ Total Panjang : 3,58 KM
 - ❖ Ruas Jalan H. Agus Salim
 - Panjang = 880 m
 - Lebar = sampai dengan 5,5 m
 - ❖ Ruas Jalan Prof Dr. Hamka
 - Panjang = 1,8 km
 - ❖ Ruas Jalan Rasyid Taher
 - Panjang = 900 m (Segmen 1= 500 m dan Segmen 2 = 400 m)
 - Lebar = sampai dengan 5,5 m
 - t AC-BC = 6 cm
 - t AC-WC = 4 cm

Dokumentasi Pelaksanaan :



PENINGKATAN JALAN TOMBANG PADANG - SILAYANG MUDIK



Data Kontrak :
 Nama Paket : Peningkatan Jalan Tombang –
 Silayang Mudik
 Nilai Kontrak : Rp 9.351.078.000
 Penyedia Jasa : PT. Mandala Wangi Lestari
 Tanggal Kontrak : 03 Agustus 2023
 Tanggal PHO : 31 Desember 2023

- Lingkup Kegiatan :**
- Panjang = 3 km
 - t Urugan Pilihan = 20 cm
 - t LPA = 40 cm (2 lapis dengan tebal 20cm/lapisan)
 - Lapis pondasi dengan sirtu
 - Hotmix 1 lapis (untuk lapis pondasi dengan LPA Kelas A) :
 - t AC-WC = 5 cm
 - lebar AC-WC = 3,5 cm
 - Hotmix 2 lapis (untuk lapis pondasi dengan sirtu) :
 - t AC-BC = 6 cm
 - t AC-WC = 4 cm
 - Pekerjaan Drainase = Pasangan Batu dan Saluran Tanah
 - Pemasangan Box = 6 titik
 - Ukuran Box = 1,8 m x 1,8m

Dokumentasi Pelaksanaan :



PENINGKATAN JALAN WATER FRONT CITY SUNUR-BALAI KURAI TAJI



Data Kontrak :
Nama Paket : Peningkatan Jalan Water Front City Sunur – Balai Kurai Taji (Kota Pariaman)
Nilai Kontrak : Rp 10.983.039,000
Penyedia Jasa : CV. Lautan Sati
Tanggal Kontrak : 31 Agustus 2023
Tanggal PHO : 01 Februari 2024

Lingkup Kegiatan :

- Panjang = 1,9 km
- Lebar = 4 m
- Lebar bahu = 1 m
- t Urugan Pilihan (levelling) = 10 – 15 cm
- t LPA = 40 cm (2 lapis dengan tebal 20cm/lapisan)
- t AC-WC = 5 cm
- Lebar AC-WC = 6 m
- Volume Pasangan Batu = ± 4000 m³ (Pada Drainase)

Dokumentasi Pelaksanaan :



BAB IV PENUTUP

4.1.Simpulan Umum

Secara Keseluruhan Capaian Indikator Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 sudah baik, nilai penyerapan anggaran sebesar Rp 1.235.157.002.000,- dengan persentase 99,91% dari nilai pagu Rp. 1.236.303.421.000,- untuk progres Keuangan masih stabil terhadap tahun berjalan dan untuk progres Fisik dengan capaian 99,07%

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPJN Sumatera Barat dalam melaksanakan pekerjaan di bulan Juni didukung oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal antara lain :

1. Memperbaharui (updating) data kemajuan (progres) pekerjaan baik kontraktual ataupun non kontraktual pada <https://iemon.pu.go.id/> secara rutin pada hari senin dan kamis setiap minggunya.
2. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada ouput yang mengalami keterlambatan dengan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.
3. Semua administrasi kegiatan (non kontraktual) sudah harus diselesaikan paling lambat per tgl 20 setiap bulannya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas progres pelaksanaan kegiatan

4.1..2 Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam pelaksanaan kegiatan pada 2024, beberapa kendala yang dialami oleh

Satker Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- Komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan belum kuat.
- Jumlah SDM yang belum memenuhi sehingga progress pekerjaan sering tidak sesuai eklpektasi karena personal yang bersangkutan sedang mengerjakan pekerjaan lainnya

4.2.Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai sasaran pada umumnya dihadapkan dengan masih adanya kendala dalam proses administrasi keuangan pada tahun 2022, sekaligus menandai perlunya peningkatan kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat pada tahun mendatang. Peningkatan kinerja jalan yang masih harus menjadi perhatian kualitas maupun aksesibilitas jaringan jalan.

Untuk itu, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian didalam upaya meningkatkan kinerja, antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun mendatang yang berbasis kinerja.

Upaya-upaya yang perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut:

- Manajemen Organisasi

Sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan maupun manajemen mutu pekerjaan tidak mengalami permasalahan yang berarti. Meski memang ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan misalnya:

- Penyiapan dokumen-dokumen Instruksi Kerja/ Petunjuk dan SOP untuk melengkapi manual yang ada;
- Sertifikasi mutu organisasi dengan lembaga sertifikasi seperti ISO dan SNI;

- Perencanaan

Perencanaan baik dalam hal pemrograman dan penganggaran ataupun perencanaan teknis tidak mengalami permasalahan yang berarti. Meski begitu, terdapat hal-hal yang dapat ditingkatkan sebagai berikut:

- Optimalisasi fungsi dari Renstra dan Perjanjian Kinerja sebagai pemberi arah untuk pencapaian visi dan misi organisasi serta menepati komitmen dalam Perjanjian Kinerja;
- Kecermatan terhadap *readiness criteria* (Lahan, FS, Dokumen Lingkungan, DED) untuk program pembangunan jalan jembatan baru/ FO Baru termasuk Jalan Bebas Hambatan;
- Peningkatan pemahaman spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan/DED serta penerapan teknologi perkerasan yang cocok dan murah dari segi biaya untuk beban berat dan kondisi yang mendesak.

LAMPIRAN